



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**LOGISTICS**

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

**2024**

Direktorat Logistik  
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk  
Kelautan dan Perikanan

**DITJEN PDSPKP**

**#Logistics4competitiveness**

**#KITAPDS**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 yaitu Kinerja Logistik Ikan Nasional adalah (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan IV sebesar 100,71

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Logistik



**Berny A. Subki**

## TIM PENYUSUN

### PENGARAH

Direktur Logistik

### PENYUSUN

Tim Penyusunan Pelaporan Direktorat Logistik

### KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan IV Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 16 (enam belas) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP, dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor), Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit), Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data), Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit), Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), Sarana

distribusi logistik produk KP (MP Korporasi), Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit), Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit), Nilai PNPB di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai), Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%), dan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%). Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga), Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan), Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan), Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga), Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%), dan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks) dan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan IV adalah sebesar 100,71 Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetkan pada Triwulan IV. Adapun rincian capaian periode Triwulan IV yaitu sebagai berikut :

- IKK Koridor Logistik Hasil Perikanan yang Terkelola (Koridor); target 5 Lembaga; capaian 5 Koridor atau 100% dari target;
- IKK Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit); target 1 Unit; Capaian 1 Unit atau 100% dari target;
- IKK Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data); target 4 Data; capaian 4 Data atau 100% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga atau 100% dari target;

- IKK Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan); target 3 Rekomendasi Kebijakan; capaian 3 Rekomendasi Kebijakan atau 100% dari target;
- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 23 Kesepakatan; capaian 23 Kesepakatan atau 100% dari target;
- IKK Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit); target 10 Unit; capaian 10 Unit atau 100% dari target;
- IKK Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit); target 5 Unit; capaian 5 Unit atau 100% dari target;
- IKK Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi); target 5 Unit; capaian 5 Unit atau 100% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 8 Lembaga; capaian 8 Lembaga atau 100% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga
- IKK Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit); target 4 Unit; Capaian 4 Unit atau 100% dari target;
- IKK Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit); target 287 Unit; capaian 293 Unit atau 102% dari target;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 1100 Orang; capaian 1100 Orang atau 100% dari target;
- IKK Nilai PNPB di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar); target 2,06 Miliar; capaian 2,06 Miliar atau 100% dari target;
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks); target 87 Indeks; capaian 88,06 Indeks atau 101,22 dari target;
- IKK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai); target 84 Nilai; capaian 84,45 Nilai atau 100,54% dari target'
- IKK Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 100%; capaian 100% atau 100% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 100 sebesar 125 % dari target;
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 120% dari target.
- IKK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%); target 80%; capaian 98,24% atau 122% dari target;

- IKK Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 95%; capaian 97,73% atau 102,87% dari target.

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Logistik besarnya Rp.45.767.163.000,-. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp.44.728.333.262,- atau setara dengan 97,73% dari pagu efektif.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan IV Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan IV Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

# DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                      | <b>i</b>   |
| <b>TIM PENYUSUN</b> .....                        | <b>ii</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....                  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                       | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                        | <b>ix</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....                      | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                         | 1          |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                      | 2          |
| 1.3 Tugas dan Fungsi .....                       | 2          |
| 1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia .....           | 3          |
| 1.5 Permasalahan Utama .....                     | 3          |
| 1.6 Sistematika Penyajian .....                  | 4          |
| <b>II. Perencanaan Kinerja</b> .....             | <b>6</b>   |
| 2.1 Rencana Strategis .....                      | 6          |
| 2.1.1 Sasaran Kegiatan .....                     | 6          |
| 2.1.2 Kebijakan .....                            | 7          |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....                     | 8          |
| <b>III. Akuntabilitas Kinerja</b> .....          | <b>10</b>  |
| 3.1 Capaian Kinerja .....                        | 10         |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....          | 12         |
| 3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik ..... | 131        |
| <b>IV. Penutup</b> .....                         | <b>133</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                            | 133        |
| <b>V. Lampiran</b> .....                         | <b>139</b> |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar     | Judul   | Hal |
|------------|---|-----|
| Gambar 1.  | Kegiatan Rapat Pembahasan Data Penyusunan Regulasi Public Service Obligation (PSO)  | 16  |
| Gambar 2.  | Pembahasan Pembobotan IKLI moda Transportasi Darat dan Laut   | 17  |
| Gambar 3.  | Pembahasan Hasil Survey Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)   | 18  |
| Gambar 4.  | Regional Training on Traceability and Effective Management Tools for Fish and Fishery Products in Southeast Asia                          | 21  |
| Gambar 5.  | Pengenalan Basic Mix Advance Standar Ketertelusuran Global GS1 untuk mendukung Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) | 22  |
| Gambar 6.  | Pertemuan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi STELINA.                                | 24  |
| Gambar 7.  | Koordinasi Penyusunan Rancangan Interkoneksi/Interoperabilitas STELINA.   | 26  |
| Gambar 8.  | Pemantauan implementasi ketertelusuran hasil perikanan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara  | 27  |
| Gambar 9.  | Pemantauan implementasi ketertelusuran hasil perikanan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara  | 28  |
| Gambar 10. | Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional              | 30  |
| Gambar 11. | Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Aplikasi STELINA dalam rangka interoperabilitas dengan aplikasi Tracetales                             | 31  |
| Gambar 12. | Pembahasan Hasil Pembobotan Tim Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)   | 34  |
| Gambar 13. | Pemenuhan data dukung usulan penyempurnaan KBLI 2020  | 36  |

|            |   |       |    |
|------------|---|-------|----|
| Gambar 14. | Verifikasi Pelaku Usaha Cold Storage (CS) di Kabupaten Bekasi   | ..... | 38 |
| Gambar 15. | Kegiatan rapat dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan   | ..... | 40 |
| Gambar 16. | Kegiatan dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya, dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)      | ..... | 41 |
| Gambar 17. | Kegiatan Rapat Pembahasan Data Penyusunan Regulasi Public Service Obligation (PSO)  | ..... | 42 |
| Gambar 18. | Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024  | ..... | 45 |
| Gambar 19. | Kegiatan Verifikasi Usulan Rencana Kebutuhan Impor Komoditas Hasil Perikanan Tahun 2025   | ..... | 46 |
| Gambar 20. | Kegiatan rapat dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO) | ..... | 47 |
| Gambar 21. | Kegiatan Rapat Dalam rangka monitoring dan evaluasi komoditas pelarangan dan pembatasan (lartas) pada implementasi pemasukan hasil perikanan  | ..... | 50 |
| Gambar 22. | Kegiatan rapat dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO) | ..... | 52 |
| Gambar 23. | Kegiatan FGD Dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)   | ..... | 54 |

|            |   |       |    |
|------------|---|-------|----|
| Gambar 24. | Sosialisasi dan Implementasi PermenKP No 9 Tahun 2024   | ..... | 59 |
| Gambar 25. | Sosialisasi dan Implementasi PermenKP No 9 Tahun 2024   | ..... | 61 |
| Gambar 26. | Koordinasi Persiapan Penerapan CDIB dan Penerbitan SPDI   | ..... | 62 |
| Gambar 27. | Audiensi PPLI dengan Dit. Logistik terkait Penerapan CDIB dan Sertifikasi SPDI  | ..... | 64 |
| Gambar 28. | Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)   | ..... | 68 |
| Gambar 29. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)                        | ..... | 70 |
| Gambar 30. | Pendampingan Kemitraan UMKM Dengan Penyedia Bahan Baku  | ..... | 71 |
| Gambar 31. | Pembahasan progres pekerjaan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Beku  | ..... | 72 |
| Gambar 32. | Pembahasan Formulasi Persentase Okupansi dan Nilai Turn Over Gudang Beku  | ..... | 74 |
| Gambar 33. | Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Cold Storage melalui Kemitraan Usaha dengan PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) | ..... | 77 |
| Gambar 34. | Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan Pengadaan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP)  | ..... | 80 |
| Gambar 35. | Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan Pengadaan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP)  | ..... | 81 |
| Gambar 36. | Monitoring evaluasi pengadaan GBP Tahun 2024  | ..... | 82 |
| Gambar 37. | Pemeriksaan pekerjaan dan Serah terima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP)  | ..... | 83 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Gambar 38. | Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan dan penandatanganan BAST Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2024         | 84  |
| Gambar 39. | Pembahasan Adendum Surat Pesanan (SP) Kendaraan Berefrigerasi (KR)   | 87  |
| Gambar 40. | Pembahasan atas Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024                                | 88  |
| Gambar 41. | Pre Delivery Inspection (PDI) atau Pengecekan Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi (KR)                   | 89  |
| Gambar 42. | Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024 | 91  |
| Gambar 43. | Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024 | 93  |
| Gambar 44. | Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi  | 95  |
| Gambar 45. | Koordinasi dan Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan dan Rumput Laut sebagai Solusi Pembiayaan          | 99  |
| Gambar 46. | Pembahasan pemutakhiran petunjuk teknis Sistem Resi Gudang (SRG)   | 100 |
| Gambar 47. | Pembahasan Finalisasi Petunjuk Teknis Sistem Resi Gudang (SRG)   | 101 |
| Gambar 48. | Monitoring implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Ikan dan Rumput Laut serta Identifikasi Calon Pengelola SRG di kota Tarakan | 104 |
| Gambar 49. | Pemantauan STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kalimantan Barat        | 107 |
| Gambar 50. | Pembukaan Bulan Literasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2024  | 109 |
| Gambar 51. | Identifikasi dan pendampingan Calon Pengelola Gudang SRG di Kota Batam   | 112 |

|           |   |       |     |
|-----------|---|-------|-----|
| Gambar 52 | Persiapan Pengandaan Jasa Konsultasi<br>Perencanaan Kapal Angkut  | ..... | 115 |
| Gambar 53 | Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan<br>Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan<br>Kapal Angkut Ikan Tahun 2024 | ..... | 116 |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b> | <b>Judul</b>   | <b>Hal</b> |
|--------------|--|------------|
| Tabel 1.     | Perjanjian Kinerja Tahun 2024<br>Direktorat Logistik .....                                 | 8          |
| Tabel 2.     | Ikhtisar Pencapaian Kinerja<br>Direktorat Logistik Periode<br>Triwulan II Tahun 2024 ..... | 11         |
| Tabel 3.     | Target dan capaian IK 1 .....  | 14         |
| Tabel 4.     | Target dan capaian IK 2 .....  | 19         |
| Tabel 5.     | Target dan capaian IK 3 .....  | 32         |
| Tabel 6.     | Target dan capaian IK 4 .....  | 39         |
| Tabel 7.     | Target dan capaian IK 5 .....  | 43         |
| Tabel 8.     | Target dan capaian IK 6 .....  | 55         |
| Tabel 9.     | Target dan capaian IK 7 .....  | 78         |
| Tabel 10.    | Target dan capaian IK 8 .....  | 85         |
| Tabel 11.    | Target dan capaian IK 9 .....  | 93         |
| Tabel 12.    | Target dan capaian IK 10 .....   | 97         |
| Tabel 13.    | Target dan capaian IK 11 .....   | 113        |

|           |  |       |     |
|-----------|--|-------|-----|
| Tabel 14. | Target dan capaian IK 12               | ..... | 117 |
| Tabel 15. | Target dan capaian IK 13               | ..... | 118 |
| Tabel 16. | Target dan capaian IK 14               | ..... | 120 |
| Tabel 17. | Target dan capaian IK 15               | ..... | 121 |
| Tabel 18. | Target dan capaian IK 16               | ..... | 122 |
| Tabel 19. | Target dan capaian IK 17               | ..... | 124 |
| Tabel 20. | Target dan capaian IK 18               | ..... | 125 |
| Tabel 21. | Target dan capaian IK 19               | ..... | 126 |
| Tabel 22. | Target dan capaian IK 20               | ..... | 127 |
| Tabel 23. | Target dan capaian IK 21               | ..... | 129 |
| Tabel 24. | Target dan capaian IK 22               | ..... | 130 |
| Tabel 25. | Realisasi anggaran Direktorat Logistik | ..... | 132 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diamanatkan.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun 2024.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan IV Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

## **1.3 Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi lingkup Direktorat Logistik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

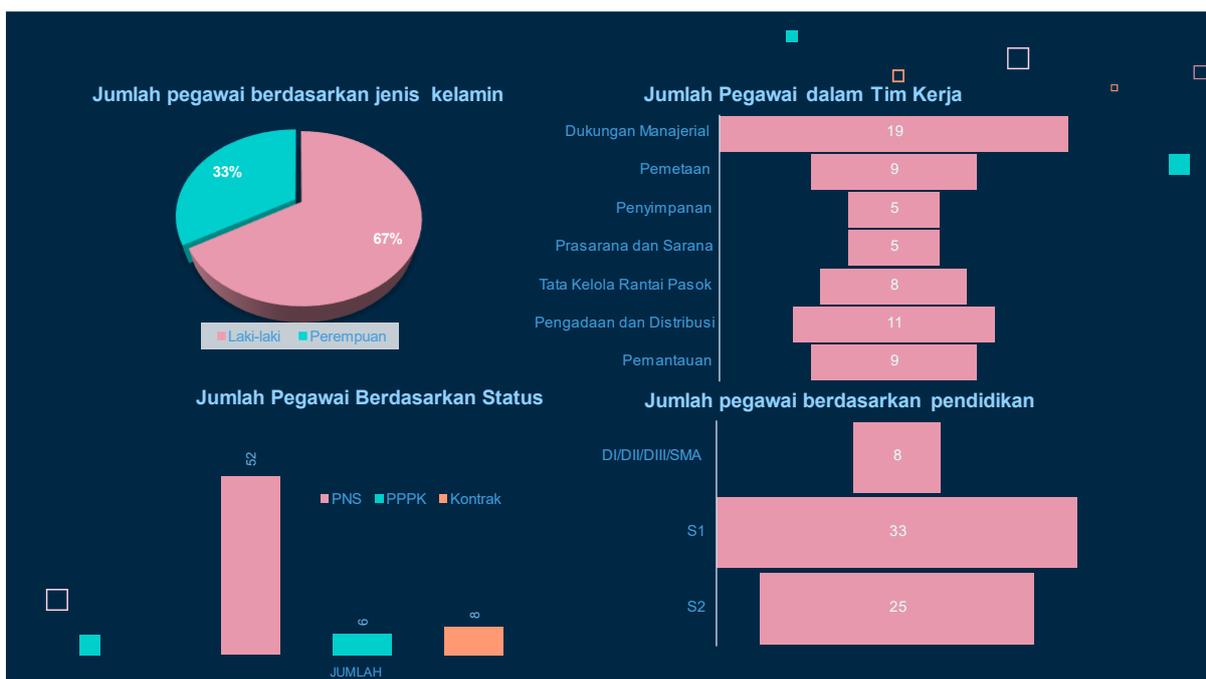
1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;

6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

#### 1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan IV Tahun 2024, Direktorat Logistik memiliki total 66 pegawai, terdiri dari 44 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 52 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 25 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 19 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 11 orang, Timja Pemetaan dan Timja Pemantauan masing-masing memiliki 9 orang, dan Timja Tata Kelola Rantai Pasok serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 8 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

#### 1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Mismatch Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

## **1.6 Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan IV Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan IV Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan IV Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

#### VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

#### MISI

**Kedaulatan (Sovereignty):**

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

**Keberlanjutan (Sustainability):**

mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

**Kesejahteraan (Prosperity):**

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

##### 2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2024 mempunyai 16 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya

Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBK Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP; dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

### **2.1.2 Kebijakan**

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.806.837.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan pagu revisi menjadi Rp.45.767.163.000.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |  | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|--|--------|
| 1.               | Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan  | 1.                         | Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)  | 5      |
| 2.               | Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)  | 2.                         | Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)                                      | 1      |
| 3.               | Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP   | 3.                         | Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)  | 4      |
| 4.               | Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok  | 4.                         | Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)                               | 5      |
| 5.               | Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas                     | 5.                         | Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)            | 3      |
| 6.               | Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP | 6.                         | Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan) | 23     |
| 7.               | Tersedianya sarana penyimpanan produk KP   | 7.                         | Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)  | 10     |
| 8.               | Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP   | 8.                         | Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)  | 5      |
| 9.               | Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha                             | 9.                         | Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)  | 5      |
| 10.              | Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang                              | 10.                        | Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)                     | 8      |
| 11.              | Terfasilitasinya Lembaga   | 11.                        | Lembaga Pengelola Kapal  | 5      |

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET |
|------------------|---|----------------------------|---|--------|
|                  | Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan   |                            | Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)   |        |
| 12.              | Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton  | 12.                        | Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)   | 4      |
| 13.              | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku  | 13.                        | Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)   | 287    |
| 14.              | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan                            | 14.                        | Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)   | 1.100  |
| 15.              | Nilai PNBPN Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP   | 15.                        | Nilai PNBPN di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)   | 2,06   |
| 16.              | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik | 16.                        | Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)   | 87     |
|                  |   | 17.                        | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)   | 84     |
|                  |   | 18.                        | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)  | 100    |
|                  |   | 19.                        | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%) | 80     |
|                  |   | 20.                        | Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)                          | 94     |
|                  |   | 21.                        | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)                                     | 80     |
|                  |   | 22.                        | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)   | 95     |

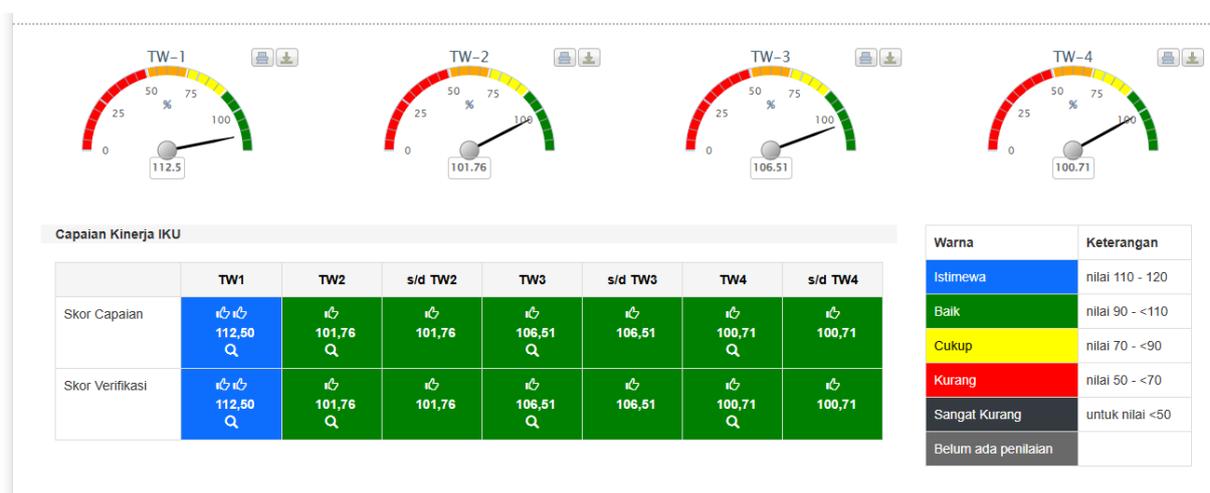
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2024 memiliki 22 indikator kinerja yang terdiri dari rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Oktober sampai dengan Desember 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 100.71.



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan IV Direktorat Logistik pada aplikasi kinerja

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan IV Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan IV Tahun 2024

| No  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target        |               | Realisasi<br>TW IV<br>2024 | Persentase terhadap<br>target (%) |                |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
|     |  | Tahun<br>2024 | TW IV<br>2024 |                            | Tahun 2024                        | TW III<br>2024 |
| 1.  | Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola (Koridor)   | 5             | 5             | 5                          | 100                               | -              |
| 2.  | Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)                                      | 1             | 1             | 1                          | 100                               | -              |
| 3.  | Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)  | 4             | 4             | 4                          | 100                               | -              |
| 4.  | Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)                               | 5             | 5             | 5                          | 100                               | -              |
| 5.  | Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)            | 3             | 3             | 3                          | 100                               | -              |
| 6.  | Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan) | 23            | 23            | 23                         | 100                               | -              |
| 7.  | Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)  | 10            | 10            | 10                         | 100                               | -              |
| 8.  | Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)  | 5             | 5             | 5                          | 100                               | -              |
| 9.  | Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)  | 5             | 5             | 5                          | 100                               | -              |
| 10. | Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)                     | 8             | 8             | 8                          | 100                               | -              |
| 11. | Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)                      | 5             | 5             | 5                          | 100                               | -              |
| 12. | Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku  | 4             | 4             | 4                          | 100                               | -              |

| No  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target        |               | Realisasi<br>TW IV<br>2024 | Persentase terhadap<br>target (%) |                |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
|     |   | Tahun<br>2024 | TW IV<br>2024 |                            | Tahun 2024                        | TW III<br>2024 |
|     | 1000 Ton yang dibangun (Unit)   |               |               |                            |                                   |                |
| 13. | Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)   | 287           | 293           | 293                        | 102,09                            | -              |
| 14. | Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)   | 1.100         | 1.100         | 1.100                      | 100                               | -              |
| 15. | Nilai PNPB di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)  | 2,06          | 2,06          | 2,06                       | 100                               | -              |
| 16. | Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)   | 87            | 87            | 88,06                      | 101,22                            | -              |
| 17. | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)   | 84            | 84            | 84,45                      | 100,54                            | -              |
| 18. | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)  | 100           | 100           | 100                        | 100                               | -              |
| 19. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%) | 80            | 80            | 100                        | 120                               | -              |
| 20. | Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)                          | 94            | 94            | 133,33                     | 120                               | -              |
| 21. | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)                                     | 80            | 80            | 98,24                      | 98,24                             | -              |
| 22. | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)   | 95            | 95            | 97,73                      | 97,73                             | -              |

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

### 3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

#### Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2024 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola. Dalam matrik renaksi, pagu IKK ini sebesar Rp50.000.000,-. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Koridor Kendari – Surabaya/ Jakarta;
- 2) Koridor Makassar – Surabaya/ Jakarta;
- 3) Koridor Bitung – Surabaya/ Jakarta;
- 4) Koridor Ambon – Surabaya/ Jakarta;
- 5) Koridor Mimika – Surabaya /Jakarta.

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

| IKK No | Indikator Kinerja                             | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 1      | Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan | 2024* | 5      | 5         | 100                                  | 5            | 5                   | 100   |
|        |   | 2023  | 5      | 5         | 100                                  |              |                     |   |
|        |   | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2021  | 5      | 5         | 100                                  |              |                     |   |
|        |   | 2020  | 1      | 1         | 100                                  |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa Capaian indikator Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan pada tahun 2024 adalah sebesar 5 Koridor , atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 5 Koridor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 5 Koridor atau setara 100% dari target 5 Koridor , maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 5 Koridor atau setara 100% dari target 5 Koridor, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 1 Koridor atau setara 100% dari target 1 Koridor, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 80%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 5 Koridor setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 5 Koridor..

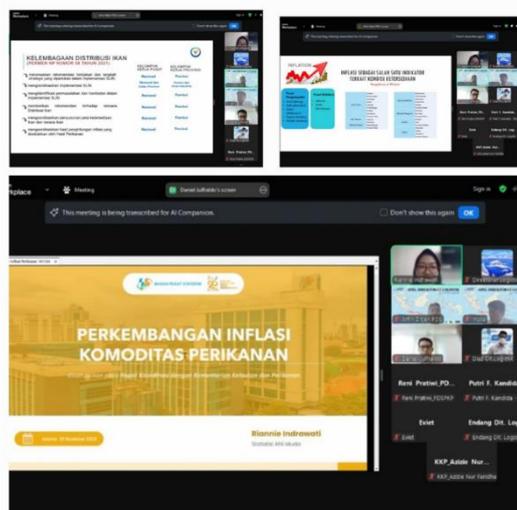
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Rapat Pembahasan Data Penyusunan Regulasi Public Service Obligation (PSO)

Dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan, telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 19 November 2024, kegiatan rapat fokus membahas data inflasi produk perikanan di berbagai wilayah Indonesia terutama kawasan koridor logistik yang disampaikan gambaran tren inflasi nasional bulan oktober 2024, oleh Badan Pusat Statistik rapat dipimpin oleh Timja Tata Kelola Rantai Pasok dengan Narasumber Tim Direktorat Statistik Harga Badan Pusat Statistik, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Perkembangan Inflasi Komoditas Perikanan yaitu
  - inflasi bulan ke bulan (oktober 2024 terhadap September 2024): 0,08%;
  - inflasi tahun ketahun (oktober 2024 terhadap oktober 2023): 1,71%;
  - inflasi tahun kalender (oktober 2024 terhadap desember 2023); 0,82%
- b. Perkembangan Inflasi kelompok perikanan (ikan segar dan ikan diawetkan), 2022-2024
  - Perkembangan inflasi ikan segar relatif lebih fluktuatif dibandingkan inflasi ikan diawetkan;
  - Ikan segar kembali mengalami deflasi pada bulan Oktober 2024 setelah menunjukkan peningkatan harga pada bulan Agustus dan September 2024. Sedangkan ikan diawetkan mengalami inflasi pada Oktober 2024;
  - Pada Oktober 2024, secara m-to-m, ikan segar mengalami deflasi sebesar 0,27% dengan menyumbang andil deflasi sebesar 0,0070%, sedangkan ikan diawetkan mengalami inflasi sebesar 0,15% dengan menyumbang andil sebesar 0,0005%.
- c. Potret inflasi kelompok perikanan (ikan segar) 2024 menurut wilayah secara spasial
  - Pada Januari - Oktober 2024, dari 38 Provinsi, 26 Provinsi mengalami inflasi sedangkan 12 Provinsi lainnya mengalami deflasi;
  - Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 26,76%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 8,60%
- d. Potret inflasi kelompok perikanan (ikan awetan) 2024 menurut wilayah secara spasial.
  - Pada Januari - Oktober 2024, dari 38 Provinsi, 23 Provinsi mengalami inflasi sedangkan 15 Provinsi lainnya mengalami deflasi;
  - Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku, yaitu sebesar 46,11%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Aceh sebesar 8,05%.

## Dokumentasi



Gambar 1. Kegiatan Rapat Pembahasan Data Penyusunan Regulasi Public Service Obligation (PSO)

## 2. Pembahasan Pembobotan IKLI moda Transportasi Darat dan Laut

Dalam implementasi SLIN diperlukan suatu instrumen untuk pengukuran kinerja logistik ikan, berdasarkan hal tersebut Direktorat Logistik telah menyusun Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) dengan tujuan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan dan melakukan evaluasi kinerja terhadap sistem logistik ikan untuk mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dalam implementasi SLIN di koridor logistik.

Penghitungan IKLI dilakukan pada 7 koridor sebagai berikut :

- a. Kendari–Surabaya/Jakarta
- b. Bitung–Surabaya/Jakarta
- c. Mimika–Surabaya/Jakarta
- d. Kupang–Surabaya/Jakarta
- e. Makassar–Surabaya/Jakarta
- f. Ambon–Surabaya/Jakarta, dan
- g. Biak-Surabaya/Jakarta

Pola integrasi penghitungan IKLI moda darat dan laut dirumuskan dalam pembobotan berdasarkan volume transaksi kedua moda tersebut. Penentuan pembobotan diperoleh dari preferensi expert judgement melalui perbandingan berpasangan (*pair comparison*) dan *principle component analysis* (PCA) berdasarkan

data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan penghitungan pembobotan diperoleh bobot IKLI moda darat sebesar 30% dan IKLI moda laut sebesar 70%.

#### Dokumentasi



Gambar 2. Pembahasan Pembobotan IKLI moda Transportasi Darat dan Laut

### 3. Pembahasan Hasil Survey Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melakukan pembahasan hasil pelaksanaan survey IKLI triwulan 4 dan sebagai bahan pembahasan perbaikan pelaksanaan Survey IKLI tahun 2024.

Ruang Lingkup IKLI Koridor meliputi dua titik atau lebih yang terhubung dalam jejaring dalam pola asal ikan (O/origin) dan tujuan akhir dari distribusi ikan (D/destination). Pengukuran hanya dilakukan terhadap pengiriman ikan melalui jalur laut. Pelaksanaan survey dilakukan melalui wawancara responden oleh enumerator menggunakan kuesioner, penghitungan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dan penetapan hasil penghitungan melalui rapat pleno (anggota Tim IKLI).

Koridor yang dibahas atas hasil survey sebagai berikut :

- Koridor Ambon-Jakarta/Surabaya disampaikan oleh bapak Randy
- Koridor Sulawesi selatan-Jakarta/Surabaya disampaikan oleh ibu Ratna

Analisis jaringan dan rantai pasok serta identifikasi jaringan distribusi yang masih perlu ditingkatkan menggunakan digitalisasi yang lebih canggih baik dari traceability maupun sarana dan prasarana UPI.

Pencapaian efisiensi operasional, pelayanan, pelanggan yang lebih baik, pengurangan biaya, dan pengendalian persediaan bahan baku ikan kelancaran proses bisnis pelaku dan penyedia jasa logistic.

## Dokumentasi



Gambar 3. Pembahasan Hasil Survey Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

### 3.2.2. Sasaran Kegiatan “Terimplementasinya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Ketertelusuran dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan

distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan. Target indikator tahun 2024 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan. Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir, dan target tercapai pada Triwulan IV.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 2      | Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan | 2024* | 1      | 1         | 100                                  | 1            | 1                   | 100   |
|        |  | 2023  | 1      | 1         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 4. diatas, menunjukkan bahwa apaian indikator Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan pada tahun 2024 adalah sebesar 1 Unit, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 1 Unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 1 Unit atau setara 100% dari target 1 Unit, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sama.

Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu sebesar Rp 2.131.405.000,-. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 2.127.735.260,- atau sebesar 99,83% dari pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IIII untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

## 1. Regional Training on Traceability and Effective Management Tools for Fish and Fishery Products in Southeast Asia

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024, Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) Catch Documentation Scheme (CDS) oleh Todd Dubois, Fisheries Monitoring and Compliance (FMC) Manager.

- a. CDS bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan Antartika melalui pelacakan ikan toothfish dari pendaratan hingga perdagangan, dan memastikan praktik penangkapan ikan yang legal dan berkelanjutan;
- b. Skema CDS melibatkan langkah kepatuhan, termasuk sistem pemantauan kapal, inspeksi pelabuhan, dan dokumentasi elektronik untuk memerangi IUU Fishing;
- c. Spesies utama yang dikelola di bawah CDS adalah ikan toothfish Patagonia, ikan toothfish Antartika, ikan mackerel, dan krill Antartika
- d. Skema CDS pada CCAMLR mencakup kerja sama dengan pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketertelusuran dan pengelolaan produk perikanan yang efektif;

Introduction of eco-labeling and lessons learned by Marine Eco-Label Japan Council oleh Masaya Katoh, Secretary General & Technical Manager.

- a. Marine Eco-Label Japan (MEL) adalah program sertifikasi perikanan yang dikembangkan di Jepang dan disesuaikan dengan beragam perikanan, lingkungan, ekosistem, dan industri di Jepang;
- b. MEL adalah salah satu skema sertifikasi produk perikanan yang diakui Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI);
- c. MEL mematuhi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan konservasi lingkungan dan ekosistem;
- d. MEL certification program menyesuaikan dengan \_Japan Responsible \_Fisheries Management (RFM) program;
- e. MEL melakukan sertifikasi berdasarkan assessment terhadap manajemen perikanan, target stok yang berkelanjutan, konservasi, dan ekosistem. Sertifikasi telah dilakukan untuk 18 spesies perikanan tangkap (Chum Salmon, Skipjack, Albacore, Yellowfin Tuna, Bigeye Tuna, Japanese Anchovy, Juvenile Anchovy, Chub Mackerel, Japanese Horse Mackerel, Yellowtail, Atka Mackerel, Herring, Sea Bass, Red Snow Crab, Surf Clam, Freshwater Clam, Japanese Glass Shrimp);

Hasil Diskusi :

- a. Hasil sertifikasi MEL selama 15 tahun terakhir menunjukkan perubahan aktivitas perikanan kearah keberlanjutan dan ramah lingkungan, ditandai dengan turunnya jumlah penggunaan alat

- tangkap aktif dan meningkatnya jumlah penggunaan alat tangkap pasif;
- b. Jumlah perikanan yang disertifikasi oleh MEL lebih banyak dibandingkan sertifikasi MSC. Hal ini disebabkan karena MEL lebih menguntungkan bagi nelayan Jepang daripada MSC (biaya, bahasa, dan kemudahan sertifikasi);
  - c. MEL merespon isu hak asasi manusia termasuk untuk pekerja magang dan pekerja asing. MEL sedang melakukan langkah-langkah untuk merevisi Japan Fisheries Management Standard ;

### Dokumentasi



Gambar 4. Regional Training on Traceability and Effective Management Tools for Fish and Fishery Products in Southeast Asia

## 2. Pengenalan Basic Mix Advance Standar Ketertelusuran Global GS1 untuk mendukung Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

- a. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024, dibuka oleh CEO GS1 Indonesia dan Ketua Tim Kerja Pemantauan Direktorat Logistik, serta dihadiri peserta perwakilan lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Kegiatan bertujuan untuk harmonisasi konsep ketertelusuran STELINA dan GS1 untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas pada proses ketertelusuran hasil perikanan;
- c. GS1 memiliki Global Trade Item Number (GTIN) untuk mengidentifikasi ketertelusuran produk di tingkat retail, berupa 13-digit angka disertai dengan barcode pada kemasan produk. GTIN dapat memuat informasi berupa harga, atribut produk, atau informasi lain yang dibagikan dengan mitra dagang melalui

- Jaringan Sinkronisasi Data Global (GDSN) GS1, atau digunakan dalam transaksi EDI (Electronic Data Interchange) dan GS1 XML antara mitra dagang (misal: perintah pembelian, faktur, pemberitahuan pengiriman lanjutan, dll.);
- d. Pada tingkat pengemasan yang lebih tinggi (contoh: palet) dapat digunakan barcode GS-128 untuk transfer informasi yang lebih kompleks pada pengiriman, penerimaan, dan saat pemindaian di gudang. GS-128 memiliki 48 karakter informasi termasuk batch/lot, serial number, tanggal kadaluarsa, atau negara asal. Pemindaian informasi terperinci ini mendukung efisiensi rantai pasokan dan keterlacakan produk, dan membantu penjual menjadi lebih siap menghadapi product recall;
  - e. Diskusi:  
Konsep ketertelusuran GS1 diterapkan pada pemanenan, pengolahan, pengiriman (shipping), distribusi, penerimaan, dan penjualan. Informasi ketertelusuran diperoleh melalui pemindaian \_Global Location Number (GLN) untuk asal barang dan tujuan barang; GTIN untuk jenis barang; tanggal; jenis rantai pasok; Serial Shipping Container Code (SSCC) untuk jenis barang saat pengiriman; Global Individual Asset Identifier (GIAI) untuk barang pada pendistribusian.

#### Dokumentasi



Gambar 5. Pengenalan Basic Mix Advance Standar Ketertelusuran Global GS1 untuk mendukung Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

### **3. Pertemuan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi STELINA.**

- a. Kegiatan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 bertempat di Ruang Karaginan, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan

- dihadiri Tim Pelaksana pekerjaan PT. Dua Empat Tujuh, Perwakilan Tim Kerja Data Setditjen PDSPKP, dan Pelaksana Tim Kerja Penyimpanan dan Pemantauan;
- b. Tujuan rapat adalah assesment aplikasi STELINA yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, proses bisnis stelina dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Hasil rapat :
    - Proses bisnis stelina dimulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran;
    - Pekerjaan stelina meliputi pengembangan aplikasi berbasis web dan mobil;
    - Pelaku usaha yang diwajibkan mengimplementasikan stelina adalah penangkap ikan, pembudidaya ikan pelaku usaha distribusi, pengolah ikan dan pemasar ikan;
    - Perbedaan perlakuan pelaku usaha dalam menginput data ketertelusuran dalam stelina, berdasarkan variabel data yang diinput maupun periode input, terutama pelaku usaha pembudidaya ikan skala mikro -kecil, sedangkan pelaku usaha distribusi, pengolah dan pemasar di berlakukan untuk penyederhaan untuk skala mikro;
  - d. Pengembangan aplikasi harus dapat mengakomodir perubahan PermenKP 29 tahun 2021 tentang STELINA seperti yang tersebut pada poin c;
  - e. Dalam proses bisnis stelina, data penangkap ikan di peroleh melalui interkoneksi dengan e-PIT, sehingga pelaku usaha tidak perlu melakukan registrasi;
  - f. Aplikasi STELINA diharapkan dapat disediakan menu untuk approval dalam menu regustrasi dan admin dapat melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan hal tersebut, perlu disiapkan proses bisnis verifikasi dan validasi antara lain rambu-rambu, mekanisme validasi, dan aktor yang melaksanakan verifikasi;
  - g. Terkait dengan master data pelaku usaha jasa layanan logistik, perlu dilakukan koordinasi dengan Tim Kerja Pemetaan untuk mengetahui datanya yg akan diinput ke Stelina untuk dipilih oleh pelaku usaha;
  - h. Perlu dijadwalkan pertemuan dengan Ditjen Perikanan Tangkap terkait dengan interkoneksi dengan e-PIT atau aplikasi lain yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;
  - i. Perlu dipastikan API Stelina yg akan dibangun PT 247 adalah yg mudah berkomunikasi dan berbagi data dengan aplikasi lain dan melakukan interoperabilitas;
  - j. Stelina akan dikembangkan untuk dapat terkoneksi dengan INSW terutama untuk produk ekspor maupun impor;

- k. Pengembang akan diberikan akses secara luas terhadap aplikasi STELINA yang lama untuk dapat dipelajari dan dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- l. Perlu dilakukan mapping master data Kode HS (Harmonized System) dengan master data produk perikanan. Untuk mempermudah ketertelusuran pada rantai pasok pemasaran ekspor dan impor;
- m. Perlu dilakukan identifikasi terhadap jenis ikan yang umum diperdagangkan pada master jenis ikan dikarenakan banyaknya spesies dalam satu jenis ikan, untuk mengeliminasi perbedaan pemilihan spesies ikan untuk jenis ikan yang sama;
- n. Perlu menyamakan istilah – istilah dalam sistem informasi sehingga terhadap kesamaan dalam menginterpretasikan istilah -istilah yang digunakan dalam ruang lingkup pekerjaan, seperti beranda, homepage, dashboard, dan istilah – istilah lainnya;

#### Dokumentasi



Gambar 6. Pertemuan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi STELINA.

#### 4. Koordinasi Penyusunan Rancangan Interkoneksi/Interoperabilitas STELINA.

- a. Kegiatan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 dipimpin oleh Katimja Pemantauan, dan dihadiri oleh Katimja Data dan Pelayanan Publik Setditjen PDSPKP, Koordinator Hukum Dit. Logistik, perwakilan SLL, DET, perwakilan PUSDATIN KKP, perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik, perwakilan Setditjen PDSPKP, Penanggungjawab dan Pelaksana Timja Pemantauan Dit. Logistik.

- b. Tujuan kegiatan:
  - a. Pengenalan TraceTales untuk diimplementasikan di pengembangan aplikasi STELINA
  - b. Mengidentifikasi hambatan interkoneksi STELINA vs Tracetales
- c. Arahan Direktur Logistik:  
STELINA pengembangan menggunakan blockchain untuk transparansi informasi di seluruh stakeholder.
- d. Pengantar Katimja Pemantauan:

Integrasi STELINA dan TraceTales memberikan alternatif solusi bagi Perusahaan pengolahan ikan untuk menggunakan STELINA dengan mudah dan cepat, menghindari entri data berulang, dan membantu pengiriman data ke STELINA lebih cepat

- e. Pemaparan Interkoneksi STELINA TraceTales:

STELINA telah diinterkoneksi dengan TraceTales dan dimanfaatkan oleh 2 UPI tuna. Pengembangan STELINA untuk dimanfaatkan lebih banyak UPI perlu menjawab:

- c. Penghapusan data pengeluaran produk gudang dengan status berhasil, namun tidak mengembalikan kuantitas produk seperti semula
- d. Manajemen data gudang yang lebih jelas, agar terdapat pilihan untuk menampilkan log gudang dan data gudang yang masih tersedia
- e. Summary total stok dan total hasil pencatatan data dari API
- f. Gagal sinkronisasi data hasil produksi karena kesalahan kalkulasi kuantitas pencatatan produksi (seharusnya membaca data gudang produksi, namun membaca data gudang bahan baku)

Hasil Diskusi:

- g. TraceTales melakukan pemisahan batch berdasarkan supplier, kapal, dan jenis ikan. Batch dimanfaatkan menjadi kode traceability dengan menambahkan jenis bahan baku (loin atau gilled gutted). Kode traceability digunakan pada semua tahapan produksi dari penerimaan hingga pengemasan
- h. TraceTales dikembangkan untuk mengakomodir ketertelusuran internal, dan dapat menyediakan data landing site yang akan diisi oleh pembeli, namun tidak dapat mengakomodir waktu pendaratan dan penangkapan ikan
- i. TraceTales hanya mencatat data ikan, tidak mencatat data bahan tambahan pada proses produksi
- j. DET perlu melakukan assessment data existing di STELINA sebelum melakukan enhancement. DET perlu

mengetahui API yang sudah dibangun dan panduan testing API yang sudah dibuat untuk memperoleh kondisi ideal dan case by case

### Dokumentasi



Gambar 7. Koordinasi Penyusunan Rancangan Interkoneksi/Interoperabilitas STELINA.

## 5. Pemantauan implementasi ketertelusuran hasil perikanan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Oktober 2024 untuk melakukan penerapan ketelusuran

### a. PT. Sabindo Raya Gemilang

- Pencatatan menggunakan microsoft excel;
- Penerapan ketertelusuran berstandar internasional telah dilakukan untuk ekspor udang ke Belanda dan Inggris, kode ketertelusuran pada kemasan disediakan oleh buyer berdasarkan data UPI;
- Penerapan ketertelusuran pada ekspor udang dan bandeng ke China menggunakan standar ketertelusuran yang disepakati dengan buyer (nama produk, berat, negara asal, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, area penangkapan, lot number, negara tujuan, nama UPI, China Registration Number);

### b. PT. Mustika Mina Aurora

- Pencatatan menggunakan microsoft excel;
- Penerapan ketertelusuran produk udang ekspor ke Jepang tidak menggunakan standar internasional, namun menggunakan sistem julian date yang disepakati dengan buyer (tanggal penerimaan bahan baku, waktu

- penerimaan bahan baku, tanggal produksi, kode asal bahan baku, jenis produk);
- Penerapan ketertelusuran untuk pengiriman dalam negeri (grup perusahaan) menggunakan kode sederhana;
- c. PT. Tarakan Fisherindo Sipatuo
- Penerapan ketertelusuran dilakukan sejak tally udang dan bandeng menggunakan microsoft excel saat pembelian untuk produk ekspor untuk memperoleh informasi nama petambak, nama nelayan/kapal, berat ikan, jenis ikan;
  - Perusahaan menerapkan ketertelusuran berstandar internasional;
  - Menggunakan accurate desktop;
- d. Penerapan ketertelusuran Rumput Laut (RL) di PT. Bunga Laut Samudra Jaya dan PT. Adi Putra Laut
- Gambaran umum: Spesies RL dibudidayakan di Kota Tarakan adalah *Eucheuma cottonii*, produksi rata-rata per bulan 4000 ton, pemanenan sepanjang tahun, pembelian langsung ke petani, pengiriman RL kering ke Surabaya dan Makassar;
  - Rantai pasok dan informasi ketertelusuran;
  - Pembudidaya: nama pembudidaya, jenis spesies, lokasi budi daya, berat RL;
  - Unit Penanganan Rumput Laut (UPRL): nama unit penanganan, jenis spesies, berat RL (kadar air 35% - 42%), hasil uji kadar air;
  - Pemasar: nama UPRL, lokasi, jenis hasil perikanan, jumlah koli/nomor kontainer, berat (kg), nama penerima, pelabuhan tujuan;

#### Dokumentasi



Gambar 8. Pemantauan implementasi ketertelusuran hasil perikanan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara

## 6. Perencanaan Interkoneksi Aplikasi STELINA

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024, bertempat di RR Akses Pasar, GMB III Lt. 15, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dihadiri oleh Koordinator Harmonisasi Perijinan, Dit Perizinan dan Kenelayanan, Tim PT 247 dan Lingkup Timja Pemantauan. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut :

- a. Registrasi diarahkan menggunakan NIB bukan NIK;
- b. Data yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi Stelina mengikuti ketersediaan data di e-PIT antara lain : Transaksi pendaratan kapal, Transaksi penjualan (keterangan alih stock ikan), Qouta kapal dan realisasi, Log book include WPP, Master Data (referensi) (Alat tangkap, Ikan, Kapal, Pelaku usaha (Suplier / Pembeli );
- c. Informasi lainnya untuk mendukung Jaminan Mutu dan Keamanan Produk perikanan, diantaranya : Lokasi Penangkapan dan Penanganan Ikan di atas kapal;
- d. Data dari e-PIT ke Stelina diantaranya pembeli dengan pemasar dan jenis ikan untuk mendapatkan data pembelian ikan hasil pendaratan;
- e. Untuk API akan disusun berdasarkan sample data yang dikirimkan dalam format Json.

### Dokumentasi



Gambar 9. Pemantauan implementasi ketertelusuran hasil perikanan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara

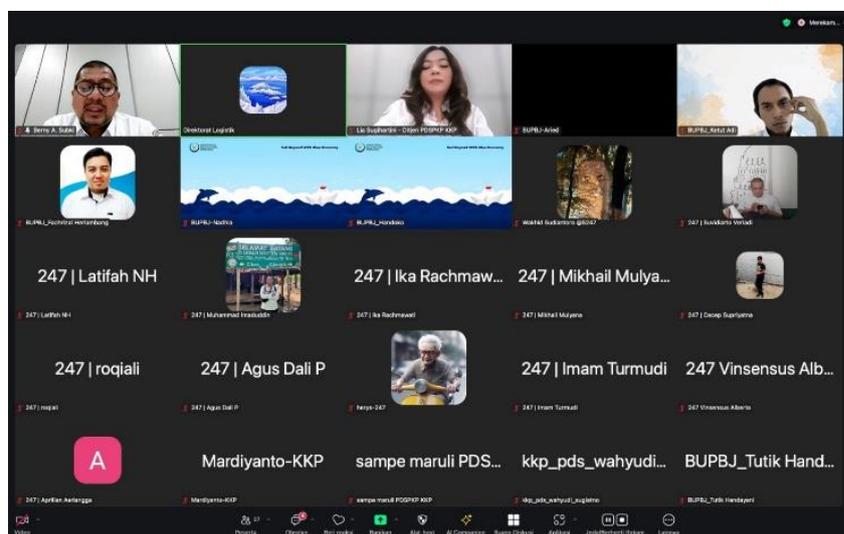
## 8. Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 adapun hasil dari pertemuan adalah sebagai berikut :

- a. Mencantumkan unit kerja yang akan melaksanakan interkoneksi pada kegiatan rantai pasok pra produksi, baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan;
- b. Menghilangkan harga jual ikan pada interkoneksi data untuk kegiatan rantai pasok produksi penangkapan ikan;
- c. Melakukan reformulasi data sejarah pengolahan yang semula terdiri 3 (tiga) butir yang terdiri dari jenis penanganan, pengolahan dan tahapan penanganan dan/atau pengolahan menjadi 2 (dua) butir yaitu jenis penanganan dan/atau pengolahan, dan tahapan penanganan dan/atau pengolahan;
- d. Penambahan pasal yang berisi penginputan dan/atau interkoneksi data, Ketertelusuran Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. Perubahan redaksional ayat terkait dengan penandaan/logo STELINA yang semula Penandaan/logo STELINA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi data dan informasi asal/sumber produk menjadi Selain logo STELLINA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kemasan atau dokumen penjualan dicantumkan kode batang (barcode) data dan informasi asal/sumber produk;
- f. Penambahan kata validasi dibelakang verifikasi dan kelengkapan dibelakang terhadap, sehingga rumusannya menjadi Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan input data yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal – pasal terkait dengan verifikasi dan validasi juga disesuaikan redaksionalnya;
- g. Terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pembudidayaan ikan ditambahkan pasal Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditemukan kelimpahan atau kekurangan Hasil Perikanan di suatu wilayah, Direktur Jenderal dan/atau direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan upaya pemerataan distribusi ikan;
- h. Melakukan reformulasi pasal terkait dengan pengawasan yang semula berbunyi Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diberikan akses terhadap aplikasi Stelina menjadi Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan akses terhadap aplikasi Stelina kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- i. Perubahan redaksional terhadap pasal pembinaan semula Pembudi daya Ikan skala mikro dan kecil yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penyadartahuan melalui: Sosialisasi; dan/atau bimbingan teknis menjadi Dalam upaya mendukung kepatuhan penginputan data bagi Pembudi daya Ikan skala mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya melakukan penyadartahuan melalui: a. osialisasi; dan/atau bimbingan teknis dan Menambahkan keterangan atau arti bagian logo STELINA untuk ekor dan mata ikan dalam lampiran peraturan.

### Dokumentasi



Gambar 10. Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional

## 9. Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Aplikasi STELINA dalam rangka interoperabilitas dengan aplikasi Tracetales

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 secara daring. Tracetales adalah aplikasi ketertelusuran yang dikembangkan oleh PT. Sahabat Laut Lestari yang telah terkoneksi dengan aplikasi STELINA. Pengguna aplikasi Tracetales didominasi oleh UPI pengolahan Tuna, walaupun dimungkinkan jenis ikan lain menggunakan aplikasi Tracetales. Tujuan dari rapat adalah untuk mengetahui proses bisnis interkoneksi aplikasi tracetales dengan STELINA dan kendala dalam interkoneksi, serta masukan terhadap pengembangan aplikasi.

Rapat dihadiri oleh perwakilan PT. Dua Empat Tujuh sebagai pelaksana pekerjaan, Pengembang Aplikasi Tracetales, dan Ditjen PDSPKP. Aplikasi Tracetales hanya menyediakan atau mengelola data mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk dikeluarkan. Untuk asal bahan baku yang berasal dari perikanan tangkap (fishing ground, lokasi pendaratan, kapal, serta data lainnya) disampaikan dalam bentuk dokumen terpisah. Interkoneksi tracetales dilakukan setelah pelaku usaha atau UPI melakukan registrasi dalam aplikasi STELINA, setelah itu data – data UPI akan ditautkan dalam aplikasi aplikasi STELINA. Terkait dengan asal bahan baku perikanan tangkap, Ditjen PDSPKP menyampaikan bahwa STELINA telah terkoneksi dengan e-PIT dan data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai input penerimaan bahan baku (Mitra Pembelian);

Tracetales menyampaikan beberapa kendala dalam interoperabilitas dengan STELINA antara lain:

- a. Tahapan proses produksi pada akun pengolah tidak mereferensi bahan baku yang diterima tetapi pada gudang bahan baku, sedangkan tidak semua UPI yang menggunakan aplikasi tracetales memiliki menu pengelolaan gudang;
- b. Pada menu gudang bahan baku dan produk tidak diberikan fasilitas untuk menghapus atau mendelete pembatalan penggunaan bahan baku maupun pengeluaran produk;

### Dokumentasi



Gambar 11. Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Aplikasi STELINA dalam rangka interoperabilitas dengan aplikasi Tracetales

### 3.2.3. Sasaran Kegiatan “Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, pemetaan, dan pemantauan keter sediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2024 adalah 4 (empat) data. Indikator ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 3      | Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan | 2024* | 4      | 4         | 100                                  | 4            | 4                   | 100   |
|        |  | 2023  | 2      | 2         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa Capaian indikator Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2024 adalah sebesar 4 Data, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 4 Data. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 2 Data atau setara 100% dari target 2 Data, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 50%.Realisasi pada tahun 2024 sebesar 1 Unit setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 1 Unit.

Adapun capaian data dan informasi logistic hasil kelautan dan perikanan adalah :

- 1) Pemetaan Logistik Hasil Perikanan
- 2) Penyusunan Rencana Pasokan dan Kebutuhan Ikan
- 3) Perhitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan
- 4) Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga Ikan pada Hari Besar Keagamaan Nasional

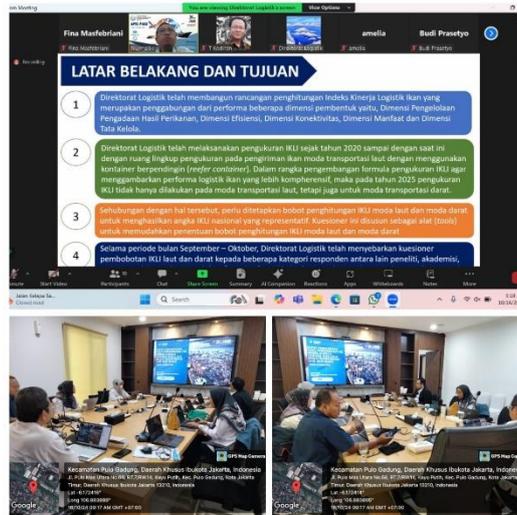
Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp318.000.000,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 680.874.546,- atau sebesar 99,83% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### **1. Pembahasan Hasil Pembobotan Tim Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)**

Tujuan rapat yaitu untuk melakukan pembahasan Hasil Pembobotan Tim Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI). Adapun hal – hal yang dapat disimpulkan antara lain :

- a. Integrasi IKLI Moda Angkutan Darat Dan Angkutan Laut
- b. Pola integrasi : Pembobotan berdasarkan volume transaksi moda angkutan darat dan laut
- c. Preferensi expert judgement dengan perbandingan berpasangan (pair comparison)
- d. Principle component analysis (pca) berdasarkan data
- e. Perbandingan Pasangan pendekatan berdasarkan pendapat para ahli dengan pemberian skor berdasarkan prinsip saat Ahli mencakup pada background yang beragam terdiri akademisi, pelaku usaha logistik, penyedia jasa logistik, pengambil kebijakan terkait logistik pusat dan daerah.
- f. Analisis skoring dilakukan dengan penilaian perbandingan berpasangan dengan pilihan moda transportasi laut dan moda transportasi darat. Pemberian skor dengan skala 1,3,5,7,9. Untuk mengukur IKLI moda angkutan transportasi darat menggunakan pembobotan perbandingan pasangan antara IKLI darat sebesar 30,65% dan IKLI Laut 69,35%.

## Dokumentasi



Gambar 12. Pembahasan Hasil Pembobotan Tim Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

## 2. Pemenuhan data dukung usulan penyempurnaan KBLI 2020

Dalam rangka tindak lanjut hasil validasi nasional data bidang PDSPKP periode Semester I Tahun 2024 dan pengumpulan data dukung usulan KBLI lingkup Ditjen PDSPKP telah dilakukan kunjungan lapang ke Kab. Sukabumi pada tanggal 7-9 Oktober 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Gudang beku CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar  
Beralamat di Komplek Perikanan PPN Palabuhan Ratu. Jl. Dermaga II RT. 003/019, Kab. Sukabumi, CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar memiliki 1 unit CS dengan kapasitas 65 ton dan 1 unit ABF dengan kapasitas 7 ton. Komoditas utama yang terdapat di gudang beku adalah ikan layur dengan jumlah stok per tanggal 8 Oktober 2024 adalah sebesar 5 ton dengan harga Rp. 40.000/Kg. Pasokan berasal dari PPN Palabuhan Ratu dan hanya melakukan kegiatan ekspor layur ke negara China melalui Muara Baru. Memiliki 1 unit termoking berkapasitas 7-8 ton untuk pengiriman ikan ke Muara Baru. Apabila pasokan melimpah, pihak perusahaan biasanya menyewa mobil termoking kepada H. Unang/ PT. Uri Jaya Bahari untuk membawa ikan ke Muara Baru. Frekuensi pengiriman tergantung pasokan ikan, saat sedang musim, pengiriman bisa dilakukan 1-2 hari sekali namun pada saat tidak musim ikan frekuensi pengiriman bisa 1 kali per minggu, atau bahkan 1 kali per bulan, sampai batas pengiriman tercapai (7-8 ton) Beberapa kode KBLI yang dimiliki oleh CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar antara lain: 03131 (jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut), 10213 (industri

pembekuan ikan), 10217 (industri pendinginan/pengesan ikan), 10293 (industri pembekuan biota air lainnya dan 46206 (perdagangan besar hasil perikanan);

- b. Gudang Beku PT. Bahari Pratama Mandiri  
Beralamat di Jl. Pelita Kampung Cipatuguran, Kel. Palabuhan Ratu, Kab. Sukabumi, PT. Bahari Pratama Mandiri memiliki 2 unit CS berkapasitas masing-masing 60 ton dan 2 unit ABF berkapasitas masing-masing 2 dan 4 ton. Komoditas utama yang terdapat di gudang beku adalah ikan layur dengan jumlah stok per tanggal 8 Oktober 2024 adalah sebesar 10 ton dengan harga Rp. 40.000/Kg. Pasokan berasal dari PPN Palabuhan Ratu dan hanya melakukan kegiatan ekspor layur ke negara China melalui Muara Baru. Tidak memiliki kendaraan berpendingin untuk mengirimkan ikan, biasanya pihak perusahaan menyewa mobil berpendingin ke PT. Kiat Ananda yang berasal dari Jakarta untuk membawa ikan ke Muara Baru. Volume pengiriman ikan biasanya sebanyak 25 ton menggunakan 2 mobil berpendingin dengan biaya pengiriman per mobil sebesar tujuh juta rupiah;
  
- c. Gudang Beku PT. Uri Jaya Bahari  
PT. Uri Jaya Bahari memiliki dua gudang beku yang berada di lokasi berbeda yaitu di Kampung Rawa Kalong RT 001/032 dan Jl. Pangsor, Palabuhan Ratu, Kab. Sukabumi dengan kapasitas masing-masing 50 ton. Komoditas utama yang terdapat di gudang beku adalah ikan layur dengan jumlah stok per tanggal 8 Oktober 2024 adalah sebesar 10 ton dengan harga Rp. 40.000/Kg. Pasokan berasal dari PPN Palabuhan Ratu dan daerah lainnya di Pulau Jawa seperti Surabaya, Tegal dan Muara Baru. Tujuan distribusi ikan sebagian besar ke daerah Muara Baru dengan menggunakan mobil berpendingin. PT. Uri Jaya Bahari memiliki 4 unit kendaraan berpendingin dengan kapasitas 5-6 ton sebanyak 3 unit dan 1 unit berkapasitas 8 ton. PT. Uri Jaya Bahari juga menyewakan mobil berpendingin kepada pelaku usaha lain dengan biaya sewa 2,2 juta per mobil untuk kapasitas 6 ton.
  
- e. Gudang beku Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru  
Beralamat di Jl. Palangpang, Ciwaru, Kab. Sukabumi, Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru memiliki 1 unit CS berkapasitas 20 ton hasil dari bantuan pemerintah tahun 2020. Kondisi CS masih beroperasi dengan stok pada saat kedatangan adalah sebesar 18 ton dengan komoditas utama ikan tongkol, layang, deles dan cumi-cumi. Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru telah rutin mengisi data WMS

setiap bulan yang dikelola oleh Tim Kerja Penyimpanan. Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru mengusulkan penambahan kapasitas CS karena pada saat musim ikan sekitar Bulan September-Desember banyak ikan yang tidak tertampung dan akhirnya di kubur

### Dokumentasi



Gambar 13. Pemenuhan data dukung usulan penyempurnaan KBLI 2020

### 3. Verifikasi Pelaku Usaha Cold Storage (CS) di Kabupaten Bekasi

Pelaksana yang bertugas menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kunjungan ke perusahaan adalah untuk melakukan verifikasi pelaku usaha cold storage yang memiliki ketidaksesuaian kapasitas dengan hasil validasi nasional (VALNAS) Satu Data KKP Semester I.

#### a. PT. Masuya Graha Trikencana (MGT)

PT. MGT adalah perusahaan importir dan distributor makanan dan minuman di Indonesia yang mensuplai produknya pada retail dan industri jasa makanan. Produk yang dipasarkan antara lain berupa makanan laut, daging, dairy (susu), dan bahan baku makanan pokok. Perusahaan telah mengantongi sertifikat yang berstandar internasional yaitu ISO 22000-2018 sebagai standar keamanan pangan untuk bisnis rantai makanan global. Khusus bisnis produk berbasis makanan laut, PT. MGT mengimpor seluruhnya dari Jepang dalam kondisi segar dan beku. Pada tahun 2024, perusahaan mengajukan permohonan impor ke KKP sebanyak 186 jenis ikan. Beberapa jenis ikan tersebut antara lain salmon, trout, rock fish, yellow tail fish, oyster, tuna, raw shrimp, amberjack. PT. MGT telah merealisasikan seluruh

kuota impor yang diperoleh pada tahun 2024, dan saat ini stok di cold storage sebesar 3.082, 83 kg. Perusahaan memiliki cold storage dan chiller masing-masing berkapasitas 150 ton untuk menyimpan produk perikanan. Tujuan distribusi adalah memenuhi kebutuhan restoran yang berada di sekitar wilayah Jabodetabek;

b. PT. Ichiya Indonesia

Perusahaan ini merupakan sister company PT. MGT yang bergerak sebagai penyedia makanan dan minuman di Indonesia. PT. Ichiya Indonesia saat ini sedang vacuum, namun secara perizinan usaha masih dalam kondisi aktif. Perusahaan juga baru melakukan perpanjangan SKP. Untuk bisnis produk perikanan, perusahaan biasanya melakukan impor dari Jepang, namun sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak mengajukan kuota impor ke KKP. PT. Ichiya Indonesia biasanya menyimpan produk perikanan dengan menyewa cold storage pada PT. Victory (perusahaan ritel) dengan kapasitas sebesar 150 ton. Saat ini PT. Victory Retailindo Logistic linc belum masuk ke database cold storage;

c. PT. Oceanica Megah Utama (OMU)

PT. OMU berdiri sejak tahun 2006 yang berkonsentrasi pada bisnis makanan laut, terutama udang segar untuk pasar lokal. Perusahaan mensuplai ikan dan seafood ke ritel modern seperti Supermarket Ranch Market dan jaringan supermarket mereka. Di samping itu, perusahaan juga melakukan impor beberapa jenis ikan yang tidak tersedia di Indonesia antara lain seperti salmon, trout, coho, chum dan sockeye, mackerel, cod dan halibut, udang vannamei dan black tiger. Perusahaan telah merealisasikan kuota impor yang diajukan ke KKP. Untuk saat ini stok ikan di cold storage sebanyak 169.501 kg;

## Dokumentasi



Gambar 14. Verifikasi Pelaku Usaha Cold Storage (CS) di Kabupaten Bekasi

### 1.2.4 Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik ikan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional perlu dilakukan pengembangan kelembagaan distribusi ikan meliputi : pembentukan kelompok kerja SLIN maupun penguatan peran Pelaku Usaha.

Kelompok Kerja SLIN terdiri dari Pusat (KKP) dan Daerah yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan melibatkan pelaku usaha. Kelompok Kerja daerah/Lembaga pengelola daerah yang difasilitasi sebanyak 5 lembaga yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan sudah ada capaian 5 lembaga di Triwulan IV.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 4      | Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok | 2024* | 5      | 5         | 100                                  | 5            | 5                   | 100   |
|        |  | 2023  | 1      | 1         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 6. diatas, menunjukkan bahwa Capaian indikator Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok pada tahun 2024 adalah sebesar 5 Lembaga, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 5 Lembaga. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 1 lembaga atau setara 100% dari target 1 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 80%.Realisasi pada tahun 2024 sebesar 5 Lembaga setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 5 Lembaga.

Adapun capaian 5 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Jawa Timur
2. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Papua
4. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Maluku
5. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina

dalam rangka penataan rantai pasok dengan pagu sebesar Rp 1.062.783.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 1.062.226.291,- atau sebesar 99,95% terhadap pagu Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

**1. Kegiatan rapat dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan, dilaksanakan koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional melalui mekanisme operator SLIN dan Public Service Obligation (PSO)**

Dilaksanakan secara daring dan luring, tgl 7 oktober 2024 kegiatan dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan, telah dilaksanakan koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional melalui mekanisme operator SLIN dan Public Service Obligation (PSO) yang dipimpin oleh Direktur Logistik dengan tenaga ahli Tim Pustral UGM, dihadiri oleh Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Biro Hukum, Sekjen KKP, Perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik, dan coordinator hukum direktorat logistic, anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik,

Kategori subsidi menurut OECD dan FAO

- a. FAO: Kategori 1 (Transfer keuangan langsung), Kategori 2 (Layanan dan transfer keuangan tidak langsung), Kategori 3 (Intervensi dengan efek jangka pendek dan jangka panjang), dan Kategori 4 (Non-intervensi).
- b. OECD: subsidi sebagian besar untuk manajemen, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, disusul infrastruktur, keuangan, dan sedikit untuk bahan bakar

**Dokumentasi**



Gambar 15. Kegiatan rapat dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan

## 2. Kegiatan dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya, dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

Dalam pertemuan yang bertajuk “Kajian Ekonomi PSO SLIN” ini membahas kajian mengenai public service obligasi (PSO) di sektor perikanan laut., telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 6 November 2024, kegiatan rapat fokus membahas koordinasi kegiatan penyusunan kajian ekonomi dalam rangka penerapan PSO

Kondisi saat ini: Potensi perikanan di Anambas sangat besar, berupa ikan tongkol dan cumi (basah dan dikeringkan). Marketnya ke Jawa dan ekspor. Estimasi kebutuhan reef cont (pengangkutan): 10 unit sekali angkut, kapal tol laut hanya mampu 7 unit (dibagi dgn Natuna) dgn frekuensi 1 kali/ Bulan. Pada musim panen ikan sering terjadi oversupply, sementara penampungan cold storage msh terbatas dari sisi kapasitas maupun distribusi/pasokan Listrik. Diperkirakan butuh minimal 2 cold storage berkapasitas 400-500 ton untuk seluruh Kab. Anambas. Fasilitas cold storage milik swasta/perorangan. Tujuan untuk menampung tangkapan para nelayan, kapasitas up 200 ton, belum dpt beroperasi full

### Dokumentasi



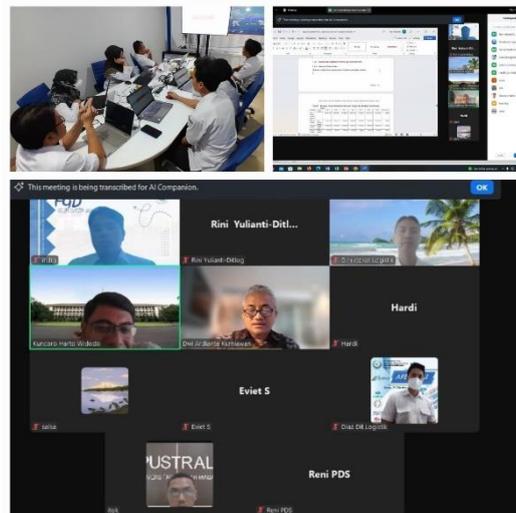
Gambar 16. Kegiatan dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya, dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

### 3. Kegiatan Rapat Pembahasan Data Penyusunan *Regulasi Public Service Obligation (PSO)*

Rapat dilaksanakan secara luring pada tanggal 12 November 2024. Rapat dipimpin Dipimpin Ketua Kelompok Kerja Tata Kelola Rantai Pasok dan dipandu Penanggung Jawab Kegiatan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, dan dihadiri Tim Pustral UGM, Koordinator Hukum Dit.Logistik dan Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok. Tujuan rapat untuk pembahasan data Penyusunan Kajian Ekonomi Dalam Rangka Penerapan PSO Logistik Ikan Dalam Negeri

Koridor untuk penyimpanan akan berfokus pada wilayah distribusi seperti di wilayah jawa. Transportasi terkait jual-beli bisa fokus sampling di wilayah pulau jawa. Terkait komoditas lain selain 5 komoditas pokok, yang masih beririsan dengan komoditas pokok yaitu ikan layang. Lele dan nila merupakan ikan budidaya, dan bisa didistribusikan secara hidup. Mungkin bisa diprioritaskan ikan laut dulu. Karena ikan budidaya jarang disimpan dalam keadaan beku, dan transportasinya biasanya sudah dekat dengan tempat penjualan

#### Dokumentasi



Gambar 17. Kegiatan Rapat Pembahasan Data Penyusunan *Regulasi Public Service Obligation (PSO)*

### 3.2.5 Sasaran Kegiatan “Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)”

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Neraca Komoditas Perikanan merupakan data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk acuan teknis, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Target indikator tahun 2024 adalah 3 (tiga) rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan sudah terdapat capaian pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

| IKK No | Indikator Kinerja   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 5      | Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas | 2024* | 3      | 3         | 100                                  | 3            | 3                   | 100,00  |
|        |   | 2023  | 1      | 1         | 100                                  |              |                     |   |
|        |   | 2022  | 1      | 1         | 100                                  |              |                     |   |
|        |   | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 7. diatas, menunjukkan bahwa Capaian indikator Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme

neraca komoditas pada tahun 2024 adalah sebesar 3 Rekomendasi, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 3 Rekomendasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 1 lembaga atau setara 100% dari target 1 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 33,33%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 1 lembaga atau setara 100% dari target 1 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 33,33%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 3 Rekomendasi setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 3 Rekomendasi., Adapun 3 rekomendasi yang sebagai berikut :

1. Rekomendasi persetujuan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan Triwulan I tahun 2024
2. Rekomendasi persetujuan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan Triwulan II tahun 2024
3. Rekomendasi persetujuan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan Triwulan III tahun 2024

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu sebesar Rp 796.000.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 795.269.036,- atau sebesar 41,78% terhadap pagu awal dan setara 99,91% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Verifikasi Usulan Rencana Kebutuhan Impor Komoditas Hasil Perikanan Tahun 2025**

Menindaklanjuti usulan rencana kebutuhan impor komoditas perikanan tahun 2025 yang diusulkan pelaku usaha, Direktorat Logistik melaksanakan kegiatan pada tanggal 2 oktober 2024 di Wisma Glacilaria dengan mengundang pelaku usaha terlampir untuk dilakukan verifikasi usulan rencananya. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 12 Perusahaan dengan data sebagai berikut :

- a. Masuya Graha Trikencana
- b. Mina Sukses Sentosa
- c. Sanjaya Cipta Lestari
- d. Nogo Segoro
- e. Cahaya Bahari Jakarta
- f. Gabungan Samudera Interasional
- g. Cahaya Samudera Internasional
- h. Anugerah Samudra

- i. Alugoro Sakti Perkasa
- j. Samudra Laut Biru Nusantara
- k. Alvia Tri Mandiri

Selanjutnya Perusahaan diminta untuk melengkapi kesesuaian data dan memperbaiki pengisian pengajuan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan importasi komoditas perikanan yang diajukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan

### Dokumentasi



Gambar 18. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

## 2. Kegiatan Verifikasi Usulan Rencana Kebutuhan Impor Komoditas Hasil Perikanan Tahun 2025

Menindaklanjuti usulan rencana kebutuhan impor komoditas perikanan tahun 2025 yang diusulkan pelaku usaha, Direktorat Logistik melaksanakan kegiatan pada tanggal 4 oktober 2024 di Wisma Glacilaria dengan mengundang pelaku usaha terlampir untuk dilakukan verifikasi usulan rencana kebutuhannya. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 10 Perusahaan dengan data sebagai berikut :

- a. Oseanik Nusa Global
- b. Pusat Koperasi Markas Besar Tni Angkatan Laut Puskopal Mabasal
- c. Pusat Koperasi Kartika Darma Putra
- d. Chelsea Jaya Samudera
- e. Chenghong Fisherindo
- f. Menara Bahari Nusantara
- g. Bahari Prima Manunggal
- h. Unimitra Andalan Sejati
- i. Kencana Laut Nusantara

- j. Delisasri Nusantara
- k. Agung Mulia Chemindo
- l. Gema Manggala Chemindo

### Dokumentasi



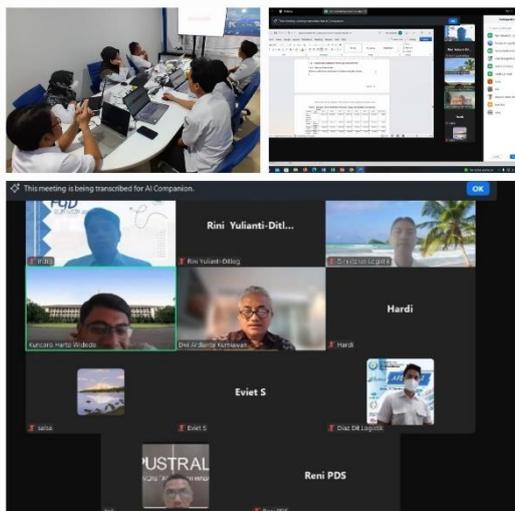
Gambar 19. Kegiatan Verifikasi Usulan Rencana Kebutuhan Impor Komoditas Hasil Perikanan Tahun 2025

### 3. Kegiatan rapat dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

Dalam pertemuan yang bertajuk “Kajian Ekonomi PSO SLIN” ini membahas kajian mengenai public service obligasi (PSO) di sektor perikanan laut., telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 6 November 2024, kegiatan rapat fokus membahas koordinasi kegiatan penyusunan kajian ekonomi dalam rangka penerapan PSO.

Agenda koordinasi melalui observasi lapangan Kondisi saat ini: Potensi perikanan di Anambas sangat besar, berupa ikan tongkol dan cumi (basah dan dikeringkan). Marketnya ke Jawa dan ekspor. Estimasi kebutuhan reef cont (pengangkutan): 10 unit sekali angkut, kapal tol laut hanya mampu 7 unit (dibagi dgn Natuna) dgn frekuensi 1 kali/Bulan. Pada musim panen ikan sering terjadi oversupply, sementara penampungan cold storage masih terbatas dari sisi kapasitas maupun distribusi/pasokan Listrik. Diperkirakan butuh minimal 2 cold storage berkapasitas 400-500 ton untuk seluruh Kab. Anambas. Fasilitas cold storage milik swasta/perorangan. Tujuan untuk menampung tangkapan para nelayan, kapasitas up 200 ton, belum dapat beroperasi full.

## Dokumentasi



Gambar 20. Kegiatan rapat dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

#### **4. Kegiatan Rapat Dalam rangka monitoring dan evaluasi komoditas pelarangan dan pembatasan (lartas) pada implementasi pemasukan hasil perikanan**

Rapat terkait pembahasan stranas PK adalah singkatan dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi di Indonesia. Stranas PK digunakan sebagai acuan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi, telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 20 November 2024, kegiatan rapat fokus membahas terkait pelaksanaan SINAS NK dan lartas, oleh perwakilan tim nasional pencegahan korupsi, KPK rapat dipimpin oleh direktur logistik dihadiri oleh katimja tata kelola rantai pasok, dan perwakilan timja lingkup direktorat logistic.

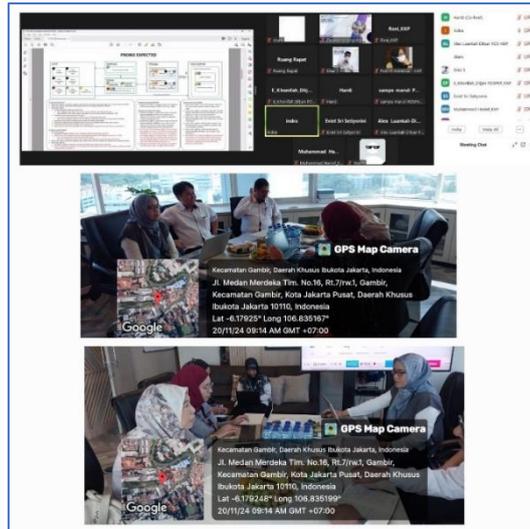
- a. Pembahasan STRANAS PK menyusun aksi tahunan, 2024-2026, diikuti oleh Bappenans, KSP, Kemenpan RB, KPK, dan K/L terkait;
- b. Hingga sebulan yang lalu, sektor perikanan tidak masuk, kemudian disarankan oleh KSP untuk dimasukkan (diswitch dengan Ketenagakerjaan), Pencegahan korupsi yang paling banyak temuannya di penegakan hukum, Penatakelolaan conflict of interest di NK, terutama di perikanan. Perikanan sudah masuk di SINAS NK,

KPK akan melakukan evaluasi terkait pencegahan korupsi dalam pelaksanaan SINAS NK. Pencegahan korupsi menjadi komitmen Ditog untuk menjadi birokrasi yang bersih.

- c. Perpres 147 2024 tentang Kemenko bidang pangan, per 5 November KKP di bawah Kemenko Bidang Pangan. Saat ini sedang dibahas lebih lanjut terkait pembagiannya. SINAS NK telah berjalan di 2024 dan rencana 2025. Permen KP NK saat ini no 14/2024 nantinya akan disesuaikan dengan Perpres yang terbaru, karena Perpres 61 nantinya juga akan berubah mengingat kewenangan Kemenkonya juga berubah.
- d. PP 9 memisahkan kewenangan impor oleh KKP dan Kemenperin. Kewenangan Impor yang ditangani oleh KKP itu terkait komoditas perikanan dan pergamaman. Alur proses NK yang melalui rakortas secara umum sama dengan ketentuan.
- e. Rakortas untuk 2025 telah dilaksanakan dengan koordinasikan oleh Kemenko pangan (Asdep Distribusi), dan nantinya akan dilanjutkan ke Rakor Level 2. Rata-rata perusahaan telah memiliki API-U, kecuali untuk penggunaan umpan memiliki API-P.
- f. Hasil perikanan ditangani oleh Ditjen PDSPKP (6 penggunaan (pemindangan, horekapasmod, usaha pelumatan, umpan, pereduksian dan pengolahan lainnya) serta mutiara) (melalui rakortas). Pakan oleh Ditjen Budidaya (melalui rakortas)
- g. Untuk induk, calon induk, benih, dan inti mutiara tidak melalui rakortas (melalui SSM Perizinan) Garam (Ditjen PKRL).
- h. Dilakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh pelaku usaha.
- i. KKP telah membangun aplikasi inhouse system NK perikanan yang mengalirkan data dari SINAS NK. Informasi terbaru, data distribusi telah ada di SINAS NK. KPK menyarankan agar KKP confirm ke INSW untuk aliran datanya.
- j. Terkait data Gudang, saat ini akan disinkronkan juga dengan SISLOGNAS, melalui e-Gudang, sehingga harapannya kedepannya akan lebih rapi penataan dan pengelolaan gudangnya.

- k. Terkait distribusi impor, saat ini KKP telah memiliki STELINA untuk pemantauan Distribusi impornya.
- l. Perubahan NK dapat dilakukan sewaktu-waktu atau setiap 3 bulan sekali
- m. Terkait pembagian mekanisme perubahan RKI melalui rakortas dan non rakortas, pernah diusulkan oleh Kemenkeu (dengan alasan penyederhanaan birokrasi) agar perubahan non rakortas (negara asal, waktu pemasukan, Pelabuhan muat, dan Pelabuhan tujuan) hanya dilakukan melalui Kemendag saja, tdk perlu melalui K/L Teknis pembinanya. Namun Kemendag berkeberatan.
- n. KKP telah bersurat agar PP9 terkait pemisahan kewenangan impor KKP dan Kemenperin ditinjau ulang, namun hingga saat ini belum ada respon lebih lanjut.
- o. Terkait adanya pola musim, disarankan untuk pembatasan impor saat sedang musim ikan di dalam negeri.
- p. K/L teknis belum sepenuhnya mengirim data stok, rencana produksi dan kebutuhan. Sehingga KPK mengharapkan penguatan di data stok dan rencana pasokan. dan akan dilakukan identifikasi fraudnya bagaimana. Potensi fraud pertama: penetapan rencana pasokan dan kebutuhan tidak ditetapkan melalui forum. Potensi fraud kedua adalah pemberian alokasi terhadap penerima/beneficiary officer yang berisiko (high, medium, dan low risk) melalui system ISRM. Faktor untuk menilai risiko: Inheren (Pajak, KSWP< NIK, dll), operasional (gudang), track record (Skor realisasi). Kemenkes dan BPOM telah menerapkan ISRM untuk obat-obatan narkotika dan psikotropika. Ada kasus 1 perusahaan yang mendapatkan alokasi impor, tapi ternyata legalitasnya tdk terdaftar di system AHU. Apabila KKP ingin menggunakan ISRM (high risk dan low risk), dapat kontak ke LNSW (Pak Khabib/Pak Apri), Kemendag di Inatrade

## Dokumentasi



Gambar 21. Kegiatan Rapat Dalam rangka monitoring dan evaluasi komoditas pelarangan dan pembatasan (lartas) pada implementasi pemasukan hasil perikanan

### **5. Kegiatan rapat dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)**

Dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan, telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 6 desember 2024, kegiatan rapat fokus membahas laporan fasilitasi data dan informasi baik dari Pusat maupun daerah, dengan butir-butir penyiapan sebagaimana pada lampiran. Data-data awal yang disampaikan gambaran tren inflasi nasiona, oleh Badan Pusat Statistik akan menjadi rapat dipimpin oleh Timja Tata Kelola Rantai Pasok dengan perwakilan katimja lingkup direktorat logistik, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Permen KP nomor 58 tahun 2021, Pokja daerah di dalam koridor logistik memiliki tugas antara lain:
  - a. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi;

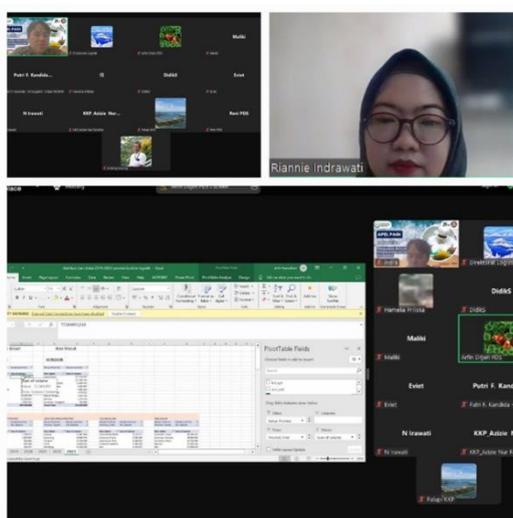
- b. Mengoordinasikan implementasi SLIN di tingkat provinsi dan implementasi SLIN antar kabupaten/kota;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi;
- d. Memberikan rekomendasi terhadap rencana Distribusi Ikan di tingkat provinsi;
- e. Mengoordinasikan penyusunan peta ketersediaan Ikan dan neraca Ikan di tingkat provinsi; dan
- f. Mengoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh Hasil Perikanan yang terjadi di daerah.

2. Tujuan rapat antara lain :

- a. Tujuan rapat untuk menyusun Laporan Direktorat Logistik untuk mendukung capaian Koridor Logistik yang terbina, salah satunya dengan menggordinasikan laporan dari kelompok kerja (pokja provinsi);
- b. Perlu fasilitasi data dan informasi kepada Provinsi;
- c. Perlu masukan dari Timja lingkup direktorat logistik terkait penyusunan Bahan data dan informasi sbb:
  - Merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi;
  - Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi terdiri dari:
    - Identifikasi Masalah (rumuskan semua masalah yang ada di dalam list)
      - Identifikasi Masalah (rumuskan semua masalah yang ada di dalam list)
      - Analisis Masalah (masukkan dalam kategori Strength, Weakness, Opportunity atau Threat).
      - Pengembangan Opsi Kebijakan (susun alternatif solusi di dalam kuadran SO, ST, WO dan WT).

- Menyusun Rekomendasi kebijakan (Susun prioritas berdasarkan penilaian tim) Bobot dan Score jika diperlukan.
- Rencana penyusunan laporan untuk indikator kinerja Direktur, Diskusi berfokus pada pengumpulan dan analisis data untuk menyusun laporan komprehensif tentang koridor logistik ikan nasional

### Dokumentasi



Gambar 22. Kegiatan rapat dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

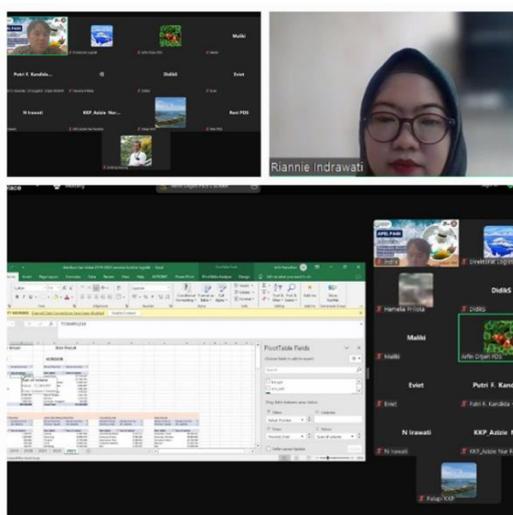
### 6. Kegiatan FGD Dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

Dalam rangka pertemuan FGD Penguatan kapasitas regulasi logistic: Public Service Obligation, telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 20 desember 2024, kegiatan rapat fokus membahas **Perhitungan PSO SLIN di Indonesia** terutama kawasan koridor logistik yang disampaikan/dipaparkan garis besarnya mengenai komparasi alternative subsidi, perhitungan besaran subsidi yang

direkomendasikan, mitigasi risiko, oleh Tim PUSTRAL UGM rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dengan hasil sebagai berikut:

1. Narasumber pada kegiatan tersebut antara lain:
  - a. Perwakilan Direktorat Statistik Harga-BPS;
  - b. Perwakilan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan;
  - c. Perwakilan Tim Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gajah Mada;
  - d. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - e. Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
2. Kegiatan dihadiri oleh:
  - a. Perwakilan pelaku usaha logistik perikanan (pengadaan, penyimpanan dan pengangkutan/distribusi)..
  - b. Perwakilan Direktorat Transportasi Bappenas.
  - c. Perwakilan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan.
  - d. Perwakilan Prov. Jawa Timur.
  - e. Perwakilan Prov. Sulawesi Utara.
  - f. Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara.
  - g. Perwakilan Prov. Maluku.
  - h. Perwakilan Prov. Papua.
  - i. Perwakilan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap.
  - j. Perwakilan Eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP.
  - k. Perwakilan Eselon 3 lingkup Direktorat logistik.
  - l. Anggota tim kerja tata kelola rantai pasok.

## Dokumentasi



Gambar 23. Kegiatan FGD Dalam rangka penguatan regulasi Sistem Logistik Ikan Nasional, utamanya dukungan pemerintah dalam pengadaan, penyimpanan, dan transportasi hasil perikanan melalui Public Service Obligation (PSO)

### 1.2.6 Sasaran Kegiatan “Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)”

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Suplier/pengepul, pengolah/industri pengolahan) dengan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kerjasama pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan antara operator utama, operator pendukung dan pelaku usaha di bidang perikanan baik dalam bentuk kelompok usaha, koperasi maupun badan usaha dalam menjamin serapan ikan di hulu serta menjamin ketersediaan ikan bagi konsumsi dan industri pengolahan ikan termasuk penerapan sistem manajemen gudang beku (ikan keluar, ikan masuk, dan jenis ikan).

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023, pada tahun 2023 indikator ini dibagi menjadi 2 IKK yaitu Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP dan IKK Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan.

Sedangkan tahun 2024 IKK tersebut digabung satu yaitu Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan). Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan target sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 16 Kesepakatan.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 6      | Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP | 2024* | 23     | 23        | 100                                  | 23           | 23                  | 100,00  |
|        |  | 2023  | 41     | 42        | 102,44                               |              |                     |   |
|        |  | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 8. diatas, menunjukan bahwa Capaian indikator Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP pada tahun 2024 adalah sebesar 23 Kesepakatan, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 23 Kesepakatan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 42 Kesepakatan atau setara 102,44% dari target 41 Kesepakatan, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -82,61% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran.

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 23 Kesepakatan setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 23 Kesepakatan.. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Adapun kesepakatan yang terbentuk sebagai berikut :

- Kesepakatan antara PT. Rahayu Perdana Trans dan PT. Salam Pasific Indonesia Line Cabang Biak tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan

- Kesepakatan antara PT. Rahayu Perdana Trans dan Kurniawan Kasno Pemilik Kapal Lucy Star Pasific tentang Pengadaan dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Rahayu Perdana Trans dan PT. Pindad Internasional Logistic tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PPN Kwandang dan Pengolah Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
- Kesepakatan antara PPN Kwandang dan Pengolah Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dan Pengolah Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dan Pengolah Ikan Asin Kering tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
- Kesepakatan antara Pengelola CS 2000 Ton Muara Baru dan Koperasi Mina Muara Sejahtera tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
- Kesepakatan antara Pengelola CS 2000 Ton Muara Baru dan PT. Arto Ulam Jaya tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
- Kesepakatan antara PT. Rukma Padaya Trans (HSN Group) dan PT. Samudra Indo Sejahtera tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara Gerakan Bawah Air dengan Tofa Farm tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara Keluarga Ikan Hias Cangu dengan CV. Molly Jaya Indonesia tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Kelompok Bawah Air tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Keluarga Ikan Hias Cangu tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Kelompok Mina Muda Abadi tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan CV. Molly Jaya Indonesia tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara Via KOI dengan Yuriko KOI tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Berkah Alam tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku

- Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Sumber Jaya tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Mutiara Laut tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- Kesepakatan antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan Pedagang Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- Kesepakatan antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan Pedagang Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- Kesepakatan antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan Pedagang Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dengan pagu sebesar Rp830.100.000,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 829.268.730,- atau sebesar 99.90% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

### **1. Sosialisasi dan Implementasi PermenKP No 9 Tahun 2024**

Sosialisasi dan Implementasi Permen KP No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yg diselenggarakan oleh Timja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Logistik secara hybrid di Raiser Cibinong tanggal 25 Oktober 2024.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh 915 peserta yang terdiri dari perwakilan : Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, BKPM, BPJPH), Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Pelaku Usaha (PT. Pindad International Logistik, PT. Kawal Laut, PT. SWA, PT. SHL Bangka, PT. Duta Buana Pasific, CV. Mina Sejahtera, PT. MFI, PT. KN, CPL, PT. Indo Seafood, PT. Harmoni Samudra, PT. HSP, CV. Bahari Aru Permai, STP Cirebon, CV. Laut Jaya, PT. Pos Indonesia, Sumber Samudera Indonesia, PT. ILS, PT. Bandeng Juwana, PT. SPIL), Asosiasi (ALFI, PPLI, Translogku, SCI, IATA, IWTL, ALI, ARPI, APTRINDO, ABUPI, ASDEKI, INSA), Pejabat Fungsional Pembina Mutu dan APHP Ahli

Utama, Perwakilan dari masing2 unit eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, Katimja dan perwakilan lingkup Dit. Logistik, Ditjen PDSPKP.

Materi yang disampaikan adalah :

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan oleh Biro Hukum, Sekjen KKP;
- b. Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) oleh Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP; dan
- c. Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) oleh Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pasca Panen, BPPMHKP.

Berapa hasil kegiatan adalah :

- a. Pelaksanaan verifikasi atau pemeriksaan ke lapangan dalam proses penerbitan SPDI akan dilakukan oleh UPT dari Badan Mutu (Prosedur pemeriksaan ke lapangan dikembalikan ke masing-masing wilayah).
- b. Penyimpanan hasil perikanan di dalam Gudang Penyimpanan tidak boleh bercampur dengan produk lainnya kecuali selama penyimpanan potensi kontaminasi dapat dicegah, misalnya dengan cara pemberian batas/sekat, dilengkapi dengan kemasan atau wadah.
- c. Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan pada masing-masing lokasi usaha meskipun dalam satu entitas usaha. Hal ini dilakukan karena setiap lokasi usaha terkadang memiliki perbedaan dalam prosedur maupun kondisi kegiatan penanganan hasil perikanan.
- d. PDI tidak berlaku pada unit usaha yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan. Misalnya Gudang penyimpanan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan maka tidak diberlakukan SPDI.
- e. KKP telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan regulasi yang telah diundangkan kepada seluruh stakeholder maupun masyarakat, termasuk permen KP no 9 tahun 2024 ini baik secara langsung maupun melalui media sosial. Harapannya seluruh pemangku kebijakan, pelaku usaha dan masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi terkait regulasi baru. Pada dasarnya sejak peraturan diundangkan maka semua warga negara harus mengetahui.
- f. UPI yang sudah memiliki SKP dan HACCP tidak perlu mengurus SPDI, namun kedepannya ada penyesuaian KBLI pada revisi PP 5 tahun 2021 maka sertifikasinya akan menyesuaikan.

- g. Pada saat SPDI diberlakukan, CPIB yang dimiliki pelaku usaha masih berlaku sampai habis masa berlakunya, kemudian baru diperpanjang dengan SPDI.

#### Dokumentasi



Gambar 24. Sosialisasi dan Implementasi PermenKP No 9 Tahun 2024

### 3. Pembahasan Draft Rancangan PermenKP Tata Kelola Kapal Pengangkut Ikan

Hasil Kegiatan Pembahasan Draft Rancangan PermenKP Tata Kelola Kapal Pengangkut Ikan, yang dilaksanakan secara hybrid di Raiser Cibinong tanggal 25 Oktober 2024 dihadiri oleh Biro Hukum KKP, Direktorat KAPI, Ditjen Tangkap, Direktorat PDK, Ditjen Tangkap, Eselon 2 Lingkup Ditjen PDSPKP, Timja Hukum, setditjen PDSPKP, Katimja lingkup Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP

Dalam penyusunan dan pembahasan Draft PermenKP Tata Kelola Kapal Pengangkut Ikan, perlu adanya sinergi antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen PT. Dibutuhkan adanya analisa GAP dalam penyusunan PermenKP, dengan memperhatikan lingkungan strategis baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak pada saat akan dilaksanakan konsultasi publik.

Ditjen PDS telah Menyusun draft PermenKP Tata Kelola Kapal Pengangkut Ikan, yang didalamnya memuat :

- a. Tata Kelola Kapal pengangkut adalah Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan lainnya (Port to Port)

- b. Kapal Pengangkut Ikan dilarang membawa bahan bakar minyak di dalam palka dan/atau mengangkut ikan melebihi kapasitas/daya muat untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- c. Penetapan trayek dengan mempertimbangkan: potensi muatan berdasarkan hasil produksi ikan, ketersediaan dan kebutuhan Kapal Pengangkut Ikan, pemerataan ketersediaan ikan dan sarana dan prasarana pelabuhan.
- d. Pelaku Usaha dalam melaksanakan usaha pengangkutan ikan harus memiliki surat izin usaha perikanan.
- e. Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan lain dilakukan setelah ikan hasil tangkapan melalui proses penanganan, pengolahan dan/atau pengemasan.
- f. Pengangkutan Ikan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengangkutan ikan antara pemilik ikan dan pemilik Kapal Pengangkut Ikan ditandai dengan berita acara serah terima barang. Berita acara serah terima barang disampaikan di Direktur Jenderal
- g. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan surat izin usaha perikanan harus mengajukan permohonan penandaan kapal pengangkut Ikan kepada Direktur Jenderal.

DJPT sepakat terkait dengan permen tata kelola kapal pengangkut ikan yang hanya mengangkat nomenklatur pengangkutan port to port. Karena untuk kapal pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan pangkalan telah diatur pada ketentuan yang lebih eksplisit yang didalamnya mengatur terkait PNPB pasca produksi sehingga singgungan peraturannya lebih banyak.

Pada PermenKP No. 10 Tahun 2021 ada 2 kategori persyaratan yaitu persyaratan umum yaitu bagaimana para pelaku usaha harus memenuhi ketentuan tersebut untuk bisa menerbitkan dokumen perijinan, dan persyaratan khusus yaitu apabila pelaku usaha telah memiliki dokumen perijinan maka harus melengkapi persyaratan khusus. Apabila ditjen PDSPKP mengatur trayek dari kapal angkut ikan pada PermenKP ini, diharapkan pengaturan trayek tidak menambah proses bisnis perijinan yang telah eksisting.

DJPT berharap PDSPKP dapat menyusun kajian ilmiah terkait pengangkutan ikan khususnya penentuan rute, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi penerbitan ijinnya. Dimungkinkan untuk melakukan revisi terkait PermenKP No. 10 Tahun 2021 untuk menambahkan persyaratan terkait penentuan trayek pada persyaratan umum sebelum diterbitkannya dokumen perijinan.

Penandaan /tanda pengenal kapal sudah tertuang di Permen KP No. 33 Tahun 2021. Dalam PermenKP No. 33 Tahun 2021 ada 3 substansi yang diatur terkait penandaan yaitu ukuran kapal atau gross Ton, no. Kapal register, dan jenis kapal pengangkutnya. Turunan kapal pengangkut terdiri atas 2 jenis yaitu pengangkut untuk ikan hidup (KB) dan pengangkut untuk selain ikan hidup (KA). Terkait kodifikasi dan trayek untuk kapal angkut belum diatur dalam peraturan Permen KP No. 10 Tahun 2021 dan Permen KP No. 33 Tahun 2021, namun penguangan terkait trayek tersebut sudah ada pada SIUP.

Klausul dari tanda pengenal kapal yaitu setiap kapal perikanan wajib untuk didaftarkan yang bentuk keluarannya dalam bentuk buku kapal perikanan yang isinya terkait identitas pemilih, identitas kapal dan informasi terkait tanda pengenal kapal itu sendiri. Tanda pengenal kapal yang ada dibuku kapal dituangkan untuk dituliskan ke kapal pengangkut ikan. Dimungkinkan bahwa untuk sistem penandaan yang dapat dilakukan oleh Ditjen PDS melalui pendekatan transaksional dengan mengacu pada trayek yang telah ditentukan. Laik simpanan pada kapal itu yang diatur adalah objek kapalnya terkait tata susunan ruang, palka, ruang penyimpanan, jenis pendingin serta peralatan untuk penanganan.

#### Dokumentasi



Gambar 25. Sosialisasi dan Implementasi PermenKP No 9 Tahun 2024

#### 4. Koordinasi Persiapan Penerapan CDIB dan Penerbitan SPDI

Kegiatan Koordinasi Penerapan CDIB dan Penerbitan SPDI yg dilaksanakan oleh Timja Pengadaan dan Distribusi, Dit. Logistik di ruang rapat Dit. Logistik tgl 19 November 2024, Kegiatan dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi Ditjen PDSPKP dan dihadiri oleh

Tim Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. Logistik.

Update Pelaksanaan Persiapan Penerbitan SPDI.

- a. Badan Mutu sudah mengirimkan nota dinas ke Biro Hukum tgl 16 Nov 2024 perihal permohonan arahan terkait implementasi permen KP no 9 tahun 2024 yg telah diundangkan tgl 20 Mei 2024 dan berlaku 6 bulan sejak diundangkan yaitu bulan November 2024.
- b. Arahan dari Biro Hukum yaitu menunggu pemberlakuan Rev. PP 5 thn 2021 sehingga permohonan penerbitan SPDI ditangguhkan terlebih dahulu tetapi pembinaan kepada pelaku usaha distribusi ikan dapat dilakukan (bimtek, penyusunan manual CDIB) kecuali penilaian penerapan CDIB karena masa berlaku hasil penilaian hanya 1 bulan utk diajukan sertifikasi SPDI.
- c. Saat ini CPIB suplier dibutuhkan oleh UE sehingga penerbitan sertifikat tetap akan dilakukan oleh BPPMHKP sampai SPDI dilaksanakan.
- d. SPDI akan dimasukkan kedalam aplikasi Siap Mutu.
- e. Penerbitan SPDI akan dilakukan oleh UPT BPPMHKP sebanyak 36 UPT yang sedang proses diusulkan ke mempan. Apabila blm di ACC pembentukan UPT BPPMHKP maka penerbitan SPDI akan dibantu dilaksanakan oleh 47 UPT yg exsisting saat ini.
- f. Jumlah suplier yg sdh memiliki sertifikat CPIB suplier sebanyak 1600 unit yg terdiri dari suplier penanganan dan pengolahan

#### Dokumentasi



Gambar 26. Koordinasi Persiapan Penerapan CDIB dan Penerbitan SPDI

## 5. Audiensi PPLI dengan Dit. Logistik terkait Penerapan CDIB dan Sertifikasi SPDI

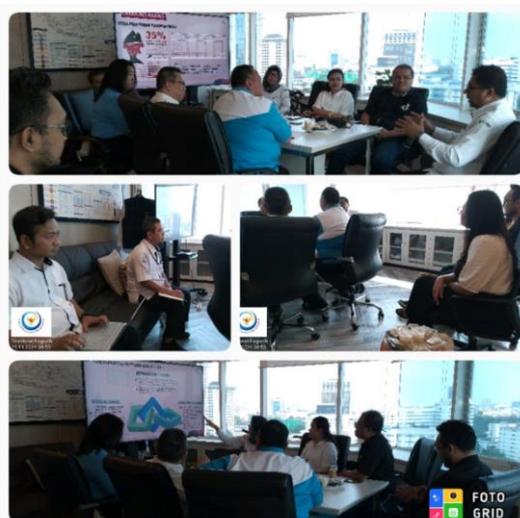
Audiensi PPLI dengan Direktorat. Logistik terkait Penerapan CDIB dan Sertifikasi SPDI sebagai tindak lanjut surat dari PPLI no 113/Humas/PPLI COLDCHAIN/1124 tanggal 6 November 2024 perihal permohonan pengurusan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Katimja PD, Katimja Pemetaan, Ketua PPLI bersama Tim dan perwakilan dari Timja Pemetaan dan Timja PD.

PPLI menyampaikan dukungan terhadap penerapan CDIB dan siap bekerjasama dengan KKP sebagai Pilot Project penerapan CDIB hingga perolehan SPDI. PPLI mengharapkan kehadiran KKP sebagai narasumber untuk materi Sosialisasi penerapan CDIB dan penerbitan SPDI pada kegiatan Talkshow dalam mendukung side event pameran IISM dan Surabaya Cold Chain 2024 yg akan dilaksanakan di Surabaya tgl 12 Desember 2024. Pada kegiatan tersebut akan hadir pelaku usaha logistik (penyimpanan dan pengangkutan), akademisi, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. PPLI juga berharap adanya booth untuk konsultasi penerapan CDIB.

Sebagai dukungan pada program Makan Bergisi Gratis (MBG), PPLI akan menyediakan 750 paket MBG dengan menu ikan untuk anak-anak SDN 1 Pulogebang pada Jumat, 29 November 2024. PPLI mengharapkan kehadiran KKP untuk memberikan edukasi tentang penanganan ikan kepada anak-anak. Bulan Mei 2025 PPLI memiliki rencana penyelenggaraan pameran tentang menu ikan dan lomba design gerobak tukang sayur (termasuk bagian untuk pemasaran ikan yang dilengkapi dengan fasilitas penyiangan ikan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan branding dan mutu barang yang dipasarkan oleh tukang sayur.

PPLI akan menunjuk 6 anggota di Jabodetabek sebagai pilot project penerapan CDIB dan Dit logistik siap melakukan pendampingan penerapan CDIB (penyusunan panduan dan penerapan standar-satandar sesuai PermenKP9/2024). Dit. Logistik akan berpartisipasi dalam kegiatan MBG oleh PPLI di SDN 01 Bantargebang dan memberikan edukasi terkait pengenalan ciri-ciri ikan segar dan penanganan ikan selama distribusi. Dit. Logistik akan berkoordinasi dengan BPPMHKP terkait keterlibatannya pada acara talkshow di Surabaya dengan materi penerbitan SPDI. Dit. Logistik akan berkoordinasi dengan Dit. Pemasaran terkait rencana pameran tentang menu ikan dan lomba desain gerobak tukang sayur yang diselenggarakan oleh PPLI.

## Dokumentasi



Gambar 27. Audiensi PPLI dengan Dit. Logistik terkait Penerapan CDIB dan Sertifikasi SPDI

### 6. Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP melaksanakan Coaching Clinic Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada Tim Teknis Pembinaan CDIB dan seluruh JFT Pembina Mutu serta Asisten Pembina Mutu Lingkup Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan memberikan pembekalan dalam penerapan CDIB. Coaching Clinic Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada Tim Teknis Pembinaan CDIB dan seluruh JFT Pembina Mutu serta Asisten Pembina Mutu Lingkup Ditjen PDSPKP. dihadiri oleh : Perwakilan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP, Perwakilan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP, Perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, JFT Pembina Mutu Lingkup Ditjen PDSPKP, Tim Teknis Pembinaan CDIB, Ditjen PDSPKP

Kegiatan dibuka oleh Dirjen PDSPKP dengan point utama yg disampaikan yaitu:

- a. Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam industri perikanan yang berdampak signifikan terhadap kualitas hasil perikanan, keamanan pangan serta efisiensi operasional sebuah unit usaha.
- b. Kondisi saat ini yang terjadi bahwa masih terdapat pelaku usaha distribusi ikan (pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran) yang

belum menerapkan jaminan mutu atas produk yang ditangani. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah dalam jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak hulu hingga hilir atau from farm/sea to table.

- c. Dalam penerapannya Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang baik adalah mudah dan tidak memberatkan kepada pelaku usaha.

Sambutan oleh Direktur Logistik, menyampaikan bahwa:

- a. Penerapan CDIB sesuai PermenKP No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dilakukan kepada pelaku usaha distribusi ikan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan.
- b. Dalam rangka menyiapkan tenaga profesional yang menguasai aspek mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu berperan secara optimal dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi ikan, maka Direktorat Logistik akan melaksanakan kegiatan Coaching Clinic Pembinaan CDIB. Kegiatan ini sebagai upaya dalam memenuhi tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir khususnya pada kegiatan distribusi ikan.
- c. Tugas dan tanggung jawab Pembinaan CDIB bukan hanya oleh Direktorat Logistik tetapi juga oleh Ditjen PDSPKP.

Penyampaian materi secara panel dengan Narasumber dan Materi:

- a. Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan No. 9 Tahun 2024 oleh Katimja Pengadaan dan Penyimpanan
- b. Pengelolaan sistem Distribusi Ikan bertujuan untuk mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan yang meliputi : Penyusunan, Penerapan dan Penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)
- c. CDIB merupakan tata cara penyaluran Ikan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, dan transportasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan
- d. Penyusunan CDIB mengikuti Standar Higienis, Standar Teknis Distribusi, Standar Teknik Penanganan, Standar Prasarana, Sarana & Fasilitas, Standar Teknik Pengemasan dan Pelabelan dan Standar Penyimpanan.
- e. Penerapan CDIB pada Pelaku Usaha (Pengadaan Ikan, Sortasi dan Grading Ikan, dan/atau Penyimpanan Ikan) dan Pelaku Usaha Jasa Logistik (Pengangkutan Ikan Segar, Ikan Beku, Ikan Hidup; dan/atau Ikan Kering)

- f. KBLI yang masuk pada CDIB : KBLI Jasa Pasca Panen, KBLI Perdagangan, KBLI Pergudangan dan KBLI Angkutan.

#### Kemunduran Mutu Hasil Perikanan oleh Pembina Mutu Direktorat Logistik

- a. Kemunduran mutu ikan terjadi ketika kualitas ikan menurun secara bertahap. Hal ini ditandai oleh perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologis, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti suhu penyimpanan, penanganan yang kurang bagus, dan aktivitas mikroorganisme.
- b. Dampak kemunduran mutu memberikan dampak pada Kesehatan yaitu kejadian keracunan makanan dan penyakit gastrointestinal, selain itu memberikan dampak pada ekonomi yaitu kerugian pada industri perikanan, mempengaruhi harga ikan di pasar dan berpengaruh pada kegiatan ekspor.

#### Prinsip Penanganan Ikan dan Penerapan Rantai Dingin pada kegiatan Distribusi Ikan oleh Pembina Mutu Direktorat Logistik

- a. Menurut PP Nomor : 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
- b. Tujuan penanganan ikan meliputi mendapatkan mutu kesegaran ikan yang maksimal (sama seperti saat ditangkap), mempertahankan kesegaran, menekan susut (losses); dan mendapatkan bahan baku hasil perikanan yang memenuhi persyaratan/standar mutu dan jaminan keamanan pangan serta meningkatkan daya saing/nilai tambah

#### Standar Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) oleh Pembina Mutu Direktorat Logistik

- a. Standar CDIB mengacu pada prinsip Standar Sanitasi Operasional Prosedur, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan/atau standar mutu lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan peruntukannya.
- b. Sasaran CDIB adalah Pelaku Usaha (Pengadaan Ikan, Sortasi dan Grading Ikan, dan/atau Penyimpanan Ikan) dan Pelaku Usaha Jasa Logistik (Pengangkutan Ikan Segar, Ikan Beku, Ikan Hidup; dan/atau Ikan Kering)
- c. Penerapan CDIB dilaksanakan pada kegiatan :
  - Pengadaan, sortasi dan grading ikan meliputi standar higienis, standar teknik penanganan dan standar teknik prasarana, sarana dan fasilitas.

- Pengangkutan hasil perikanan meliputi standar higienis, standar teknik penanganan standar teknik pengemasan dan pelabelan, standar distribusi dan standar teknik prasarana, sarana dan fasilitas.
- Penyimpanan hasil perikanan meliputi standar higienis, standar teknik penanganan dan standar teknik prasarana, sarana dan fasilitas dan standar teknik penyimpanan.

#### Pengenalan Penerapan HACCP pada Distribusi Ikan oleh Pembina Mutu Direktorat Logistik

- a. Berdasarkan Permen KP No. 51 Tahun 2018; HACCP adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan
- b. Dasar Hukum PP 57 Tahun 2015, bahwa Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia
- c. 7 prinsip HACCP: Melakukan Analisa Bahaya/ Hazard Analysis; Menetapkan CCP (Critical Control Points); Menetapkan Batas Kritis; Menetapkan Langkah Monitoring; Menetapkan Tindakan Koreksi; Menetapkan Verifikasi; dan Mengembangkan Dokumen dan Rekaman
- d. Tujuan penerapan HACCP: Mencegah bahaya pada hasil perikanan sehingga konsumen mendapatkan hasil perikanan yang aman dan berkualitas.
- e. Manfaat penerapan HACCP: Meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat hasil perikanan yang tidak aman, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta meningkatkan efisiensi selama distribusi

#### Penyusunan Panduan CDIB oleh Pembina Mutu Direktorat Logistik

- a. Format Panduan CDIB akan disusun menjadi dua antara lain:
  - Panduan CDIB untuk Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang TIDAK melakukan pengembangan HACCP, dibuat secara simpel/sederhana dengan tetap menyesuaikan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dan mengacu pada kuesioner penilaian.

- Panduan CDIB untuk Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang melakukan pengembangan HACCP, Disusun oleh pelaku usaha Distribusi ikan yang melakukan ekspor atau memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan HACCP. Panduan CDIB ini disesuaikan dengan standar penerapan CDIB dan pengembangan HACCP dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan pemenuhan persyaratan Internasional terkait jaminan mutu dari hulu sampai hilir.

#### Dokumentasi



Gambar 28. Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

### 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Kegiatan diikuti oleh pelaku usaha dibidang penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan ikan, yaitu: PT. Dua Putra, PT. Komira, PT. Rubelli, anggota Perkumpulan Pengusaha Logistik Indonesia atau PPLI ( PT. NOBO PUTRA MAHAMERU, PT. Winson Singa Logistik – Ekspedigin, PT Inter Mitra Transindo, PT Inter Mitra Transindo, PT. Karya Indonesia Sukses, PT. Yama Ekspres, PT. Citra Perisai Lintasindo, PT. Citra Perisai Lintasindo, PT. Indah Bestari Permai - Sinar Primera, PT. Inter Mitra Transindo, PT Winson Prima Sejahtera).

Penyampaian Materi dan Diskusi:

- Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan No. 9 Tahun 2024, Narasumber Katimja PD.
- Kemunduran Mutu dan Penanganan Hasil Perikanan pada Unit Usaha Distribusi Ikan, Narasumber Pembina Mutu.

- c. Standar Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB), Narasumber Katimja PD.
- d. Pengenalan Penerapan HACCP pada Distribusi Ikan, Narasumber Pembina Mutu.
- e. Penyusunan Panduan CDIB, Narasumber Pembina Mutu.
- f. Skema Penerbitan SPDI, Narasumber Katimja Pengawasan Mutu Impor dan Domestik, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen, BPPMHKP.

Pre and Post Test :

Pre-test menggambarkan pemahaman awal peserta sebelum menerima materi dan post-test menunjukkan tingkat penguasaan materi setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

Kunjungan lapangan ke unit distribusi ikan:

- a. Kunjungan lapangan dilakukan ke PT. Komira yg beralamat di Komplek pergudangan & perkantoran Jalan Muara baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
- b. Pada saat kunjungan, pembelajaran yang dilakukan :
  - Peserta melakukan diskusi terkait penerapan mutu yang dilakukan PT. Komira.
  - Pemaparan manual HACCP yang dimiliki PT Komira dan implementasi pendokumentasiannya.
  - Praktik pengecekan suhu pusat ikan beku (salem beku) yang disimpan di Gudang beku milik PT. Komira.
  - Kunjungan ke cold storage milik PT. Komira dengan melihat fasilitas Gudang beku, implementasi penyusunan ikan didalam ruang penyimpanan yg menerapkan sistem FIFO dan suhu penyimpanan yang mencapai dibawah -20C.
  - Observasi implementasi penerapan penanganan mutu pada armada pengangkutan yang dimiliki oleh PT. Komira meliputi kondisi kebersihannya, informasi terkait praktek pembersihan sebelum dan sesudah kendaraan pengangkutan digunakan, pengecekan suhu armada pengangkutan.

## Dokumentasi



Gambar 29. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

### 8. Pendampingan Kemitraan UMKM Dengan Penyedia Bahan Baku

Rapat dibuka oleh Direktur Logistik dan dipimpin oleh Katimja Penyimpanan serta dihadiri perwakilan Dinas Pendamping dari Kab. Sidoarjo, Mojokerto, Kota Ambon, dan Kota Makassar, UMKM Pempek Kulo, Dua Bersaudara, CV angin timur seafood, CV Samudra Aru Prima, pelaku usaha penyedia bahan baku, Koordinator Kurator Dit. Logistik, Kurator lingkup Ditjen PDSPKP, dan Pelaksana Timja Penyimpanan. Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut kurasi UMKM yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP khususnya yang mengalami kendala terkait penyediaan bahan baku.

Rapat diawali pemaparan oleh Katimja Penyimpanan yang menjelaskan pentingnya kemitraan antara penyedia bahan baku dengan UMKM untuk memastikan ketersediaan bahan baku, memastikan kualitas bahan baku serta untuk memastikan kontinuitas bahan baku.

Arahan Direktur Logistik menekankan pentingnya aksi nyata dalam mendukung pertumbuhan sektor perikanan dan memperkuat ekosistem suplai dan demand. Ketersediaan, konektivitas dan kontinuitas bahan baku sangat penting dalam memperkuat produksi UMKM. Oleh karena itu perlu dilakukan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam koridor kebijakan KKP mewujudkan ekonomi biru. Disisi lain peran serta kurator dalam upaya tersebut menjadi salah satu faktor penting yang harus dikoordinasikan lebih intensif.

Berdasarkan hasil diskusi, terdapat potensi kerja sama pemenuhan bahan baku antara UMKM dengan penyedia bahan baku khususnya untuk daging lumatan dan surimi Sebagai tindak lanjut akan

dilaksanakan pendampingan secara intensif terkait kerja sama pemenuhan bahan baku oleh penyedia bahan baku dengan UMKM olahan ikan di Kota Ambon dan Kab. Mojokerto

### Dokumentasi



Gambar 30. Pendampingan Kemitraan UMKM Dengan Penyedia Bahan Baku

## 9. Pembahasan progres pekerjaan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Beku

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Penyimpanan yang dihadiri oleh Tim dari Pusdatin, Timja Lingkup Dit. Logistik dan Tim dari PT. Arcson Teknologi Solusindo. Tujuan rapat adalah untuk memantau perkembangan pekerjaan dan mendapatkan masukan dari pihak yang terlibat, memastikan semua pihak yang terlibat mempunyai pemahaman yang sama mengenai system informasi pengelolaan Gudang beku.

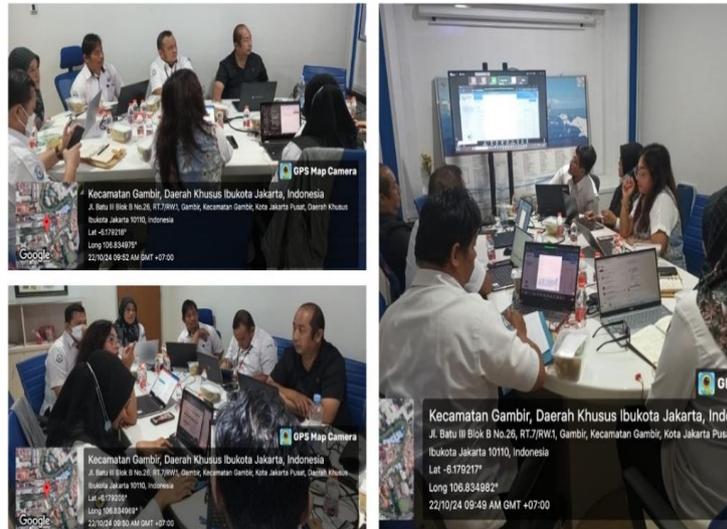
Tim dari PT. Arscon Teknologi Solusindo menyampaikan progres pekerjaan dan memaparkan hasil perkembangan pekerjaan untuk mendapatkan masukan. Aplikasi mobile telah dilakukan beberapa penambahan fitur diantaranya menu refresh, print nota, dan edit data.

Pusdatin menyarankan agar setelah selesai pekerjaan segera diproses asetnya sebagai BMN, sehingga dapat diusulkan ke dalam server KKP, penggunaan nama-nama ikan sebaiknya mengacu pada permen KP. Terkait simplikasi aplikasi WMS agar tetap dipertahankan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Perkembangan interkoneksi dgn stelina antara lain konfirmasi sampel data base wms, dan Katimja Pemantauan menyampaikan tim

IT WMS dan STELINA dapat bertemu untuk mendalami proses interkoneksi.

### Dokumentasi



Gambar 31. Pembahasan progres pekerjaan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Beku

## 10. Pembahasan Formulasi Persentase Okupansi dan Nilai Turn Over Gudang Beku

Kegiatan dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Tenaga Ahli Dr. Agus M. Soleh (Departemen Statistika IPB), Bugie Pujoutomo (ARPI), perwakilan Seditjen PDSPKP, Dinas Perikanan & Peternakan Kota Bogor, Ketua Tim Kerja Penyimpanan dan Ketua Tim Kerja Pemetaan, Koordinator Data Direktorat Logistik. dilaksanakan sebagai Tindak Lanjut Rakernis Direktorat Logistik bahwa perlu dibuat istilah dan rumusan baku terkait Okupansi dan Turn Over untuk dapat mengukur optimalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah Gudang Beku.

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong ikan sebagai salah satu sumber protein untuk memenuhi gizi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penguatan data sebaran dan pengelolaan cold storage yang meliputi stok, okupansi, dan turnover. Saat ini jumlah cold storage di Indonesia mencapai 2.110 unit dengan kapasitas total 813.966 Ton. Cold storage pemerintah berjumlah 228 unit (11%) dengan total kapasitas 18.313 ton sedangkan cold storage swasta berjumlah 1882 unit (89%) dengan total kapasitas 795.653 ton

Implementasi SIPCS sudah dilakukan oleh 95 cold storage dengan total kapasitas 10.944 ton. Adapun CS BP yang telah menerapkan SIPCS sebanyak 76 unit, CS Provinsi/Kab/Kota sebanyak 7 unit dan CS Swasta (mikro kecil) sebanyak 12 unit. Berdasarkan data yang telah di input secara harian ikan masuk dan ikan keluar oleh pelaku usaha cold storage sejak Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024 dimana data tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan formulasi okupansi dan turnover.

Persentase okupansi dan turn over akan sangat bervariasi antara cold storage disentra produksi, collecting (buffer stock) dan distribusi, dan juga dipengaruhi oleh volume ruang cold storage itu sendiri (panjang x lebar x tinggi) sehingga diperlukan kesepakatan terkait dengan nilai maksimal okupansi dan turn over untuk cold storage yang ada saat ini. Peran tenaga ahli dan pelaku usaha cold storage diharapkan dapat memberikan masukan dalam penetapan formula selain tentunya didukung oleh literatur/data sekunder yang tersedia.

Hasil Kegiatan antara lain adalah Pelaku usaha Gudang Beku yang telah mengisi SIPCS dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu:

- a. Gudang Beku disentra Produksi: terletak di pusat produksi dimana okupansi dan Turn Over diatur sesuai dengan jumlah ikan yang didaratkan;
- b. Gudang Beku Collecting (Buffer Stok\_ ): Gudang Beku yang digunakan untuk menyimpan stok ikan terutama ketika terjadi Over produksi sehingga harga ikan turun. Okupansi bisa mencapai kapasitas maksimal Gudang beku karena menampung ikan murah sampai harga pasar stabil;
- c. Gudang Beku disentra distribusi: Gudang Beku dimana untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pengolah, jumlah produksi secara rutin sudah terprediksi sehingga okupansi biasanya tidak akan mencapai kapasitas maksimal.

Berdasarkan pembahasan dengan tenaga ahli diperoleh Formula penghitungan okupansi dan turn over , yaitu:

- a. Okupansi :  $\text{Stok akhir} / \text{kapasitas maksimal Gudang beku} \times 100\%$ ;
- b. Turn Over: Ikan keluar dibagi dengan kapasitas maksimal. Nilai turn over makin besar maka perputaran ikan semakin sering dan cepat;

Hasil analisis tenaga ahli terhadap volume Gudang beku dibandingkan dengan jumlah ikan yang bisa disimpan dengan mempertimbangkan tata letak ikan dalam cold storage yang diasumsikan menggunakan palet dasar (kapasitas 10-200 ton), sirkulasi suhu dingin evaporator dan arus keluar masuk barang diperoleh nilai okupansi rerata 79,99%. Berdasarkan analisis tersebut disepakati bahwa nilai okupansi maksimum Gudang beku adalah 80%

## Dokumentasi



Gambar 32. Pembahasan Formulasi Persentase Okupansi dan Nilai Turn Over Gudang Beku

### 11. Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Cold Storage melalui Kemitraan Usaha dengan PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery)

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dipimpin oleh Katimja Penyimpanan dan dihadiri perwakilan dari PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery), perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, perwakilan DKP Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan UPTD Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, perwakilan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, perwakilan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, perwakilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ketua KUB Chanos Jaya Kab. Pangkep, dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik.

Efishery merupakan startup aquaculture berbasis teknologi yang berdiri tahun 2013. Efishery hadir untuk mengintegrasikan pembudidaya ikan dan petambak udang dalam super-ecosystem di Indonesia. Dalam rangka mendistribusikan hasil panen terutama dalam bentuk value added, eFishery berminat untuk bekerja sama dalam pemanfaatan Cold Storage Bantuan Pemerintah (CS BP) yang sesuai dengan lokus pengembangan usaha eFishery dengan target pemasaran untuk kota-kota besar. Saat ini eFishery juga sedang mengembangkan fasilitas pengolahan di Medan dan Semarang yang memiliki CS juga untuk meyimpan ikan dimana unit tersebut melayani

kebutuhan hilir baik ekspor maupun domestik untuk komoditas nila, bandeng, udang, dan patin.

Dalam kegiatan ini, dilakukan update perkembangan pemanfaatan CS BP di masing-masing wilayah, antara lain:

a. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba

Terdapat CS BP tahun 2015 kapasitas 50 ton dengan ABF 6 ton dalam kondisi tidak operasional, hal ini dikarenakan pengelola yaitu PT Lontara menyatakan mundur bulan Oktober 2024 lalu dikarenakan biaya operasional Listrik yang cukup tinggi tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan. Selain itu jenis ikan yang tersedia tidak sesuai dengan permintaan pasar. Jenis ikan yang diproduksi di wilayah Bulukumba antara lain ikan layang dan tongkol, sedangkan permintaan pasar adalah udang, cumi, dan lobster. Kondisi CSBP terdapat beberapa kerusakan akibat 2 bulan tidak operasional (instalasi Listrik, mesin, dan bangunan)

Terdapat Koperasi yang berminat untuk mengelola CS BP, akan tetapi menunggu perbaikan kerusakan dilakukan. Dinas sudah berkoordinasi dengan PT Lontara untuk melakukan perbaikan, ditargetkan akhir Desember perbaikan selesai, sehingga awal Tahun 2025 calon pengelola baru dapat mengoperasikan CS BP

b. Kabupaten Selayar

Terdapat CS BP tahun 2015 kapasitas 30 ton dengan ABF 3 ton saat ini dalam kondisi operasional akan tetapi belum melaporkan dikarenakan belum adanya tanda tangan kontrak. Rencana tanda tangan kontrak dilakukan awal Bulan Desember. Jenis ikan yang diproduksi antara lain ikan cakalang, tongkol teri, tembang, dan cumi

c. Kabupaten Sinjai

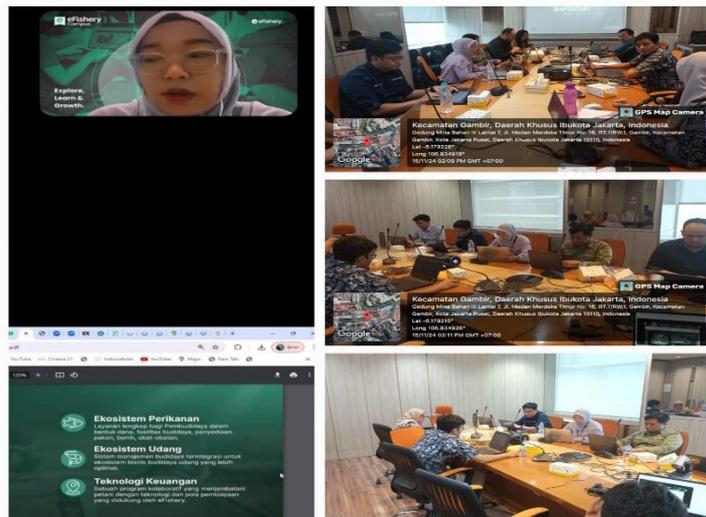
Terdapat CS BP tahun 2015 kapasitas 30 ton dengan ABF 10 ton saat ini dalam kondisi operasional oleh PT Lontara dengan jenis ikan yang diproduksi antara lain ikan peperek, pari, manyung, kurisi, dan lemuru

d. Kabupaten Pangkep

Terdapat Gudang Beku Portabel BP tahun 2023 kapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton. Tahun 2024 didominasi dengan musim kemarau sehingga mitra petambak bandeng banyak beralih ke petambak garam sehingga pemanfaatan BP untuk penyimpanan ikan bandeng berkurang. Kurun waktu Januari-Oktober, BP efektif digunakan untuk penyimpanan di bulan Februari-April, selebihnya hanya sesekali digunakan untuk penyimpanan dan jasa pembekuan udang milik swasta yang kekurangan tempat penyimpanan saat over stok, Jenis komoditas utama di Pangkep antara lain Bandeng, udang, dan ikan nila. Awal bulan November mulai memasuki musim hujan,

- petambak mulai membudidayakan bandeng sehingga prediksi bulan Desember CS akan beroperasi optimal Kembali. Kondisi BP saat ini masih berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan.
- e. Kabupaten Bogor  
Terdapat 2 unit CS BP yaitu kapasitas 15 ton di PIH Cimandala dan di Ciseeng kapasitas 10 ton. Kedua CS dikelola oleh pihak swasta digunakan untuk penyimpanan ikan bahan baku pindang, udang, dan cumi-cumi. Stok ikan keduanya saat ini sekitar 1 ton, menurut informasi tingkat okupansi CS kurang optimal karena sering ikan datang, dalam waktu cepat langsung terjual Kembali. Pemanfaatan CS di Ciseeng kurang optimal juga dikarenakan Lokasi belum bisa dilalui kendaraan roda 4 dikarenakan adanya perbaikan jembatan. Biaya sewa CS di PIH beserta ruang pengolahan sebesar 35 juta rupiah per tahun sedangkan CS di Ciseeng sebesar 20 juta rupiah per tahun.
  - f. Kabupaten Cianjur  
Terdapat CS BP tahun 2016 dengan kapasitas 100 ton dan ABF 2 ton, saat ini dikelola Koperasi Kyanwangi Royal Mandiri sejak tahun 2020. Pengelolaan kurang optimal karena biaya operasional cukup tinggi akan tetapi tidak sebanding dengan omset yang dihasilkan. Komoditas ikan yang disimpan adalah tuna dan cakalang. Kondisi mesin masih baik akan tetapi ABF jarang digunakan karena ikan datang sudah dalam kondisi beku
  - g. PPN Pengambangan  
Terdapat CS BP tahun 2017 dengan kapasitas 200 ton dan ABF 4 ton, dikelola sendiri oleh PPN. Pemanfaatan saat ini kurang optimal karena kondisi mesin sudah waktunya overhaul. Selain itu keterbatasan Tenaga SDM yang ditugaskan di CS juga menjadi kendala. Mekanisme pemanfaatan menggunakan PP 85 tahun 2021 dengan jasa simpan ikan Rp23 per kg per hari, sedangkan biaya pembekuan di ABF Rp699 per kg per hari. Komoditas yang disimpan antara lain lemuru, tongkol, dan layang. PPN sempat mengajukan pemanfaatan dengan mekanisme sewa penuh akan tetapi hasil penilaian KPKNL menurut calon pengelola terlalu tinggi yaitu sebesar 162 juta rupiah per tahun, sedangkan kemampuan calon pengelola di 120 juta rupiah.

## Dokumentasi



Gambar 33. Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Cold Storage melalui Kemitraan Usaha dengan PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery)

### 3.2.7 Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana penyimpanan produk KP”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2024 adalah 10 unit.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 10 unit Sarana penyimpanan produk KP yang disediakan.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

| IKK No | Indikator Kinerja                          | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 7      | Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan | 2024* | 10     | 10        | 100                                  | 10           | 10                  | 100   |
|        |  | 2023  | 17     | 17        | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 17     | 17        | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 9 diatas Capaian indikator Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan pada tahun 2024 adalah sebesar 10 Unit, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 10 Unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 17 Unit atau setara 100% dari target 17 Unit, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -41% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 17 Unit atau setara 100% dari target 17 Unit, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -41% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 10 Unit setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 10 Unit.

Realisasi capaian adalah berupa bantuan beku portable kepada kelompok masyarakat penerima yaitu :

1. Poklahsar Berkah Bersama Kab Subang
2. Poklahsar Putra Barokah Kab Karawang
3. Poklahsar Benteng Laut Kab Bau bau
4. Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari, Jakarta Selatan
5. Koperasi Multi Pihak Catra Karya Nusantara Kab Garur
6. Koperasi Nelayan Indonesia Mina Lestari Kab. Pangandaran
7. Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Rigaih, Aceh Jaya
8. Poklahsar Cimesir, Kab Lebak
9. Koperasi Mina Sari Dewata Kab Karangasem
10. KSU Insan kamil, Tangerang

Untuk mencapai capaian ini dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE.001 Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu sebesar Rp 27.768.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 27.449.918.817,- atau sebesar 98,85% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

## 1. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan Pengadaan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP)

Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan Pengadaan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP) dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 secara daring. Acara dihadiri oleh Pihak penyedia PT. Pura Agro Mandiri, penanggung Jawab Kegiatan Sarana, Bendahara dan perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik

Rapat bertujuan untuk membahas rencana kerja penyedia dan pembahasan draft Surat Pesanan GBP untuk Kabupaten Tangerang, Banten dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender mulai 2 Oktober s.d 15 Desember 2024. Total nilai kontrak adalah sebesar Rp1.900.000.000,- dengan rincian 1 unit GBP 30 ton tanpa ABF yang akan dibayarkan melalui mekanisme pembayaran secara sekaligus.

PT. Pura Agro Mandiri menyampaikan timeline pekerjaan yang akan dimulai dengan kegiatan pabrikasi pada 18 Oktober 2024, pengiriman pada 22 November 2024, instalasi pada 29 November 2024, dan BAST antara 27-31 Desember 2024. Penanggung Jawab Kegiatan Sarana menghimbau agar penyedia dapat mempercepat waktu pekerjaan pada tahapan yang mungkin bisa dilakukan seperti proses pengiriman dan instalasi sehingga BAST dapat dilakukan sebelum 23 Desember 2023.

Pihak penyedia akan mencoba melakukan percepatan saat pabrikasi dan instalasi dengan menambah tenaga kerja sehingga diharapkan dapat serah terima pekerjaan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Bendahara Dit. Logistik menyampaikan ketentuan administratif terkait pencairan anggaran pekerjaan kontraktual ini, jika pekerjaan tidak selesai sebelum 23 Desember 2023 maka pencairan akan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Pihak penyedia harus menyiapkan dokumen tambahan dan mengirimkannya sebelum 17 Desember 2024.

Penandatanganan dokumen kontrak Surat Pesanan Gudang Beku Portable untuk Kab. Tangerang ini dilakukan tanggal 17 Oktober 2024 oleh Pihak penyedia PT. Puro Agro Mandiri dan Direktur Logistik.

## Dokumentasi



Gambar 34. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP)

### 2. Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 secara hybrid di Ruang Lounge Lt. 15 dan zoom meeting. Acara dihadiri oleh Direktur Logistik, Perwakilan Itjen KKP, pihak penyedia PT. Pura Agro Mandiri, Katimja Dukungan Manajerial, Katimja Prasarana dan Sarana, dan perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik. Rapat bertujuan untuk membahas rencana kerja penyedia dan pembahasan draft Surat Pesanan GBP untuk Kabupaten Karangasem, Bali dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 75 hari kalender mulai 2 Oktober s.d 15 Desember 2024.

Total nilai kontrak adalah sebesar Rp2.276.000.000,00, dengan rincian 1 unit GBP 10 ton yang dilengkapi 1 unit ABF 1 ton dengan mekanisme pembayaran akan dilakukan secara sekaligus. PT. Pura Agro Mandiri menyampaikan timeline pekerjaan, spesifikasi dan gambar 3D GBP. Target penyelesaian pekerjaan sebelum tanggal 15 Desember 2024. Dengan terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, maka diperlukan upaya antisipatif terhadap pekerjaan yang selesai menjelang akhir tahun.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, kegiatan kontraktual GBP Karangasem yang ditargetkan pekerjaannya selesai pada tanggal 15 Desember 2024, maka sesuai dengan pasal 18 dalam peraturan ini, SPM-LS kontraktual mulai 15-18 Desember 2024 paling lambat BAST-nya diterima di KPPN 20 Desember (jam kerja), pihak penyedia perlu mengantisipasi konsekuensi yang harus dilakukan jika terjadi kemungkinan keterlambatan kegiatan. Direktur Logistik mengharapkan agar penyedia dapat melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan sehingga target yang dicapai tidak hanya berupa output (terbangunnya

GBP) saja, namun dapat mendorong pemanfaatan GBP oleh koperasi pada Bulan Desember 2024.

PT. Pura Agro Mandiri akan melakukan percepatan pekerjaan agar dapat diselesaikan lebih awal dari target yang ditetapkan dan mengawal tahapan pekerjaan serta kesiapan dokumen kontrak agar rampung sebelum BAST dilaksanakan.

#### Dokumentasi



Gambar 35. Persiapan Pelaksanaan Surat Pesanan Pengadaan Gudang Beku Portable (GBP)

### 3. Monitoring evaluasi pengadaan GBP Tahun 2024

Pelaksanaan Monitoring evaluasi pengadaan GBP Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut ,Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober di lokasi penerima BP GBP Tahun 2024 Poklahsar Berkah Bersama Kabupaten Subang dan Poklahsar Putra Sejahtera Kabupaten Karawang dan dihadiri oleh Direktur Logistik beserta Tim teknis, Kepala Dinas KP terkait, Ketua Kelompok Penerima Bantuan dan Perwakilan PT. Pura Agro Mandiri;

Progres fisik GBP Kabupaten Subang telah mencapai 80%, estimasi waktu uji coba tanggal 13 November 2024. Sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan antara lain, rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung GBP;

Pembayaran penyambungan listrik sudah dilakukan pihak penerima, estimasi listrik tersambung oleh PLN tanggal 8 November 2024. Progres fisik GBP Kabupaten Karawang telah mencapai 81.9%, estimasi waktu uji coba tanggal 11 November 2024. Sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan antara lain, atap rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung GBP. Listrik siap disambung oleh pihak PLN, menunggu atap rumah pelindung selesai dikerjakan. Seluruh estimasi waktu yang direncanakan masih dalam kurun waktu kontrak pengadaan GBP yang berakhir tanggal 9 Desember 2024.

## Dokumentasi



Gambar 36. Monitoring evaluasi pengadaan GBP Tahun 2024

#### 4. Pemeriksaan pekerjaan dan Serah terima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP)

Hasil pemeriksaan pekerjaan dan Serah terima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 14 SD 16 Desember 2024. Bantuan Gudang Beku Portable di Kabupaten Aceh Jaya diberikan kepada Lembaga Adat Panglima Laot yang berlokasi di PPI Rigaih, Lhok Rigaih Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya. Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Rigaih penempatannya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya No.523.5/146/2023 sebagai Panglima Laot Lhok Rigaih Kec. Setia Bakti.

Penyedia GBP di Kab. Aceh Jaya adalah PT. Pura Agro Mandiri dengan nilai kontrak sebesar 2.180.000.000,- dengan spesifikasi pekerjaan berupa: GBP dengan kapasitas 10 ton, ABF 1 ton, Anteroom, Genset, Rumah pelindung dan peralatan pendukung lainnya. Pekerjaan telah terselesaikan dengan baik dan sudah dilakukan uji coba, namun ada kendala tegangan listrik yang kurang stabil, saat ini sedang dikoordinasikan dengan PLN setempat agar dipasang travo baru di dekat GBP supaya tegangan menjadi stabil.

Setelah dilakukan pemeriksaan Gudang Beku Portable 10 ton, ABF 1 ton dan perlengkapannya langsung diserahkan kepada Panglima Laot PPI Rigaih yang disaksikan oleh pengurus Adat Laot dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kab. Aceh Jaya. Lembaga Adat Panglima Laot memiliki anggota sebanyak 200 orang nelayan 200 dan 4 orang toke bangku (Penampung ikan). Berdasarkan data Dinas KPP Kab. Aceh Jaya, terdapat 39 kapal yang mendaratkan ikan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Rigaih terdiri dari Kapal ukuran 5 GT sebanyak 29 unit dan kapal ukuran 10 – 23 GT sebanyak 10 unit. Selain kapal - kapal lokal, juga terdapat kapal –

kapal ukuran 60 – 120 GT dari Lampulo yang menangkap ikan di dekat perairan Aceh Jaya yang kadang mendaratkan ikan di PPI Rigaih.

Hasil tangkapan nelayan antara lain ikan kembung, cakalang, tongkol, layang, tuna dan ikan domersal. Ikan didistribusikan oleh Toke Bangku ke Sibolga dan Medan menggunakan keranjang yang diberi es dan dimuat mobil berpendingin (waktu tempuh 12 jam). Untuk pengiriman ke Banda Aceh biasanya menggunakan kendaraan bak terbuka dengan waktu tempuh 3 – 4 jam.

Dengan Adanya Bantuan Pemerintah berupa Gudang Beku Portable 10 yang dilengkapi ABF 1 ton diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membekukan ikan dan menyimpan ikan sehingga mutu ikan dapat dipertahankan.

### Dokumentasi



Gambar 37. Pemeriksaan pekerjaan dan Serah terima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP)

## 5. Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan dan penandatanganan BAST Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2024

Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan dan penandatanganan BAST Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2024, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Desember 2024 bertempat di Koperasi Produsen Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari. Kegiatan dihadiri oleh Tim Teknis Direktorat Logistik, Perwakilan Inspektorat IV, dan perwakilan penyedia PT. Pura Agro Mandiri, dan Ketua Koperasi Produsen Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari beserta anggota.

Lokasi GBP beralamat di Apartemen Pancoran Riverside, Pengadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Pengadaan GBP telah memenuhi spesifikasi sesuai Surat Pesanan, Suhu mencapai  $-20^{\circ}$  dalam waktu dua jam, Pengadaan peralatan pendukung telah memenuhi kuantitas dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam

Surat Pesanan, Telah dilakukan pelatihan terhadap 2 teknisi yg diajukan oleh pihak Koperasi.

Telah disampaikan juga kewajiban penerima bantuan pemerintah GBP yang meliputi:

- a. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Gudang Beku Portabel Tahun 2024 dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Tidak memperjualbelikan atau memindahtangankan serta menjadikan agunan pinjaman barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Gudang Beku Portabel Tahun 2024 dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
- c. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Gudang Beku Portabel Tahun 2024 dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur Logistik dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Siap diberikan sanksi berupa penarikan Bantuan Pemerintah apabila memanfaatkan tidak sesuai peruntukannya kecuali dalam keadaan tertentu dengan seizin Kepala Dinas terkait, tidak mengoperasikan/memanfaatkan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

#### Dokumentasi



Gambar 38. Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan dan penandatanganan BAST Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2024

## 1.2.8 Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP”

### Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

| IKK No | Indikator Kinerja                                    | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 8      | Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan | 2024* | 5      | 5         | 100                                  | 5            | 5                   | 100   |
|        |  | 2023  | 20     | 20        | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 10     | 10        | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 10 Capaian indikator Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan pada tahun 2024 adalah sebesar 5 Unit, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 5 Unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 20 Unit atau setara 100% dari target 20 Unit, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -300% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 10 Unit atau setara 100% dari target 10 Unit, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -100% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 5 Unit setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 5 Unit.

Realisasi capaian adalah berupa bantuan kendaraan berefrigerasi kepada kelompok masyarakat penerima yaitu :

1. Koperasi Produsen Tuna Selat Malaka ,Aceh Utara
2. Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya Kab, Halmahera Selatan
3. Koperasi Produsen Sinergi Pindang Jaya Bahari, Jakarta Selatan
4. Koperasi Produsen Lintas Maluku Utara, Pulau Morotai
5. Maju Bersama Abadi, Kab. Kebumen

Untuk mencapai Indikator Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG.002 Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit) sebesar Rp4.320.000.000,-

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 4.222.467.026,- atau sebesar 97,74% terhadap pagu . Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

#### **1. Pembahasan Adendum Surat Pesanan (SP) Kendaraan Berefrigerasi (KR)**

Pembahasan Adendum Surat Pesanan (SP) Kendaraan Berefrigerasi (KR) pada tanggal 16 Oktober 2024 secara daring. Acara dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana dan dihadiri oleh pihak penyedia PT. Karya Zirang Utama dan PT. Duta Cemerlang Motor, Bendahara Pengeluaran, perwakilan Timja Pengelolaan BMN dan PBJ dan Timja Lingkup Dit. Logistik.Tujuan rapat Pembahasan adendum SP Kendaraan Berefrigerasi dengan pihak penyedia.

Pembahasan adendum dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu rapat I dengan PT. Duta Cemerlang Motor, dan rapat II dengan PT. Karya Zirang Utama.Dasar pertimbangan pelaksanaan adendum adalah adanya pencermatan Itjen KKP terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan KR oleh pihak penyedia, dimana waktu yang dimaksud mencakup waktu mulai pekerjaan sampai serah terima pada penerima.

Direktorat Logistik mengharapkan agar penyedia melakukan penyesuaian waktu sesuai adendum, dan jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kondisi yang berada diluar kendali penyedia maka pihak penyedia dapat mengajukan pengajuan perpanjangan waktu dengan melampirkan dokumen persyaratan yang ditentukan.

Pengadaan KR untuk Kab. Morotai dan Kab. Jakarta Selatan, pengiriman dan serah terima barang yang awalnya 31 Desember 2024 berubah menjadi 15 Desember 2024. Pengadaan KR untuk Kab. Garut

dan Kab. Pangandaran, pengiriman dan serah terima barang yang awalnya 31 Desember 2024 berubah menjadi 25 Desember 2024.

PT. Duta Cemerlang Motor mengkonfirmasi peluang keterlambatan yang dapat terjadi terkait penyelesaian pekerjaan seperti kendala administratif dan penyediaan chasis, namun tetap berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya.

#### Dokumentasi



Gambar 39. Pembahasan Adendum Surat Pesanan (SP) Kendaraan Berefrigerasi (KR)

## 2. Pembahasan atas Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024

Pembahasan temuan sementara atas Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024 oleh Inspektorat IV, Itjen KKP pada hari Rabu 20 November 2024 yang dilakukan secara daring, Rapat dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana dan dihadiri perwakilan dari Inspektur IV.

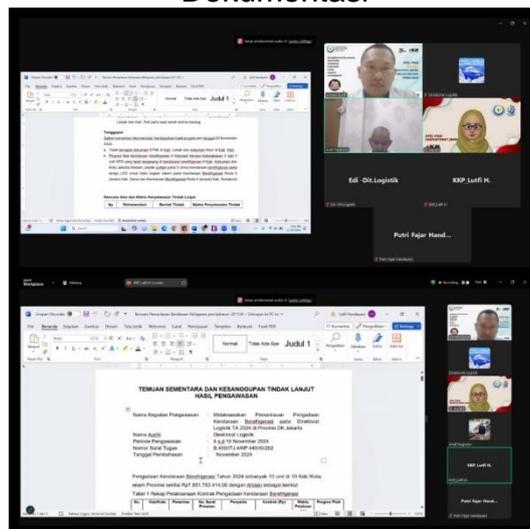
Beberapa temuan terkait dengan pengadaan Kendaraan Berefrigerasi tahun 2024 yaitu: terdapat 3 (tiga) koperasi yang belum memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), yaitu: a. Koperasi Konsumen Santo Pindang Jaya Bahari, Kota Jakarta Selatan; b. Koperasi Produsen Lintas Maluku Utara, Kab. Morotai; c. Koperasi Produsen Tuna Selat Malaka, Kab. Aceh Utara. Belum terpasangnya GPS sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan jadwal untuk kendaraan berefrigerasi Kab. Garut.

Belum adanya surat-surat kendaraan yang telah dikirimkan ke lokasi, yaitu Keur kendaraan berefrigerasi Kab. Lebak; belum dilakukannya testing suhu dan pelatihan operasionalisasi kendaraan

berefrigerasi dengan dilengkapi Berita Acara kendaraan berefrigerasi Kab. Lebak dan Kab. Pati pada saat serah terima barang. pengadaan kendaraan berefrigerasi mendukung korporasi Belum disertai dengan surat penetapan oleh perikanan tangkap.

Inspektorat IV, Itjen KKP merekomendasikan beberapa hal terkait dengan temuan tersebut, yaitu: PPK Satker Direktorat Logistik agar menginstruksikan kepada Koperasi Konsumen Santo Pindang Jaya Bahari di Kota Jakarta Selatan, Koperasi Produsen Lintas Maluku Utara di Kab. Morotai dan Koperasi Produsen Tuna Selat Malaka di Kab. Aceh Utara melengkapi sertifikat NIK. Direktur Logistik selaku PPK agar: menginstruksikan kepada PT Karya Zirang Utama untuk melakukan proses pengiriman dan pemasangan GPS sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan jadwal untuk kendaraan berefrigerasi di Kab. Garut. Direktur Logistik selaku PPK agar menginstruksikan PT Duta Cemerlang Motors untuk melengkapi surat-surat kendaraan yang telah dikirimkan ke lokasi, yaitu Keur kendaraan berefrigerasi Kab. Lebak; dan melakukan testing suhu dan pelatihan operasionalisasi kendaraan berefrigerasi dengan dilengkapi Berita Acara kendaraan berefrigerasi Kab. Lebak dan Kab. Pati pada saat serah terima barang. Direktur Logistik selaku PPK agar bersurat kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap untuk menetapkan 5 (lima) Koperasi di lokasi Kab. Pati, Kab. Lebak, Kab. Garut, Kab. Pangandaran dan Kab. Sukabumi untuk dibina menjadi Korporasi.

#### Dokumentasi



Gambar 40. Pembahasan atas Pemantauan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi pada Direktorat Logistik TA 2024

### 3. Pre Delivery Inspection (PDI) atau Pengecekan Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi (KR)

Pre Delivery Inspection (PDI) atau Pengecekan Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi (KR) oleh Karoseri CV. Delima Mandiri, Sentul Bogor pada tanggal 22 November 2024. Hasil pengecekan sebagai berikut:

- a. PDI pengadaan KR dilakukan oleh Timja Prasarana dan Sarana dengan pendampingan oleh auditor dari Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal KKP.
- b. PDI dilakukan terhadap 5 unit KR dengan tujuan penerima Kab. Garut, Kab. Pangandaran, Kota Jakarta Selatan, Kab. Sukabumi dan Kab. Kebumen.
- c. Hasil pemeriksaan pada 4 unit KR sudah lengkap dan 1 unit belum terpasang GPS
- d. Pemasangan GPS akan dilaksanakan maksimal hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.
- e. Seluruh unit KR akan dikirimkan ke lokasi penerima setelah SRUT terbit.
- f. Catatan dari Itjen KKP: pemasangan sticker pemantul cahaya tambahan (APCT) agar disesuaikan dengan regulasi Kemenhub.

#### Dokumentasi



Gambar 41. Pre Delivery Inspection (PDI) atau Pengecekan Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi (KR)

#### **4. Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024**

Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024 berupa Kendaraan Berefrigerasi yang dilaksanakan pada Jumat, 22 November 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati . Kegiatan dihadiri oleh Direktur Logistik beserta Tim teknis, perwakilan Dinas KP terkait, perwakilan penyedia PT. Duta Cemerlang Motor dan Ketua Koperasi penerima bantuan.

Tujuan : Melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan persuratan (STNK, Keur, Plat Nomor, Buku manual, Buku Garansi dll); Perlengkapan Mobil (audio system, antenna, ban Cadangan, dongkrak, kunci, pemadam kebakaran, dll) ; Perlengkapan Pendingin (compressor, condensor, evaporator dll) dan melakukan pengecekan operasional mesin pendingin dan mobil.

Pihak kedua (KUD) menyetujui kewajiban:

- a. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Menyediakan biaya operasional dan perawatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6;
- d. Tidak memindahtangankan, memperjualbelikan dan tidak menjadikan agunan pinjaman barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
- e. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur Logistik dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- f. bersedia untuk mengalihkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 yang diterima atas persetujuan

PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan.

Melakukan penandatanganan BAST oleh penerima bantuan yaitu KUD Mitra Nelayan Samudera dengan Detail KR Roda 6:

- a. Jenis kendaraan: Hino 300 115 HD
- b. Nomor polisi: K 8547 MS
- c. Nomor rangka: MJECCA0F7R5023097
- d. Nomor mesin: N04CWVJ16487
- e. Jenis BP: Kendaraan berefrigerasi roda 6
- f. Nilai BP: Rp838.785.590
- g. Penerima: KUD Mitra Nelayan Samudera sebagaimana Keputusan PPK Direktorat Logistik Nomor B.14/DJPDSPKP.3/PL.420/HK.150/VIII/2024

#### Dokumentasi



Gambar 42. Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024

#### 5. Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024

Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024 berupa Kendaraan Berefrigerasi yang dilaksanakan pada Sabtu 30 November 2024 di Dinas Perikanan Kab. Lebak, Kegiatan dihadiri oleh Direktur Logistik beserta tim teknis, Kepala Dinas Perikanan Kab. Lebak beserta jajaran, dan Ketua Koperasi penerima bantuan.

Tujuan : Melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan persuratan (STNK, Keur, Plat Nomor, Buku manual, Buku Garansi dll);

Perlengkapan Mobil (audio system, antenna, ban Cadangan, dongkrak, kunci, pemadam kebakaran, dll) ; Perlengkapan Pendingin (compressor, condensor, evaporator dll) dan melakukan pengecekan operasional mesin pendingin dan mobil.

Pihak kedua (Koperasi) menyetujui kewajiban:

- a. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Menyediakan biaya operasional dan perawatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6;
- d. Tidak memindahtangankan, memperjualbelikan dan tidak menjadikan agunan pinjaman barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
- e. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur Logistik dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- f. bersedia untuk mengalihkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 6 yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan.

Melakukan penandatanganan BAST oleh penerima bantuan yaitu Koperasi Mina Muara Sejahtera.

- a. Detail KR Roda 6:
- b. Jenis kendaraan: Hino 300 115 HD
- c. Nomor polisi: A 8450 QA
- d. Nomor rangka: MJECCA0F9R5023098
- e. Nomor mesin: N04CWVJ16489
- f. Jenis BP: Kendaraan berefrigerasi roda 6
- g. Nilai BP: Rp846.479.084
- h. Penerima: Koperasi Mina Muara Sejahtera sebagaimana Keputusan PPK Direktorat Logistik Nomor B.14/DJPDSPKP.3/PL.420/HK.150/VIII/2024

## Dokumentasi



Gambar 43. Pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024

### 1.2.9 Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

| IKK No | Indikator Kinerja                                   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 9      | Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) | 2024* | 5      | 5         | 100                                  | 5            | 5                   | 100   |
|        |   | 2023  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 11 diatas Capaian indikator Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) pada tahun 2024 adalah sebesar 5 Unit, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 5 Unit. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 5 Unit setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 5 Unit.

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG.006 Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) sebesar Rp4.320.000.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 4.317.159.513,- atau sebesar 99,93% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

### **1. Adendum Surat Pesanan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi tahap 1**

Rapat di pimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana di hadiri oleh perwakilan Inspektorat IV KKP, perwakilan PT. Duta Cemerlang Motors, perwakilan Tim Kerja Hukum-Setditjen PDSPKP, perwakilan Tim Kerja lingkup Dit. Logistik, dan pelaksana Timja Prasarana dan Sarana. Berdasarkan :

- a. Surat Pesanan nomor 92/DJPDSPKP.0/PL.420/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024,
- b. Addendum Surat Pesanan Nomor 347/DJPDSPKP.0/PL.420/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
- c. Surat PT Duta Cemerlang Motors Nomor DCM-GSO/HN-01/XI-24/001 tanggal 11 November 2024 perihal permohonan perpanjangan masa kontrak.

Telah melakukan pembahasan rencana perubahan Surat Pesanan nomor 92/DJPDSPKP.0/PL.420/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 Addendum Surat Pesanan Nomor 347/DJPDSPKP.0/PL.420/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pengadaan 2 Unit Kendaraan Berefrigerasi Tahap 1 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Usulan addendum merupakan usulan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penambahan waktu tersebut sebagai kompensasi atas keterlambatan penyerahan berkas-berkas dari calon penerima bantuan untuk pengurusan surat-surat kendaraan (STNK dan Keur) oleh penyedia.
- c. Berdasarkan analisa keterlambatan penyerahan berkas dari calon penerima, maka diberikan kompensasi penambahan waktu penyelesaian pekerjaan selama 14 hari kalender.
- d. Apabila setelah diberikan tambahan waktu tersebut namun pekerjaan belum selesai, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam surat pesanan.
- e. Detail perubahan akan di tuangkan dalam Addendum Surat Pesanan

## Dokumentasi



Gambar 44. Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi

## 2. Cek Fisik dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024

Cek Fisik dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Tahun 2024 berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 yang dilaksanakan pada Kamis 5 Desember 2024 di Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera, Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajaran, Perwakilan Direktorat Logistik dan Ketua Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya selaku penerima bantuan.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan persuratan (STNK, Keur, Plat Nomor, Buku manual, Buku Garansi dll);
- b. Perlengkapan Mobil (audio system, antenna, ban Cadangan, dongkrak, kunci, pemadam kebakaran, dll);
- c. Perlengkapan Pendingin (compressor, condensor, evaporator dll) dan
- d. Melakukan pengecekan operasional mesin pendingin dan mobil.

Pihak kedua (Koperasi) menyetujui kewajiban :

- a. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.;
- b. Tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 dari PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Menyediakan biaya operasional dan perawatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4;

- d. Tidak memindahtangankan, memperjualbelikan dan tidak menjadikan agunan pinjaman barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
- e. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur Logistik dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- f. bersedia untuk mengalihkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa Kendaraan Berefrigerasi Roda 4 yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan.

Melakukan penandatanganan BAST oleh penerima bantuan yaitu Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya.

- a. Profil Kendaraan Berefrigerasi :
- b. Jenis kendaraan: Hino 300 115 HD
- c. Nomor polisi: DG 8832 PA
- d. Nomor rangka: MJECCA4F6R5003201
- e. Nomor mesin: N04CWVJ16337
- f. Jenis BP: Kendaraan berefrigerasi roda 4
- g. Nilai BP: Rp735.564.950,-
- h. Penerima: Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya sebagaimana Keputusan PPK Direktorat Logistik Nomor B.14/DJPDSPKP.3/PL.420/ VIII/2024

### 3.2.10 Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang”

#### Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2024 adalah 8 (delapan) Lembaga. Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 10     | Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina | 2024* | 8      | 8         | 100                                  | 8            | 8                   | 100,00  |
|        |  | 2023  | 7      | 7         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 10     | 10        | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 12. diatas, menunjukan bahwa Capaian indikator Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina pada tahun 2024 adalah sebesar 8 Lembaga, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 8 Lembaga. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 7 Lembaga atau setara 100% dari target 7 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 12,5% .Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 10 Lembaga atau setara 100% dari target 10 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -25% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 8 Lembaga setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 8 Lembaga.

Lembaga yang difasilitasi resi gudang Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Perumda Karya Lasinrang, Pinrang
- 2) CV. Anugerah agung Global, Palopo
- 3) Koperasi Adi Luwung, Luwu Timur
- 4) PT Berkah Aneka Laut, Pasuruan
- 5) PT Kebula Raya Bestari, Bogor
- 6) Koperasi Bahari Indah Perkasa, Pasuruan
- 7) PT Xinhai Yuan, Kubu Raya
- 8) PT Hasil Laut Sejati, Batam

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu sebesar Rp 402.783000,-

.Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 402.725.249,- atau sebesar 99,99% terhadap pagu.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

### **1. Koordinasi dan Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan dan Rumput Laut sebagai Solusi Pembiayaan**

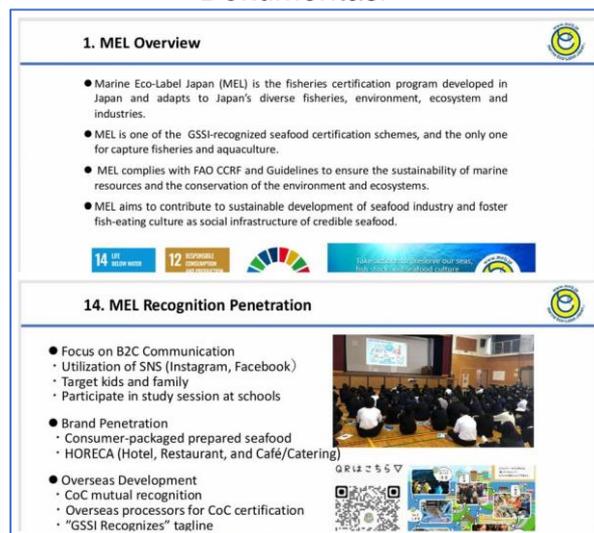
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober secara daring melalui aplikasi zoom meeting, dipimpin oleh Katimja Pemantauan dan dibuka oleh Direktur Logistik. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari; Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK BAPPEBTI, DKP Prov. Kalimantan Timur, DKP Prov. Kalimantan Utara, DKP Prov. Kalimantan Barat, DKP Kota Tarakan, DKP Kota Singkawang, DKP Kab. Sambas, DKP Kab. Kubu Raya, UPTD BPMPP Kalimantan Timur, Dit. PU, Dit. Pengolahan, dan Timja Pemantauan.

Hal-hal yang dibahas:

- a. Rencana Pengembangan SRG di Kalimantan Timur: Saat ini belum ada perusahaan di Kalimantan Timur yang menerapkan SRG untuk komoditas ikan dan rumput laut.
- b. Mekanisme pengembangan SRG akan dimulai dengan sosialisasi kepada pelaku usaha, yang melibatkan identifikasi pelaku usaha terkait legalitas, potensi komoditas, sarana dan prasarana, serta keterlibatan lembaga pembiayaan.
- c. DKP akan berkoordinasi dengan Disperindag untuk memperluas edukasi dan identifikasi di wilayah binaan.
- d. Penerapan SRG pada ikan memerlukan standar penyimpanan yang ketat untuk menjaga mutu, mengingat ikan adalah komoditas yang mudah rusak.
- e. Penyimpanan ikan di gudang SRG dapat dilakukan antara 6 bulan hingga 1 tahun, namun mutu komoditas harus diuji terlebih dahulu.
- f. SRG berfungsi sebagai manajemen stok yang membantu UPI dalam memenuhi kontrak dengan buyer dan menyimpan produk sampai jadwal ekspor.
- g. SRG memberikan kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha sehingga mereka tidak harus menggunakan modal mandiri untuk menyimpan stok.
- h. Pemilik barang tidak dapat bertindak sebagai pengelola gudang yang menerbitkan resi gudang untuk dirinya sendiri. Pengelola gudang dapat berfungsi sebagai penguji mutu untuk

- mempercepat penerbitan SRG, terutama di daerah yang kekurangan LPK (Lembaga Penguji Kualitas).
- i. Pengelola gudang dapat bertindak sebagai offtaker atau perantara dalam penjualan barang, namun hal ini rentan risiko jika terdapat konflik kepentingan.
  - j. Barang dapat disimpan sesuai dengan umur simpan yang ditentukan dari hasil uji mutu. Harga jual produk akan mempertimbangkan biaya penyimpanan yang dikeluarkan. Jika harga pasar tidak membaik, pengelola gudang SRG dapat merekomendasikan pengambilan barang untuk mendukung program-program seperti program distribusi atau konsumsi pemerintah.
  - k. Format neraca standar untuk pelaporan keuangan pengelola gudang SRG masih belum ada, namun laporan neraca minimal 3 bulan terakhir perlu dilampirkan. Gudang Pengepul biasanya sederhana dengan bahan pembatas seperti seng, sementara Gudang SRG harus memenuhi standar inspeksi dan layak sebagai tempat penyimpanan komoditas dengan perlakuan khusus.

## Dokumentasi



Gambar 45. Koordinasi dan Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan dan Rumput Laut sebagai Solusi Pembiayaan

## 2. Pembahasan pemutakhiran petunjuk teknis Sistem Resi Gudang (SRG)

Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pemberdayaan Usaha, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan

PLK, BAPPEBTI, Koordinator Hukum Ditlog, Koordinator Data Ditlog, Timja Lingkup Direktorat Logistik dan pelaksana Tim Kerja Pemantauan. Tujuan dilaksanakan Rapat pembahasan Juknis SRG dalam rangka menjaring masukan guna penyempurnaan isi petunjuk teknis Sistem Resi Gudang

Beberapa point penting dan saran perbaikan pembahasan Juknis SRG diantaranya :

- a. Stakeholder yang akan menggunakan Juknis SRG ini mencakup pemerintah (dalam hal ini KKP dan Bappebti Kemendag serta Dinas terkait), Lembaga Pengelola Gudang SRG, dan Pelaku Usaha KP.
- b. Juknis sebaiknya dibedakan berdasarkan komoditas yaitu Juknis untuk SRG Ikan dan Juknis untuk SRG Rumput Laut agar lebih fokus pembahasannya.
- c. Juknis disusun dalam format yang mudah dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dan dapat digambarkan secara infografis.
- d. Perlunya menambahkan bab terkait pengusulan komoditas baru dan pengawasan SRG dalam juknis.

#### Dokumentasi



Gambar 46. Pembahasan pemutakhiran petunjuk teknis Sistem Resi Gudang (SRG)

### 3. Pembahasan Finalisasi Petunjuk Teknis Sistem Resi Gudang (SRG)

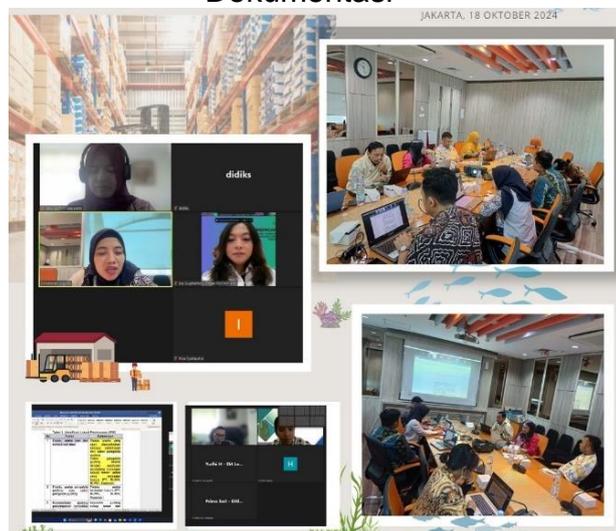
Dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pemberdayaan Usaha, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK, BAPPEBTI, Koordinator Hukum Ditlog, Koordinator Data Ditlog, Timja Lingkup Direktorat Logistik dan pelaksana Tim Kerja

Pemantauan. Rapat dilaksanakan dalam rangka finalisasi petunjuk teknis Sistem Resi Gudang ikan dan rumput laut.

Beberapa point penting dan saran perbaikan pembahasan Juknis SRG diantaranya :

- a. pada bagian koordinasi dengan bappebti semula implementasi pengelola gudang SRG menjadi ketersediaan lembaga SRG
- b. Merubah koordinasi terkait prosedur teknis skema SRG dan kerjasama program menjadi menyusun rencana aksi percepatan implementasi SRG komoditas kelautan dan perikanan
- c. Penyesuaian kalimat memantau transaksi resi gudang secara berkala menjadi memperoleh informasi transaksi resi gudang komoditas kelautan dan perikanan secara berkala
- d. menambahkan point baru yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SRG sesuai dengan ketentuan
- e. pada bagian Sosialisasi terdapat reformulasi bahasa pelaku usaha ikan dan rumput laut dengan keterangan pelaku usaha yang akan diproyeksikan sebagai penyimpan dan calon pengelola Gudang
- f. Pelaku usaha pengelola gudang atau calon pengelola gudang merupakan pelaku jsaha berbadan hukum (PT, BUMN, BUMD dan koperasi)

#### Dokumentasi



Gambar 47. Pembahasan Finalisasi Petunjuk Teknis Sistem Resi Gudang (SRG)

#### **4. Monitoring implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Ikan dan Rumput Laut serta Identifikasi Calon Pengelola SRG di kota Tarakan, Kalimantan Utara**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Oktober 2024 dengan hasil – hasil sebagai berikut :

##### **PT. Sabindo Raya Gemilang**

- a. Pengelola gudang SRG ikan dengan persetujuan BAPPEBTI No. 06/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/03/2023 beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek TPI Kelurahan Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- b. Memiliki kapasitas gudang beku 300 ton (2 room) dengan stok ikan perbulan rata-rata 60 ton bandeng, 20 ton udang, dan 10 ton ikan lainnya
- c. Tujuan pemasaran ke Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, Korea, China, UEA, UE, USA
- d. Sampai saat ini belum pernah menerbitkan resi gudang karena:
  - Para pembudidaya bandeng lebih memilih pembayaran secara cash dari UPI
  - Ada budaya dalam masyarakat setempat untuk melakukan transaksi perdagangan dengan cara cash, dan paradigma bunga bank adalah riba.
  - Bandeng tidak pernah sampai berlimpah, sehingga tidak pernah menyimpan barang dalam jangka waktu lama, serta harga relatif stabil (tidak ada fluktuasi harga yang ekstrim). Bandeng bukan merupakan komoditas utama di Tarakan
  - Fluktuasi harga bandeng antara Rp8.000-Rp18.000, saat ini harga di pasar Rp10.000-Rp15.000

##### **PT. Tarakan Fisherindo Sipatuo**

- a. Pengelola gudang SRG ikan yang telah mendapat persetujuan BAPPEBTI Nomor 61/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/07/2022, yang beralamat di Jl. Pangeran Aji Iskandar Gang Kurau RT 15 Kelurahan Juata Laut , Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kaltara.
- b. Memiliki kapasitas gudang kapasitas 80 ton (1 room) dengan stok per bulan rata-rata 60 ton (dengan komoditas utama bandeng, dan udang).
- c. Pemasaran produk ke Malaysia, Taiwan, China. Dan belum pernah juga menerbitkan resi gudang karena terkendala hal yang sama dengan PT Sabindo Raya Gemilang.

##### **PT Bunga Laut Samudra Jaya**

- a. Telah menjadi pengelola gudang SRG rumput laut dengan nomor persetujuan Bappebti nomor 03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/03/2024. Beralamat di Jl. Binalatung RT. 12 Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Kaltara.
- b. Memiliki gudang rumput laut kering dengan kapasitas 150 ton dengan pemasaran tujuan lokal ke Makasar dan Surabaya.
- c. Sampai saat ini belum menerbitkan resi gudang karena terkendala belum mendapatkan kepercayaan dari Bank/lembaga pembiayaan nonbank dan memiliki riwayat yang kurang baik dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK/BI Checking)

PT. Adi Putra Laut

- a. Sebagai calon pengelola gudang SRG rumput laut yang sedang dilakukan pendampingan oleh Dit Logistik sejak bulan Juli 2024
- b. PT Adi Putra Laut telah bermitra dengan pengusaha rumput laut Hj. Darmina yang memiliki gudang rumput laut kapasitas 300 ton yang akan dipergunakan untuk implementasi SRG yang berlokasi di Pantai Amal, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kaltara. Sedangkan PT Adiputra memiliki domisili usaha rumput laut di Jl. Ra Besing, Kab. Nunukan, Kaltara.
- c. Volume penjualan rumput laut rata-rata 10-50 kontainer (100-500 ton) per bulan, untuk dipasarkan ke Makasar dan Surabaya.
- d. Progress untuk menjadi pengelola gudang SRG sedang melakukan pengurusan perijinan diantaranya TDG dan SKP.
- e. Fluktuasi harga rumput laut antara Rp12.500-Rp43.000, harga normal Rp15.000-16.000

PT Mustika Minanusa Aurora

- a. Belum menjadi pengelola gudang SRG namun telah memiliki kelengkapan dokumen: TDG, SKP, dan HACCP yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran sebagai pengelola gudang SRG.
- b. Beralamat di Jl. Perikanan No. 47 Karangrejo, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kaltara dengan memiliki gudang kapasitas 450 ton (6 room)
- c. Stok per bulan rata-rata 350 ton untuk udang, kepiting dan ikan lainnya dengan tujuan pemasaran produk ke Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapura, Eropa, USA.
- d. Dari hasil diskusi diungkapkan bahwa musim puncak kelimpahan udang adalah di bulan November (tercatat di bulan Agustus ada transaksi sebanyak 195 ton, dan naik di bulan September menjadi 303 ton), sedangkan musim paceklik ada di bulan Januari-Februari.

## Dokumentasi



Gambar 48. Monitoring implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Ikan dan Rumput Laut serta Identifikasi Calon Pengelola SRG di kota Tarakan

### 5. Pemantauan STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kalimantan Barat

Pemantauan STELINA dan SRG dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2024, dalam rangka melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan dan identifikasi serta permasalahan implementasi ketertelusuran dan logistik ikan nasional dan sistem resi gudang di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

#### Kunjungan ke PT. Pulaumas Khatulistiwa

- a. PT Pulaumas Khatulistiwa merupakan UPI dengan komoditas yang dihasilkan adalah Udang Vaname. Kapasitas optimum pabrik adalah 5 (lima) ton, sedangkan saat dilakukan survei kapasitas produksi adalah 1 (satu) ton.
- b. Tujuan pemasaran PT. Pulaumas sebagian besar ke Singapura, Tiongkok dan Australia dan selebihnya ke pasar dalam negeri;
- c. Dibandingkan pada dekade tahun awal tahun 2000-an jumlah UPI Udang mengalami penurunan secara drastis yang semula tercatat sebanyak 13 UPI sekarang tinggal 1 UPI yaitu PT. Pulaumas.
- d. Terkait ketertelusuran diharapkan dapat melakukan ketertelusuran internal dan eksternal secara baik dengan mencatatkan asal bahan baku dan pencatatan hasil proses

produksi serta tujuan pemasaran mulai dari nama pembeli, tujuan pemasaran dan armada serta jasa logistik yang digunakan

#### Kunjungan PO Sembilan-Sembilan

- a. PO Sembilan-sembilan merupakan pelaku usaha cold storage dengan kapasitas cold storage sebesar 100 ton;
- b. PO sembilan-sembilan mendapatkan bahan baku berasal dari PPN Pemangkat Kabupaten Sambas dan distribusikan atau di jual di wilayah Kalimantan Barat seperti Kota Singkawang, Sanggau, Sintang dan Sekadau.
- c. Jenis ikan yang ada di cold storage didominasi oleh layang, tongkol dan cakalang, serta tenggiri. Dalam satu minggu total ikan yang dijual atau didistribusikan oleh PO Sembilan-Sembilan sebanyak 5 (lima) ton, dibandingkan dengan dengan tahun yang lalu penjualan relatif mengalami penurunan

#### Kunjungan ke PO Ponti Nelayan

- a. PO Ponti Nelayan merupakan pelaku usaha cold storage yang berlokasi di pasar terbesar di Pontianak yaitu Pasar Flamboyan
- b. Kapasitas cold storage PO Ponti Nelayan adalah 600 ton dan telah dilengkapi sertifikat SKP Kategori B yang terbit pada tahun 2023;
- c. Jenis ikan yang disimpan di cold storage didominasi oleh ikan laut seperti Tongkol, Cakalang dan Layang, sedangkan ikan tawar adalah ikan nila merah.
- d. Harga jual cakalang Rp.16.000/kg, tongkol Rp.21.000/kg, Kembung Perempuan Rp.40.000/kg, kembung laki Rp. Rp.35.000/kg, Sotong Rp. 60.000/kg, Bawal Rp.40.000/kg dan Layang Rp. 18.000/kg, serta nila Rp.25.000/kg;
- e. Suplai ikan sebagian besar berasal dari PPN Pemangkat Kabupaten Sambas. Pada bulan Mei 2024 PO Ponti Nelayan mendapatkan suplai ikan berasal dari Sumatera Utara dan Pulau Jawa.
- f. Pada bulan Desember 2024 diperkirakan terjadi peningkatan permintaan untuk jenis ikan terutama jenis tongkol dan senangin, sedangkan pada bulan Haji (Dzulhijjah) musim pernikahan jenis ikan yang mengalami peningkatan adalah tongkol dan Cakalang, sedangkan pada Hari Raya Imlek (Tahun Baru China) jenis ikan yang mengalami peningkatan permintaan adalah Senangin, Kakap, dan Bawal Putih.
- g. Untuk ikan – ikan dari perairan umum, PO Ponti Nelayan tidak melakukan stok ikan. Kendala ketidakadanya stok ikan di cold storage dikarenakan ikan dari perairan umum cepat mengalami penurunan mutu dibandingkan dengan ikan laut.

#### Kunjungan ke Xinhaiyuan

- a. PT, Xinhaiyuan merupakan PMA yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
- b. Kapasitas cold storage dimiliki perusahaan adalah 150 ton dengan masing-masing ruang 50 ton, kondisi saat ini 1 (satu) ruangan tidak digunakan karena rusak.
- c. Total stok ikan pada saat kunjungan sebesar 14,91 ton yang terdiri dari Tenggiri 0,51 ton, Layur 6,44 ton, Gurita 0,10 ton, Sotong 2,24 ton cumi 3,05 ton dan Udang 2,57 ton. Harga Tenggiri adalah Rp.55 ribu/kg, Layur Rp. 25 ribu/kg, Sotong Rp. 55 ribu/kg dan udang Rp. 80 ribu/kg
- d. Asal bahan baku ikan laut dan udang berasal dari Kabupaten Sambas dengan pemasaran ke Tiongkok via Jakarta.
- e. Xinhaiyuan belum menerapkan ketertelusuran, walaupun ikan yang diproduksinya di ekspor ke Tiongkok, sehingga ikan yang didistribusikan ke Jakarta, Xinhaiyun tidak diminta untuk menyertakan sertifikat asal saat komoditas di ekspor
- f. Kendala dalam proses sebagai pengelola resi gudang yang dihadapi oleh xinhaiyuan adalah penambahan KBLI pada perusahaan yang mengharuskan perubahan akte pendirian perusahaan. Terkait dengan hal tersebut PT. Xinhaiyuan berencana mendirikan anak perusahaan yang akan diajukan sebagai pengelola resi gudang

#### Koordinasi dengan DKP Provinsi Kalimantan Barat dan DKP Kota Singkawang

- a. Terkait dengan program makan bergizi gratis DKP Kalimantan Barat dan DKP Kota Singkawang telah diundang rapat oleh Kepolisian dan Angkatan Darat terkait dengan ketersediaan stok ikan untuk mendukung program;
- b. Adanya revisi terkait Peraturan Pemerintah tentang Cadangan Pangan Pemerintah yang tidak membatasi jenis ikan hanya TTC, Kembung dan Bandeng, memberikan kesempatan bagi daerah untuk menyediakan ikan dalam program makan bergizi gratis sesuai dengan jenis ikan yang tersedia di daerah tersebut;
- c. Diharapkan DKP Provinsi Kalimantan Barat dapat mendukung pelaksanaan STELINA dengan mensosialisasikan perubahan PermenKP STELINA yang mewajibkan setiap pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengimplementasiikan STELINA baik pengolah, pemasar, nelayan, pembudidaya ikan maupun pelaku usaha distribusi, karena adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan dimaksud;

## Dokumentasi



Gambar 49. Pemantauan STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kalimantan Barat

### 6. Pembukaan Bulan Literasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 dalam rangka Optimalisasi Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang Komoditas Dalam Mendukung Penguatan Pasar Dalam Negeri Dan Peningkatan Ekspor . Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan Pemahaman informasi terkait SRG dan Pasar Lelang Komoditas untuk penguatan pasar domestik serta meningkatkan Daya Saing Komoditas untuk Pasar Ekspor.

Pertemuan dilaksanakan secara luring bertempat di Hotel Horison Ciledug Tangerang dan daring dihadiri oleh Bapak Kepala Bappebti yang hadir secara online eselon II Lingkup Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, KKP, Kemenkeu, Bappenas, Kementan, Kemenperin, dan Kemenkop, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Direktur Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, Ketua Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, Para pimpinan pelaku usaha SRG dan PLK, Para pimpinan Lembaga Pembiayaan Bank dan non Bank.

Narasumber dan tema paparan :

- a. Optimalisasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Dalam Mendukung Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Peningkatan Ekspor oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK - BAPPEBTI Kemendag.
- b. Strategi Pembentukan Ekosistem Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas oleh Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

- c. Model Perdagangan Komoditas melalui Pasar Lelang : Mekanisme Perdagangan dan Pembentukan Harga yang Transparan dan Berkeadilan, oleh SEVP Operation PT KPBN-Inacom.
- d. Peran Sistem Resi Gudang Dalam Menunjang Ekpor Komoditi, oleh Ketua Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Beberapa hal penting hasil Focus Group Discussion (FGD) \* sebagai berikut :

- a. Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) adalah program pemerintah yang diampu oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). SRG merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat instrumen permodalan, sarana tunda jual serta bukti kepemilikan barang yang terjamin secara hukum dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan yang efisien, sarana stabilisasi harga pasar yang dapat menjadi sarana pemantauan/pengendalian stok nasional.
- b. PLK berfungsi sebagai tempat bertemunya kepentingan produsen/UMKM dengan pembeli langsung yang bertujuan untuk mempersingkat mata rantai perdagangan, pembentukan harga yang transparan serta membentuk referensi harga sehingga mewujudkan peningkatan daya saing di Sektor Perdagangan baik pada pasar dalam negeri maupun transaksi ekspor.
- c. Optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan SRG dan PLK tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana pemahaman para pemangku kepentingan yang terkait terhadap kedua instrumen ini. Pengembangan SRG dan PLK memerlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar dapat saling bersinergi, dan juga pemahaman teknis yang menyeluruh terhadap SRG dan PLK oleh para pelaku usaha yang memanfaatkan kedua instrumen ini. Hal ini yang menjadi salah satu dasar kami untuk mengadakan kegiatan bulan literasi SRG dan PLK yang bertujuan antara lain untuk menyebarluaskan informasi terkait SRG dan PLK dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait SRG PLK yang pada gilirannya dapat menjangkit minat pelaku usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan SRG dan PLK.
- d. Kegiatan Bulan Literasi SRG dan PLK ini akan dimulai pada 11 November 2024 sampai dengan Desember 2024, kegiatan yang akan berlangsung antara lain adalah webinar, kuliah umum di Perguruan Tinggi, Pertemuan Koordinasi dengan stakeholder terkait, kegiatan sosialisasi kepada petani dan pelaku usaha bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di berbagai lokasi, serta penyebaran literasi melalui media sosial.

Informasi manfaat SRG dan PLK dapat ditingkatkan dengan baik dan secara masif, yang berujung kepada meningkatnya pemahaman, sinergitas dan pemanfaatan SRG dan PLK khususnya dalam mendukung penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor.

- e. Peran SRG dan PLK dalam Mengatasi permasalahan perdagangan, perlu ada penguatan sistem perdagangan yang transparan dan efisien. SRG dapat digunakan untuk memberikan jaminan mutu dan keaslian produk yang disimpan di gudang-gudang yang terdaftar, sementara PLK dapat bertindak sebagai mediator yang menghubungkan nelayan/pembudidaya dengan pasar, baik lokal maupun internasional. Kolaborasi antara PT KPBI dan PT Panen.go.id sebagai platform distribusi yang berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan meminimalisir praktik perantara yang merugikan.
- f. Melalui sinergi antara SRG, PLK, dan KL, diharapkan dapat tercipta sebuah ekosistem perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani rempah Indonesia. Dengan adanya sistem lelang yang transparan, serta pengawasan dari pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, produk rempah Indonesia bisa lebih mudah diakses oleh pasar internasional tanpa adanya praktek perbajakan atau penyalahgunaan harga.

### Dokumentasi



Gambar 50. Pembukaan Bulan Literasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2024

## 7. Identifikasi dan pendampingan Calon Pengelola Gudang SRG di Kota Batam

Kegiatan identifikasi dan pendampingan calon pengelola gudang SRG di Kota Batam untuk fasilitasi pembentukan lembaga calon pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan kualitas ikan yang diresigudangkan untuk mendukung kelancaran distribusi ikan dalam program MBG.

Tujuan Kegiatan adalah : Memperluas penerapan dan manfaat Sistem Resi Gudang untuk meningkatkan ketahanan pangan sektor perikanan, Menjamin kontinuitas pasokan ikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Mengidentifikasi dan memantau calon pengelola gudang SRG yang berpotensi di Kota Batam dan Menyusun langkah-langkah tindak lanjut untuk pengembangan lebih lanjut SRG di sektor perikanan.

Tim Identifikasi dan pemantauan SRG melaksanakan kegiatan pada tanggal 17-19 November 2024 dipimpin oleh Direktur Logistik, didampingi Kepala Dinas Perikanan Kota Batam (Yudi Admajianto) dan tim, Katimja Pemantauan, PJ SRG, perwakilan PSDKP Pangkalan Batam dan Tim Dit Logistik.

Profil Calon Pengelola Gudang SRG:

PT Hasil Laut Sejati

- a. Berlokasi di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau
- b. Memiliki fasilitas cold storage berkapasitas 2.000 ton yang terbagi ke dalam 4 ruangan
- c. Perusahaan ini mengoperasikan 13 kapal penangkap ikan dengan alat tangkap purse seine serta 1 kapal pengangkut berkapasitas 30–100 GT. Wilayah penangkapan berada di Laut Natuna dengan waktu berlayar selama 20 hari, menghasilkan tangkapan utama berupa layang benggol dan tongkol. Hasil tangkapan didistribusikan ke Batam, Pekanbaru, Jakarta, dan Palembang, dengan biaya pengiriman ke Jakarta sebesar Rp 1.800–Rp 2.000 per kilogram.
- d. PT Hasil Laut Sejati telah lama menerapkan mekanisme tunda jual dengan menerima titipan hasil tangkapan kapal saat harga ikan turun dan stok melimpah, sembari memberikan pinjaman sebagai modal berlayar kembali. Namun, penerapan mekanisme ini menghadapi kendala, terutama terkait mutu ikan titipan. Jika mutu ikan dan performa mesin pembeku tidak sesuai standar, ikan titipan sulit terjual di pasaran. Sebaliknya, ikan milik PT Hasil Laut Sejati sendiri memiliki mutu yang lebih baik dan terjamin. Akibatnya, ikan titipan sering mengalami

penurunan mutu yang signifikan, berdampak pada anjloknya harga jual.

- e. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi pengelola gudang SRG, PT Hasil Laut Sejati telah memenuhi beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu: NIB, SIUP, TDP, SKP dan HACCP.

#### PT Berkat Samudera Sukses

- a. Berlokasi di Pasar Basah Botania 2, Kios Blok D No. 5-6-7
- b. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya, pembelian dan penjualan lokal serta ekspor m ke Singapura dan Malaysia. Selain itu, perusahaan ini juga memasok ikan di wilayah Kota Batam untuk pasar, UMKM, warteg, serta pengolahan ikan rebus. PT Berkat Samudera Sukses menyerap ikan hasil tangkapan nelayan di wilayah Kepulauan Riau, dan pada musim paceklik, perusahaan ini mengambil ikan dari daerah Juwana Pati untuk memenuhi kebutuhan penjualan.
- c. Perusahaan ini memiliki gudang beku dengan kapasitas 70 ton dan juga membina Koperasi Berkat Anugerah Abadi, yang anggotanya terdiri dari pembudidaya, pemasar, dan penangkap ikan. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah pemasaran baik di pasar lokal maupun ekspor.
- d. PT Berkat Samudera Sukses telah melaksanakan sistem tunda jual ikan milik nelayan sebagai jaminan modal berlayar, dengan jangka waktu maksimal 30 hari.
- e. Untuk menjadi pengelola SRG PT Berkat Samudera Sukses telah mengikuti pelatihan calon pengelola gudang SRG dan telah mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk menjadi operator pengelola gudang SRG
- f. Dokumen yang telah dimiliki perusahaan diantaranya NIB, SIUP, TDP, SKP, dan HACCP.

#### PT Natuna Fish Building

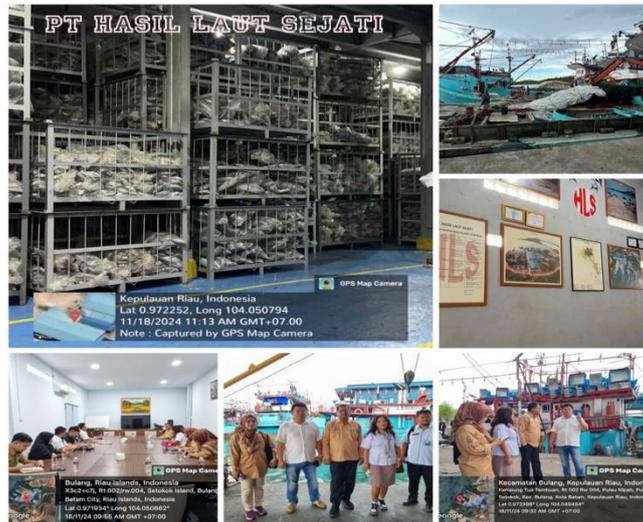
- a. Berlokasi di pergudangan kartika blok B No 2 Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam
- b. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan lokal serta ekspor ke Singapura dan Malaysia. perusahaan melakukan memasok ikan di wilayah Kota Batam untuk pasar, UMKM, warteg, serta pengolah ikan rebus, ekspor ke Singapura dan Malaysia serta suplay ke PT Sanjaya komoditas Cumi beku.
- c. PT Natuna Fish Building memiliki gudang beku berkapasitas 350 ton dan mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan daerah tangkapan laut Natuna, dan pada musim paceklik perusahaan ini mengambil ikan dari daerah Juwana Pati untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan di Kota Batam.

- d. Sebagai langkah menuju pengelola gudang SRG, PT Natuna Fish Building telah memenuhi beberapa persyaratan administratif yang diperlukan, antara lain: NIB, SIUP, TDP, SKP, dan HACCP.

Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, berada dalam posisi surplus produksi ikan, dengan data produksi tangkapan ikan pada tahun 2023 mencapai 320 ton/tahun. Dengan angka konsumsi ikan per kapita sebesar 47,55 kg, provinsi ini berpotensi menjadi buffer stok ikan bagi daerah lain. Hal ini memberikan peluang besar untuk pengembangan SRG sebagai bagian dari strategi peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga ikan di pasar domestik maupun ekspor.

Kota Batam memiliki target untuk memasok makan bergizi gratis ke 987 sekolah yang meliputi PAUD hingga SMP. Program ini akan sangat terbantu dengan adanya implementasi SRG, di mana pasokan ikan sebagai sumber protein dapat dijamin kualitas dan kontinuitasnya.

#### Dokumentasi



Gambar 51. Identifikasi dan pendampingan Calon Pengelola Gudang SRG di Kota Batam

### 1.2.11 Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

#### Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan.

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. target tahun 2024 yaitu penambahan 5 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 11     | Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan | 2024* | 5      | 5         | 100                                  | 5            | 5                   | 100,00  |
|        |  | 2023  | 3      | 3         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 3      | 3         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 13. diatas, menunjukkan bahwa Capaian indikator Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan pada tahun 2024 adalah sebesar 5 Lembaga, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 5 Lembaga. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 3 Lembaga atau setara 100% dari target 3 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 40% .Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3 Lembaga atau setara 100% dari target 3 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 40%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 5 Lembaga setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 5 Lembaga.

Adapun capaian dari 5 Lembaga tersebut adalah :

1. Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Mustika Jaya 01 dengan CS Asia Makmur Rejeki
2. Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Slamet Rahayu Makmur dengan CS Asia Makmur Rejeki
3. Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Makmur Rejeki Colekting dengan Kapal Penangkap Berkah Mina Santosa

4. Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Ikan Asia Jaya 01 dan CS PT. Asia Makmur Rejeki
5. Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Ikan Selamat Rahayu Makmur dan CS PT. Asia Makmur Rejeki

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu sebesar Rp500.000.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp499.705.533,- atau sebesar 99,94% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### **1. Persiapan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Kapal Angkut**

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 melalui Zoom Meeting. Rapat di buka oleh Direktur Logistik, dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi, dan dihadiri oleh perwakilan penyedia PT Suwondo Sandika dan Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik.

Tujuan Rapat yaitu Pembahasan draft Laporan Pendahuluan Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024.

Penyediaan kapal angkut ikan dimaksudkan untuk mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur melalui penyediaan logistik perikanan. Ditjen PDSPK khususnya Dit. Logistik ingin berkontribusi dan berpartisipasi untuk melaksanakan dan meningkatkan kepastian ketersediaan bahan baku, konektivitas, efisiensi dan kontinuitas untuk konsumsi dan pengolahan hasil perikanan.

Definisi terkait kapal angkut ikan mengacu pada peraturan terkait yaitu :

- a. PP No, 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur;

d. PermenKP No. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023;

Perlu adanya batasan dalam penyusunan FS terkait kapal angkut ikan apa yang akan dikaji apakah kapal angkut ikan beku atau ikan hidup. Kebutuhan data untuk data sekunder agar diperoleh selengkap mungkin. Untuk optimalisasi pengambilan data sekunder dilakukan memodifikasi metode surveinya melalui FGD, in depth interview.

Untuk data primer yang dilakukan melalui wawancara dan kuesioner, perlu adanya koordinasi dan diskusi dengan Dit. Logistik untuk menentukan responden yang tepat.

Disarankan untuk pengambilan data primer dilaksanakan di Probolinggo, karena banyak mengangkut ikan dari Zona 3, selain itu di Probolinggo banyak terdapat kapal angkut ikan dengan kapasitas 200 GT ke atas. Walaupun pada zona 3, kapal angkut ikan lebih efektif untuk kapasitas kecil. Jenis kapal pengangkutan ikan berdasarkan Pelabuhan Pangkalannya mengacu pada PP no. 5 Tahun 2021

#### Dokumentasi



Gambar 52. Persiapan Pengandaan Jasa Konsultasi Perencanaan Kapal Angkut

## 8. Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024

Dalam rangka Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024, Direktorat Logistik telah melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024

secara daring di RR Direktorat Logistik, GMB III Lt. 12 pada tanggal 5 Desember 2024. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh PT. Suwondo Sandika (tim konsultan), Bpk. Deni Soeboer (akademisi IPB), Bpk. M.Ardwiansyah (PT. Biro Klasifikasi Indonesia/BKI), perwakilan DJPT, perwakilan Inspektorat IV, perwakilan BPPSDMKP, dan perwakilan lingkup Direktorat Logistik.

Maksud Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024 ini secara umum adalah untuk mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur melalui penyediaan logistik perikanan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuannya adalah tersedianya analisis yang mendalam sehingga risiko kegagalan pembangunan kapal angkut dapat diminimalkan dan peluang keberhasilannya menjadi lebih besar.

Akan dilakukan koordinasi lanjutan secara informal dengan tim konsultan dengan melibatkan Bpk. Deni Soeboer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk memperkaya dan memperkuat isi dari Laporan Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024.

#### Dokumentasi



Gambar 53. Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024

## 1.2.12 Sasaran Kegiatan Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

### Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam rangka peningkatan operasional gudang beku 1000 ton.

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023, total target sebanyak 4 unit. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 14. Target dan capaian IK 12

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 12     | Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun | 2024* | 4      | 4         | 100                                  | 4            | 4                   | 100,00  |
|        |  | 2023  | 1      | 1         | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 14 di atas Capaian indikator Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun pada tahun 2024 adalah sebesar 4 Unit, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 4 Unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 1 Unit atau setara 100% dari target 1 Unit, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 75% .Realisasi pada tahun 2024 sebesar 4 Unit setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 4 Unit. dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik.

Adapun capaian indikator ini adalah telah selesainya :

1. Pekerjaan Heater, Pintu dan Room Cold Storage
2. Pekerjaan Loading Door Cold Storage
3. Pekerjaan Lift Cold Storage
4. Pekerjaan Revitalisasi Cold Storage

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp2.050.000.000,- yang bersumber dari anggaran PNBP.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 1.673.890.435,- atau sebesar 81,65% terhadap pagu.

### 1.2.13 Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

#### Indikator Kinerja Kegiatan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir.

Tabel 15. Target dan capaian IK 13

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 13     | Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan | 2024* | 287    | 293       | 102,09                               | 287          | 293                 | 102,09  |
|        |  | 2023  | 367    | 379       | 103,27                               |              |                     |   |
|        |  | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 15 diatas Capaian indikator Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan pada tahun 2024 adalah sebesar 293 Unit, atau setara dengan 102,09% terhadap target tahun 2024 sebesar 287 Unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 379 Unit atau setara 103,27% dari target 3 Lembaga, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -29% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 293 Unit setara dengan 102,09% dari target RPJMN sebesar 287 Unit. dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik.

Adapun capaian indikator ini adalah telah selesainya pengadaan :

1. Pallet Besi 20 Unit
2. Pallet Dasar 253 Unit
3. Forklift 1 Unit
4. Timbangan 2 Unit
5. Peralatan Mobil ATI 10 Unit
6. Peralatan Pengolahan 7 Unit

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu sebesar Rp 1.306.875.000,- yang bersumber dari anggaran PNPB.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 1.069.818.075,- atau sebesar 81,86% terhadap pagu.

#### **1.2.14 Sasaran Kegiatan Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan**

##### **Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)**

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik. Target indikator tahun 2024 adalah sebesar 1.100 orang.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih

pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data pada indikator ini adalah posisi akhir.

Tabel 16. Target dan capaian IK 14

|    | Indikator Kinerja   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|----|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|    | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 14 | Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan | 2024* | 1100   | 1100      | 100                                  | 1100         | 1100                | 100,00  |
|    |   | 2023  | 1215   | 1257      | 103,46                               |              |                     |   |
|    |   | 2022  | 1125   | 1439      | 127,91                               |              |                     |   |
|    |   | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|    |   | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 16 diatas Capaian indikator Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 adalah sebesar 1100 Orang, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 1100 Orang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 1215 Orang atau setara 103,46% dari target 1215 Orang, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -14% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 1439 Orang atau setara 127,91% dari target 1125 Orang, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -30% hal ini disebabkan adanya penurunan target dan alokasi anggaran. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 1100 Orang setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 1100 Orang.

capaian Triwulan IV diperoleh dari tenaga kerja yang terlibat pada pelaksanaan indikator kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang sebanyak 375 Orang dan kegiatan Sarana Penyimpanan dan Sarana Distribusi Logistik sebanyak 725 Orang.

### 1.2.15 Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

#### Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah

pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Nilai PNBPN lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Target PNBPN tahun 2024 sebesar 2 miliar berasal dari gudang beku 2000 ton sebagai objek penarikan PNBPN.

Tabel 17. Target dan capaian IK 15

| IKK No | Indikator Kinerja                             | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 15     | Nilai PNBPN di Lingkungan Direktorat Logistik | 2024* | 2,06   | 2,06      | 100                                  | 2,06         | 2,06                | 100,00  |
|        |   | 2023  | 6,66   | 6,69      | 100,45                               |              |                     |   |
|        |   | 2022  | 3,39   | 4,7       | 138,64                               |              |                     |   |
|        |   | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 17 diatas Capaian indikator Nilai PNBPN di Lingkungan Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 2,06 Miliar, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 2,06 Miliar. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 6,69 Miliar atau setara 100,45% dari target 6,66 Miliar, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -224% . Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,7 Miliar atau setara 138,64% dari target 3,39, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -128%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 2,06 Miliar setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 2,6 Miliar.

Dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton dan gudang beku 2000 Ton Muara Baru serta Mobil Refrigerasi yang menjadi objek penarikan PNBPN kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik.

## 1.2.16 Sasaran Strategis Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

### Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran.

Tabel 18. Target dan capaian IK 16

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 16     | Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik | 2024* | 87     | 88,06     | 101,22                               | 87           | 88,06               | 101,22  |
|        |  | 2023  | 83,2   | 90,17     | 108,38                               |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 83     | 84,17     | 101,41                               |              |                     |   |
|        |  | 2021  | 73     | 82,37     | 112,84                               |              |                     |   |
|        |  | 2020  | 72     | 80,59     | 111,93                               |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 18 diatas Capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 88,06 Indeks, atau setara dengan 101,22% terhadap target tahun 2024 sebesar 87 Indeks. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 90,17 Indeks atau setara 108,38% dari target 83,2 Indeks, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -2%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun

2022 sebesar 84,17 Indeks atau setara 101,41% dari target 83 Indeks, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 4,42%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 82,37 Indeks atau setara 112,84% dari target 73 Indeks, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 6,46%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 80,59 Indeks atau setara 111,93% dari target 72 Indeks, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 8,48% . Realisasi pada tahun 2024 sebesar 88,06 setara dengan 101,22% dari target RPJMN sebesar 87 Indeks.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Logistik pada Triwulan IV antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

### **Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 84. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023.

Tabel 19. Target dan capaian IK 17

| IKK No | Indikator Kinerja   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 17     | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik | 2024* | 84     | 84,45     | 100,54                               | 84           | 84,45               | 100,54  |
|        |   | 2023  | 80,5   | 85,45     | 106,15                               |              |                     |   |
|        |   | 2022  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 19 diatas Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 84,45, atau setara dengan 100,45% terhadap target tahun 2024 sebesar 84. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 85,45 atau setara 106,15% dari target 80,5, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -1%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 84,45 setara dengan 100,54% dari target RPJMN sebesar 84 Indeks.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Logistik pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

### Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023.

Tabel 20. Target dan capaian IK 18

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 18     | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik | 2024* | 100    | 100       | 100                                  | 100          | 100                 | 100,00  |
|        |  | 2023  | 100    | 100       | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 75     | 75        | 100                                  |              |                     |   |
|        |  | 2021  | 75     | 100       | 133,33                               |              |                     |   |
|        |  | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 20 diatas Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% atau setara 100% dari target 100%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% atau setara 100% dari target 100%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100% atau setara 133,33% dari target 75%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -33%.Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% setara dengan 100% dari target RPJMN sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan IV antara lain:

1. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 21. Target dan capaian IK 19

| IKK No | Indikator Kinerja   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 19     | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik | 2024* | 80     | 100       | 125                                  | 80           | 100                 | 125,00  |
|        |   | 2023  | 75     | 97        | 129,33                               |              |                     |   |
|        |   | 2022  | 70     | 98,16     | 140,23                               |              |                     |   |
|        |   | 2021  | 65     | 92,66     | 142,55                               |              |                     |   |
|        |   | 2020  | 60     | 95,45     | 159,08                               |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 21 diatas Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, atau setara dengan 125% terhadap target tahun 2024 sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 97% atau setara 129,33% dari target 75%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 2154%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 98,16% atau setara 140,23% dari target 70%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 12,82%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 92,66% atau setara 142,55% dari target 65%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 10,96%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 95,45% atau setara 159,08% dari target 60%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 2,26%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% setara dengan 125% dari target RPJMN sebesar 80%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan IV, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan.

### Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*. Indikator ini ditargetkan sebesar 94% Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 22. Target dan capaian IK 20

| IKK No | Indikator Kinerja  | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|--|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1   | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 20     | Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar | 2024* | 94     | 133,33    | 141,84                               | 94           | 133,33              | 141,84  |
|        |  | 2023  | 92     | 130       | 141,30                               |              |                     |   |
|        |  | 2022  | 86     | 100       | 116,28                               |              |                     |   |
|        |  | 2021  | 84     | 97,5      | 116,07                               |              |                     |   |
|        |  | 2020  | 82     | 100       | 121,95                               |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 22 diatas, Capaian Persentase Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar pada tahun 2024 adalah sebesar 133,33%, atau setara dengan 141,84% terhadap target tahun 2024 sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 130% atau setara 141,30% dari target 92%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 42,22%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% atau setara 116,28% dari target 86%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 59,86%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 97,5% atau setara 116,07% dari target 84%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 60,01%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100% atau setara 121,95% dari target 82%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 55,86%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 133,33% setara dengan 141,84% dari target RPJMN sebesar 94%.

Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Audiensi dengan Yayasan IPNLF Indonesia
2. Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang komoditas Ikan dan Rumput Laut untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
3. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Piloting Sistem Resi Gudang Ikan Melalui Penerapan Traceability System dengan QR Code di Kabupaten Pati.
4. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Piloting Sistem Resi Gudang Ikan Melalui Penerapan Traceability System dengan QR Code di Kabupaten Pati.
5. Sosialisasi Serifikasi Marine Stewardship Council MSC dan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional Stelina
6. Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel Tahun 2024
7. Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel Tahun 2024
8. Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional STELINA
9. Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional STELINA
10. Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi tahun 2024 dan Monitoring monitoring BP gudang beku
11. Sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku Warehouse Management System di wilayah Aceh
12. Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias menggunakan Moda Kereta Api
13. Rapat Koordinasi anggota Dewan Pengarah kementerian atau lembaga yang terintegrasi dalam Sistem Indonesia National Single Window
14. Rapat lanjutan utk koordinasi inter-kementerian tentang pembahasan revisi PP 5 tahun 2021 terkait penerapan CDIB

## Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 23. Target dan capaian IK 21

| IKK No | Indikator Kinerja   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 21     | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik | 2024* | 80     | 98,24     | 122,79                               | 80           | 98,24               | 122,79  |
|        |   | 2023  | 75,7   | 100       | 132,10                               |              |                     |   |
|        |   | 2022  | 75     | 99        | 132                                  |              |                     |   |
|        |   | 2021  | 72,5   | 97        | 133,79                               |              |                     |   |
|        |   | 2020  | 70     | 97,92     | 139,89                               |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 23 diatas, Persentase Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 98,24%, atau setara dengan 122,79% terhadap target tahun 2024 sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% atau setara 132,10% dari target 75,7%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -15,21%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 99% atau setara 132% dari target 75%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 15,29%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 97% atau setara 133,79%

dari target 72,5%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 13,83%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 97,92% atau setara 139,89% dari target 70%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 8,87% Realisasi pada tahun 2024 sebesar 97,92% setara dengan 139,89% dari target RPJMN sebesar 70%.

### Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV.

Tabel 24. Target dan capaian IK 22

| IKK No | Indikator Kinerja   | Tahun | Target | Realisasi | Persentase Realisasi Terhadap Target | Target RPJMN | Realisasi S.d 2024* | Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN |
|--------|---|-------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|
|        | -1  | -2    | -3     | -4        | -5                                   | -6           | -7                  | -8  |
| 22     | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik | 2024* | 95     | 97,73     | 102,87                               | 95           | 97,73               | 102,87  |
|        |   | 2023  | 95     | 99,9      | 105,16                               |              |                     |   |
|        |   | 2022  | 90     | 98,85     | 109,83                               |              |                     |   |
|        |   | 2021  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |
|        |   | 2020  | -      | -         | -                                    |              |                     |   |

Berdasarkan tabel 23 diatas, Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik pada tahun 2024 adalah sebesar 97,73%, atau setara dengan 102,87% terhadap target tahun 2024 sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,9% atau setara 105,16% dari target 95%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -4,49%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 98,85% atau setara 109,83% dari target 90%, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar -3,34%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 97,73% setara dengan 102,87% dari target RPJMN sebesar 95%.

### 3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Pagu Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2024 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 24 November 2023 serta setelah adanya Automatic Adjustment berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp. 45.767.163.000,- Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 44.728.333.262,- sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar 97,73% dari pagu (**sumber data Sakti SP2D**).

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 31 Desember 2024

| No           | Rincian Ouput   | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | Sisa Anggaran (Rp)   | Persentase realisasi dari pagu (%) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1            | ABR.004 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas | 796.000.000           | 795.269.036           | 730.964              | 99,91                              |
| 2            | AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi                        | 830.100.000           | 829.268.730           | 831.270              | 99,90                              |
| 3            | BDB.001 Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan     | 500.000.000           | 499.705.533           | 294.467              | 99,94                              |
| 4            | BMA.051 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP  | 682.000.000           | 680..874546           | 1.125.454            | 99,83                              |
| 5            | QDB.002 Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang                     | 402.783.000           | 402.725.249           | 57.751               | 99,91                              |
| 6            | QDB.003 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok      | 660.000.000           | 659.501.042           | 498.958              | 99,92                              |
| 7            | QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP  | 27.768.000.000        | 27.449.918.817        | 318.081.183          | 98,85                              |
| 8            | QEG.002 Sarana distribusi logistik produk KP  | 4.320.000.000         | 4.222.467.026         | 97.532.974           | 97,74                              |
| 9            | QEG.006 Mobil refrigerasi (MP korporasi)  | 4.320.000.000         | 4.317.159.513         | 2.840.487            | 99,93                              |
| 10           | RAL.051 Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku  | 1.306.875.000         | 1.069.818.075         | 237.056.925          | 81,86                              |
| 11           | RAN.001 Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan          | 2.131.405.000         | 2.127..735260         | 3.669.740            | 99,83                              |
| 12           | RBQ.003 Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton                                | 2.050.000.000         | 1.673.890.435         | 376.109.565          | 81,65                              |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>45.767.163.000</b> | <b>44.728.333.262</b> | <b>1.038.829.738</b> | <b>99,73</b>                       |

(sumber : Sakti)

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Oktober sampai dengan Desember 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 100,71. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan II diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Koridor Logistik Hasil Perikanan yang Terkelola (Koridor); target 5 Lembaga; capaian 5 Koridor atau 100% dari target; yaitu :
  - Koridor Papua-Jawa
  - Koridor Maluku-Jawa
  - Koridor Sulawesi Utara-Jawa
  - Koridor Sulawesi Tenggara-Jawa
  - Koridor Sulawesi Selatan-Jawa
- IKK Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit); target 1 Unit; Capaian 1 Unit atau 100% dari target; yaitu :
  - Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan
- IKK Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data); target 4 Data; capaian 4 Data atau 100% dari target; yaitu :
  - Pemetaan Logistik Hasil Perikanan
  - Penyusunan Rencana Pasokan dan Kebutuhan Ikan
  - Perhitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan
  - Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga Ikan pada Hari Besar Keagamaan Nasional
- IKK Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga atau 100% dari target; yaitu :
  - Kelompok Kerja SLIN Provinsi Jawa Timur
  - Kelompok Kerja SLIN Provinsi Sulawesi Tenggara
  - Kelompok Kerja SLIN Provinsi Papua
  - Kelompok Kerja SLIN Provinsi Maluku
  - Kelompok Kerja SLIN Provinsi Sulawesi Utara

- IKK Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan); target 3 Rekomendasi Kebijakan; capaian 3 Rekomendasi Kebijakan atau 100% dari target; yaitu :
  - Rekomendasi persetujuan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan Triwulan I tahun 2024
  - Rekomendasi persetujuan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan Triwulan II tahun 2024
  - Rekomendasi persetujuan usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan Triwulan III tahun 2024
- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 23 Kesepakatan; capaian 23 Kesepakatan atau 100% dari target; yaitu :
  - Kesepakatan antara PT. Rahayu Perdana Trans dan PT. Salam Pasific Indonesia Line Cabang Biak tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PT. Rahayu Perdana Trans dan Kurniawan Kasno Pemilik Kapal Lucy Star Pasific tentang Pengadaan dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PT. Rahayu Perdana Trans dan PT. Pindad Internasional Logistic tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PPN Kwandang dan Pengolah Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
  - Kesepakatan antara PPN Kwandang dan Pengolah Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
  - Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dan Pengolah Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
  - Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dan Pengolah Ikan Asin Kering tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
  - Kesepakatan antara Pengelola CS 2000 Ton Muara Baru dan Koperasi Mina Muara Sejahtera tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
  - Kesepakatan antara Pengelola CS 2000 Ton Muara Baru dan PT. Arto Ulam Jaya tentang Penyimpanan Hasil Perikanan
  - Kesepakatan antara PT. Rukma Padaya Trans (HSN Group) dan PT. Samudra Indo Sejahtera tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara Gerakan Bawah Air dengan Tofa Farm tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan

- Kesepakatan antara Keluarga Ikan Hias Cangu dengan CV. Molly Jaya Indonesia tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Kelompok Bawah Air tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Keluarga Ikan Hias Cangu tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Kelompok Mina Muda Abadi tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan CV. Molly Jaya Indonesia tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara Via KOI dengan Yuriko KOI tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
  - Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Berkah Alam tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
  - Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Sumber Jaya tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
  - Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Mutiara Laut tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
  - Kesepakatan antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan Pedagang Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
  - Kesepakatan antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan Pedagang Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
  - Kesepakatan antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan Pedagang Ikan tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- IKK Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit); target 10 Unit; capaian 10 Unit atau 100% dari target; yaitu :
- Poklhasar Berkah Bersama Kab Subang
  - Poklhasar Putra Barokah Kab Karawang

- Poklhasar Benteng Laut Kab Bau bau
- Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari, Jakarta Selatan
- Koperasi Multi Pihak Catra Karya Nusantara Kab Garur
- Koperasi Nelayan Indonesia Mina Lestari Kab. Pangandaran
- Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Rigaih, Aceh Jaya
- Poklhasar Cimesir, Kab Lebak
- Koperasi Mina Sari Dewata Kab Karangasem
- KSU Insan kamil, Tangerang
- IKK Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit); target 5 Unit; capaian 5 Unit atau 100% dari target; yaitu :
  - Koperasi Produsen Tuna Selat Malaka ,Aceh Utara
  - Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya Kab, Halmahera Selatan
  - Koperasi Produsen Sinergi Pindang Jaya Bahari, Jakarta Selatan
  - Koperasi Produsen Lintas Maluku Utara, Pulau Morotai
  - Maju Bersama Abadi, Kab. Kebumen
- IKK Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi); target 5 Unit; capaian 5 Unit atau 100% dari target; yaitu :
  - Koperasi Produsen Mitra Nelayan Samudra, Kab. Pati
  - Koperasi Mina Muara Sejahtera, Kab. Lebak
  - Koperasi Multi Pihak Catra Karya Nusantara, Kab. Garut
  - Koperasi Nelayan Indonesia Mina Lestari, Kab. Pangandaran
  - Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru, Kab. Sukabumi
- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 8 Lembaga; capaian 8 Lembaga atau 100% dari target; yaitu :
  - Perumda Karya Lasinrang, Pinrang
  - CV. Anugerah agung Global, Palopo
  - Koperasi Adi Luwung, Luwu Timur
  - PT Berkah Aneka Laut, Pasuruan
  - PT Kebula Raya Bestari, Bogor
  - Koperasi Bahari Indah Perkasa, Pasuruan
  - PT Xinhai Yuan, Kubu Raya
  - PT Hasil Laut Sejati, Batam
- IKK Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga yaitu :
  - Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Mustika Jaya 01 dengan CS Asia Makmur Rejeki
  - Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Slamet Rahayu Makmur dengan CS Asia Makmur Rejeki

- Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Makmur Rejeki Colekting dengan Kapal Penangkap Berkah Mina Santosa
- Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Ikan Asia Jaya 01 dan CS PT. Asia Makmur Rejeki
- Kesepakatan Bersama antara Kapal Pengangkut Ikan Selamat Rahayu Makmur dan CS PT. Asia Makmur Rejeki;
- IKK Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit); target 4 Unit; Capaian 4 Unit atau 100% dari target; yaitu :
  - Pekerjaan Heater, Pintu dan Room Cold Storage
  - Pekerjaan Loading Door Cold Storage
  - Pekerjaan Lift Cold Storage
  - Pekerjaan Revitalisasi Cold Storage
- IKK Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit); target 287 Unit; capaian 293 Unit atau 102% dari target; yaitu :
  - Pallet Besi 20 Unit
  - Pallet Dasar 253 Unit
  - Forklift 1 Unit
  - Timbangan 2 Unit
  - Peralatan Mobil ATI 10 Unit
  - Peralatan Pengolahan 7 Unit
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 1100 Orang; capaian 1100 Orang atau 100% dari target; yaitu :
  - Berasal dari tenaga kerja yang terlibat di bidang Sistem Resi Gudang dan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana
- IKK Nilai PNPB di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar); target 2,06 Milyar; capaian 2,06 Milyar atau 100% dari target; yaitu :
  - Penerimaan PNPB yang berasal dari penggunaan dan pemanfaatan CS 1000 Ton dan CS 2000 Ton
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks); target 87 Indeks; capaian 88,06 Indeks atau 101,22 dari target; yaitu :
  - IP ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen
- IKK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai); target 84 Nilai; capaian 84,45 Nilai atau 100,54% dari target' yaitu :
  - aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%)
- IKK Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 100%; capaian 100% atau 100% dari target; yaitu :
  - Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti 100%

- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 100 sebesar 125 % dari target; yaitu :
  - Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit telah ditindaklanjuti secara tuntas
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 120% dari target. yaitu :
  - Rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali
- IKK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%); target 80%; capaian 98,24% atau 122% dari target; yaitu :
  - kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan
- IKK Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 95%; capaian 97,73% atau 102,87% dari target. yaitu :
  - Data realisasi sampai dengan 31 Desember 2024

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan IV Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

## 2. Lampiran

### 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Logistik

|  |  |
|--|--|
|   | <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b><br/><b>DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING</b><br/><b>PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</b><br/>JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16<br/>JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041<br/>TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132<br/>LAMAM <a href="http://www.kkp.go.id">www.kkp.go.id</a> SUREL <a href="mailto:persuratan.pds@kkp.go.id">persuratan.pds@kkp.go.id</a></p> |
| <p align="center"><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b><br/><b>DIREKTORAT LOGISTIK</b></p>  |  |
| <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>   |  |
| <p>Nama : <b>Berny A. Subki</b><br/>Jabatan : Direktur Logistik</p>  |  |
| <p>Selanjutnya disebut pihak pertama.</p>  |  |
| <p>Nama : <b>Budi Sulistiyo</b><br/>Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p>   |  |
| <p>Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.</p>   |  |
| <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.</p> |  |
| <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>   |  |
| <p align="center">Jakarta, Januari 2024</p>  |  |
| <p align="center"><b>Pihak Kedua,</b><br/><b>Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b></p>  | <p align="center"><b>Pihak Pertama,</b><br/><b>Direktur Logistik</b></p>   |
| <br><p align="center">Budi Sulistiyo</p>  | <br><p align="center">Berny A. Subki</p>   |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT LOGISTIK**

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |  | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|--|--------|
| 1.               | Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan  | 1.                         | Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)  | 5      |
| 2.               | Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)  | 2.                         | Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)                                      | 1      |
| 3.               | Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP   | 3.                         | Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)  | 4      |
| 4.               | Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok  | 4.                         | Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)                               | 8      |
| 5.               | Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas                     | 5.                         | Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)            | 5      |
| 6.               | Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP | 6.                         | Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan) | 29     |
| 7.               | Tersedianya sarana penyimpanan produk KP   | 7.                         | Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)  | 15     |
| 8.               | Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP   | 8.                         | Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)  | 5      |
| 9.               | Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha                             | 9.                         | Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)  | 5      |
| 10.              | Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang                             | 10.                        | Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)                    | 10     |

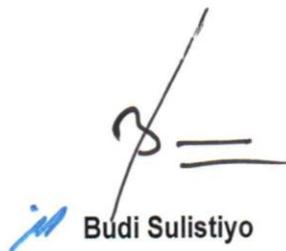
| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET |
|------------------|---|----------------------------|---|--------|
| 11.              | Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan                          | 11.                        | Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)                       | 8      |
| 12.              | Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton  | 12.                        | Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)   | 4      |
| 13.              | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku  | 13.                        | Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)   | 287    |
| 14.              | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan                            | 14.                        | Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)   | 1.100  |
| 15.              | Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP  | 15.                        | Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)  | 2,06   |
| 16.              | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik | 16.                        | Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)   | 87     |
|                  |   | 17.                        | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)   | 84     |
|                  |   | 18.                        | Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)  | 100    |
|                  |   | 19.                        | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%) | 80     |
|                  |   | 20.                        | Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)                          | 94     |
|                  |   | 21.                        | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)                                     | 80     |
|                  |   | 22.                        | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)   | 95     |

## DATA ANGGARAN

| NO   | KEGIATAN                              | ANGGARAN<br>(Rp.000) |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan | 57.574.000           |
| <b>Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2024</b> |                                       | <b>57.574.000</b>    |

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya  
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,  
Direktur Logistik



Berny A. Subki